

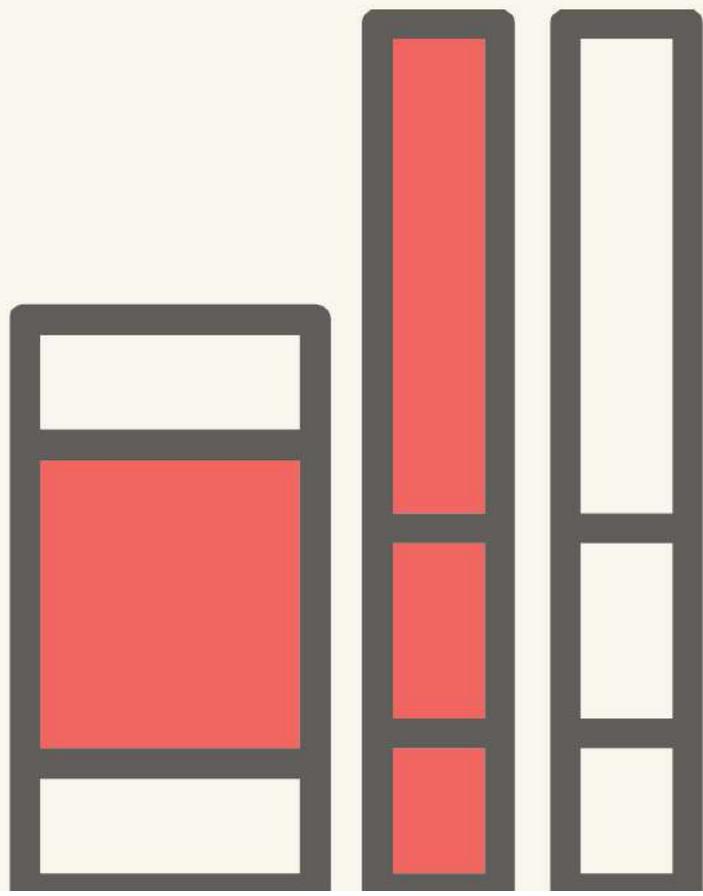


PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

KABUPATEN BANGKA

EDISI I

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangka
Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka adalah publikasi yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka. Publikasi ini bersisikan pedoman serta Peraturan-peraturan yang mendasari pelaksanaan Statistik Sektoral ditujukan untuk membantu Produsen Data (Perangkat Derah). Diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan Statistik Sektoral oleh Produsen Data mematuhi tahapan ; Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, Pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, hingga Penyebarluasan Data.

Kami berharap buku pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh semua Produsen Data dan pihak yang terkait, sehingga seluruh kegiatan statistik di Kabupaten Bangka dapat berjalan dan terdokumentasi dengan baik. Buku ini telah disusun dengan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi.

Kritik dan saran yang membangun selalu terbuka demi kesempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang.

Sungailiat, Februari 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bangka



Drs. Teddy Sudarsono. M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Dasar Hukum.....	1
1.4 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2
1.4.1 Perencanaan	2
1.4.2 Pengumpulan	2
1.4.3 Pemeriksaan	2
1.4.4 Diseminasi	2
BAB II SATU DATA INDONESIA (SDI)	3
2.1 Standar Data	3
2.1.1 Komponen	3
2.1.2 Tujuan Standar Data	4
2.1.3 Peraturan yang Mendasari	4
2.1.4 Standar Data Statistik dapat dilihat pada	4
2.1.5 Alur Pengajuan Standar Data Statistik untuK Intas Instansi	4
2.2 Metadata	5
2.2.1 Peraturan yang Mendasari	5
2.2.2 Jenis Metadata Statistik	5
2.2.3 Manfaat Metadata.....	5
2.2.4 Alur Penyampaian Data dan Metadata	6
2.3 Interoperabilitas Data	6
2.3.1 Peraturan yang Mendasari	6
2.3.2 Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:	7
2.4 Kode Referensi dan/atau Data Induk.....	7
BAB III RANCANGAN KEGIATAN STATISTIK	10
3.1 Identifikasi Kebutuhan	10
3.2 Racangan	11
3.3 Rekomendasi Statistik	15

3.3.1 Dasar kegiatan	16
3.3.2 Tujuan Rekomendasi Statistik:	16
3.3.3 Standar Pelayanan Rekomendasi Statistik	16
3.3.4 Mekanisme Rekomendasi	17
3.4 Implementasi	17
3.5 Pengumpulan Data.....	17
3.6 Penyiapan Instrumen Penelitian dari Kegiatan Statistik.....	19
3.7 Implementasi	21
3.8 Pengolahan dan Analisis Data	22
3.9 Penyebarluasan Data.....	28
3.10 Ketersediaan Data Serta Penjaminan Transparansi Informasi Statistik Untuk Pegguna Data	29
3.11 Sumber Data Dan Metodologi.....	29
3.12 Akurasi dan Penjaminan Kualitas Data	31
3.13 Penjaminan Konfidensialitas Data.....	32
BAB IV QUALITY GATES.....	33
4.1 Dimensi Kualitas Output Statistik	33
4.1.1 Relevansi	33
4.1.2 Akurasi	33
4.1.3 Aktualitas dan Ketepatan Waktu	34
4.1.4 Koherensi dan Keterbandingan.....	34
4.1.5 Aksesibilitas	35
4.1.6 Interpretabilitas	35
4.2 Implementasi Quality Gates	35
4.2.1 Penempatan Quality Gates.....	35
4.2.2 Penentuan ukuran kualitas, toleransi, peran dan aksi QG.....	37
4.2.3 Evaluasi QG	38
4.2.4 Dokumen hasil penerapan QG.....	38
BAB V KELEMBAGAAN	41
5.1 Aspek Profesionalitas	41
5.1.1 Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	41
5.1.2 Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi.....	42
5.1.3 Penjaminan Kualitas Data	42

5.1.4	Penjaminan Konfidensialitas Data.....	43
5.2	Aspek Sumber Daya Manusia yang Memadai dan Kapabel.....	43
5.2.1	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	43
5.2.2	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	44
5.3	Aspek Pengorganisasian Statistik	45
5.3.1	Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	45
5.3.2	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	45
5.3.3	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik.....	47
5.3.4	Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata	47
BAB VI	SISTEM STATISTIK NASIONAL	49
6.1	Umum.....	49
6.2	Tujuan.....	49
6.3	Pengertian Sistem Statistik Nasional	49
6.4	Kegiatan Statistik.....	49
6.5	Jenis-jenis Statistik	50
6.6	Indikator kematangan perwujudan SSN	50
6.6.1	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	50
6.6.2	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	51
6.6.3	Sosialisasi dan Literasi Data Statistik.....	51
6.6.4	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	51
6.6.5	Perencanaan Pembangunan Statistik	53
6.6.6	Kematangan Penyebarluasan Data	53
6.6.7	Kematangan Pemanfaatan Big Data	53
	DAFTAR PUSTAKA.....	55
	LAMPIRAN	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkenaan dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Bangka maka perlu disusun pedoman penyelenggaraan yang memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yakni telah sesuai dengan Standar Data, Daftar Data, Interoperabilitas (dapat dibagipakaikan) dan memiliki Kode Referensi dan/atau Data Induk.
2. Menjaga Kualitas Data dengan memperhatikan Relevansi kepada pengguna, dilakukan Identifikasi terkait kebutuhan, memiliki Akurasi Data, Aktualitas yang terjamin, dipantau ketepatan Waktu Diseminasinya, Tersedia untuk pengguna, Disebarluaskan dengan format yang baku, memiliki Keterbandingan dan Konsisten antar waktu.
3. Proses Bisnis yang dilakukan dengan tahapan Perencanaan Data melalui Pendefinisian Kebutuhan Statistik, Desain Statistik dan Penyiapan Instrumen; Pengumpulan Data; Pemeriksaan Data melalui Pengolahan dan Analisis Data; dan dilakukan Penyeberluasan atau Diseminasi Data.
4. Terkait Kelembagaan, dilakukan secara profesional melalui Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, Netralitas dan Obyektivitas terhadap penggunaan Sumber Data dan Metodologi, Penjaminan Kualitas Data, Konfidensialitas Data; dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kapabel melalui penerapan Kompetensi SDM di bidang Statistik dan Manajemen Data; memiliki pengorganisasian Statistik melalui Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan Statistik, penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia, Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik serta Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Walidata.
5. Pembangunan Statistik Nasional, pemanfaatan Data Statistik Dasar dan Sektoral digunakan sebagai dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan serta dilakukan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik; mengajukan Rekomendasi Kegiatan Statistik; dilakukan Perencanaan Pembangunan Statistik serta Penyebarluasan Data.

1.2 Tujuan

Tujuan tersedianya pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah sebagai rujukan ringkas pelaksanaan kegiatan statistik yang memenuhi seluruh aturan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral khususnya dilingkungan pemerintah Kabupaten Bangka.

1.3 Dasar Hukum

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka didasarkan kepada:

- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

1.4 Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dilakukan oleh Perangkat Daerah mengacu kepada Bisnis Proses Statistik yang berlaku diantaranya melalui *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM). dapat dirangkung dalam tahapan sebagai berikut sebagai berikut :

1.4.1 Perencanaan

- Identifikasi kebutuhan (*Specify Needs*)
- Perancangan (*Design*)
- Implementasi Rancangan (*Build*)

1.4.2 Pengumpulan

- Pengumpulan (*Collect*)

1.4.3 Pemeriksaan

- Proses (*Process*)
- Analisis (*Analyze*)

1.4.4 Diseminasi

- Diseminasi (*Disseminate*)
- Evaluasi (*Evaluate*)

BAB II

SATU DATA INDONESIA (SDI)

Satu Data Indonesia (SDI) adalah Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

- memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
- mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
- mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data
- mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-undangan

Untuk itu setiap kegiatan Statistik Sektorial harus memenuhi Prinsip sebagai berikut:

2.1 Standar Data

Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.

2.1.1 Komponen :

- a. Konsep : Ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi
- b. Definisi : Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain
- c. Klasifikasi : Penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas
- d. Ukuran : Unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan
- e. Satuan : Besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan

2.1.2 Tujuan Standar Data

- Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data
- Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah.
- Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.
- Mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang- undangan

2.1.3 Peraturan yang Mendasari

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

2.1.4 Standar Data Statistik dapat dilihat pada:

- Standar Data Statistik Nasional adalah Standar Data yang diajukan oleh Kementerian Lembaga Dinas Instansi dan telah ditetapkan oleh Pembina Data (BPS) melalui Perban disetiap tahunnya:
- Standar Data Statistik nasional dapat dilihat pada tautan <https://indah.bps.go.id>
- Standar Data Statistik yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian .

2.1.5 Alur Pengajuan Standar Data Statistik untuK Intas Instansi

Alur pengajuan dapat dilihat pada Bagan dibawah dengan berpedoman :



- Penetapan yang dilakukan oleh BPS hanya dilakukan untuk SDS yang berlaku lintas instansi.
- Penetapan SDS yang tidak lintas instansi ditetapkan oleh pimpinan K/L Pusat masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Tidak ada penetapan SDS di daerah. Standar Data

2.2 Metadata

Metadata adalah Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Setiap produsen data wajib menghasilkan data dengan dilengkapi dengan metadata serta menyampaikan data dan metadata dari kegiatan statistik sektoralnya setelah kegiatan selesai kepada walidata.

Setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didokumentasikan dalam bentuk metadata kegiatan statistik sebagai bagian dari penyediaan dan penyebarluasan data. Metadata kegiatan statistik memuat informasi yang menggambarkan penyelenggaraan kegiatan statistik. Inventarisasi metadata kegiatan statistik dilakukan dengan menggunakan Formulir Metadata Statistik- Kegiatan (MS-Keg) yang terdiri atas 8 (delapan) blok, yaitu Penyelenggara, Penanggung Jawab, Perencanaan dan Persiapan, Desain Kegiatan, Desain Sampel, Penjaminan Kualitas, Pengolahan dan Analisis, serta Diseminasi Hasil. Pada bagian awal formulir terdapat informasi umum mengenai kegiatan statistik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tata cara pengisian Formulir MS-Keg.

2.2.1 Peraturan yang Mendasari

- a. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

2.2.2 Jenis Metadata Statistik

- **Metadata Kegiatan Statistik (MS Keg):** Informasi proses bisnis kegiatan statistik sesuai tahapan dalam SDI dan proses bisnis statistik yakni *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM).
- **Metadata Variabel Statistik (MS-Var):** Informasi mengenai variabel yang dikumpulkan pada kegiatan statistik dan menjadi pembangun indikator statistik,
- **Metadata Indikator Statistik (MS-Ind) :** Informasi mengenai indikator hasil kegiatan statistik, a.l: konsep dan definisi indikator, interpretasi, metode/rumus penghitungan, ukuran, satuan, klasifikasi penyajian, variabel atau indikator pembangun, aksesibilitas indikator, dll Manfaat Metadata

2.2.3 Manfaat Metadata

Penyusunan metadata akan bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain:

- **Pembina Data** : Metadata menjadi alat bagi pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan statistik
- **Produsen Data** : Menghindari duplikasi kegiatan, Meningkatkan efisiensi anggaran, dan Peningkatan nilai organisasi dengan tatakelola informasi yang baik
- **Walidata** : Memudahkan memahami dan mengelola data, Dokumentasi kegiatan statistik, Pengendalian mutu, Mencegah kesalahan dalam penyampaian data
- **Pengguna Data** : Memudahkan memahami data, Mencegah kesalahan dalam penggunaan dan interpretasi data

2.2.4 Alur Penyampaian Data dan Metadata

- Produsen menyampaikan data & metadata ke walidata
- Walidata memeriksa kesesuaian antara data dan prinsip SDI (standar data, metadata, kode referensi, interoperabilitas)
- BPS memeriksa ulang kesesuaian antara data prioritas dan prinsip SDI (standar data, metadata, kode referensi, interoperabilitas)
- Data dan metadata disebarluaskan melalui portal SDI

2.3 Interoperabilitas Data

Interoperabilitas dimaksudkan adalah data dapat dibagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Agar dapat dibagipakaikan, data harus:

- Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
- Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

2.3.1 Peraturan yang Mendasari

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Satu Data Indonesia.

Esensi Perpres No. 95/2018 dan Perpres No. 39/2019 : Mengatur terkait standar interoperabilitas data dan informasi dalam pelaksanaan bagi pakai data dan informasi antar layanan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Tugas dan kewenangan Kementerian Kominfo :

- sebagai penyelenggara LID Nasional
- membangun dan mengoperasikan fasilitas yang mendukung pemanfaatan Katalog Nasional LID dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- memberikan pertimbangan kelaikan operasi Interoperabilitas Data berdasarkan hasil uji kelaikan operasi interoperabilitas data
- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan LID.

2.3.2 Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:

a. Aman dan andal

Kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

b. Dapat digunakan Kembali (reusable)

Karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.

c. Dapat dibaca (readable)

Kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.

d. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.

e. Dapat diperiksa (auditable)

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.

f. Dapat diukur kinerjanya

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.

g. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.

h. Dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang berbeda karakteristik

Karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

2.4 Kode Referensi dan/atau Data Induk

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Sedangkan data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar Rupa Bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian. Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:

- Kode referensi dan/atau data induk; dan
- Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

Berikut adalah beberapa Kode Referensi yang telah dilakukan

pembahasan di Forum SDI:

1. Referensi Penduduk

NIK menjadi referensi tunggal penduduk Indonesia sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 dan diperkuat dengan kesepakatan Forum SDI 2021 serta arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.

2. Referensi Kewilayahan

Bridging/relasi antara Kode Wilayah Kerja Statistik BPS dan Kode Wilayah Administrasi Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada sig.bps.go.id.

Contoh relasi Kode Wilayah:

No	Wilayah Kerja Statistik - BPS		Wilayah Administrasi - Kemendagri	
	Nama Provinsi	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Provinsi
1	Aceh	11	Aceh	11
2	Sumatera Utara	12	Sumatera Utara	12
3	Sumatera Barat	13	Sumatera Barat	13
4	Riau	14	Riau	14
5	Jambi	15	Jambi	15
6	Sumatera Selatan	16	Sumatera Selatan	16
7	Bengkulu	17	Bengkulu	17
8	Lampung	18	Lampung	18
9	Kep. Bangka Belitung	19	Kep. Bangka Belitung	19
10	Kep. Riau	21	Kep. Riau	21
11	Dki Jakarta	31	Dki Jakarta	31
12	Jawa Barat	32	Jawa Barat	32
13	Jawa Tengah	33	Jawa Tengah	33
14	Di Yogyakarta	34	Di Yogyakarta	34
15	Jawa Timur	35	Jawa Timur	35
16	Banten	36	Banten	36
17	Bali	51	Bali	51
18	Nusa Tenggara Barat	52	Nusa Tenggara Barat	52
19	Nusa Tenggara Timur	53	Nusa Tenggara Timur	53
20	Kalimantan Barat	61	Kalimantan Barat	61
21	Kalimantan Tengah	62	Kalimantan Tengah	62
22	Kalimantan Selatan	63	Kalimantan Selatan	63
23	Kalimantan Timur	64	Kalimantan Timur	64
24	Kalimantan Utara	65	Kalimantan Utara	65
25	Sulawesi Utara	71	Sulawesi Utara	71
26	Sulawesi Tengah	72	Sulawesi Tengah	72
27	Sulawesi Selatan	73	Sulawesi Selatan	73
28	Sulawesi Tenggara	74	Sulawesi Tenggara	74
29	Gorontalo	75	Gorontalo	75
30	Sulawesi Barat	76	Sulawesi Barat	76

31	Maluku	81	Maluku	81
32	Maluku Utara	82	Maluku Utara	82
33	Papua Barat	91	Papua Barat	92
34	Papua	94	Papua	91

3. Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Forum SDI tematik 2021 melakukan pemanduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Standar kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan untuk memberikan identitas unik pada fasilitas pelayanan kesehatan dan memudahkan proses interoperabilitas sistem informasi kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan. Standar kode referensi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022.

BAB III

RANCANGAN KEGIATAN STATISTIK

3.1 Identifikasi Kebutuhan

1. Identifikasi kebutuhan merupakan langkah pertama dalam melakukan suatu kegiatan statistik. Identifikasi kebutuhan dapat ditentukan berdasarkan perumusan masalah yang dikembangkan. Dengan adanya identifikasi kebutuhan, maka penyelenggara kegiatan statistik dapat merancang langkah berikutnya, yaitu menentukan tujuan dan metodologi yang akan dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil identifikasi dipengaruhi oleh adanya permintaan baru atau adanya perubahan, seperti berkurang atau bertambahnya anggaran. Hal-hal yang dilakukan pada tahapan identifikasi kebutuhan adalah:
 - a. Identifikasi awal mengenai statistik (baik berupa indikator statistik maupun data-data) yang diperlukan,
 - b. Identifikasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan dari statistik tersebut.
2. Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan, tahapan selanjutnya adalah melakukan konsultasi kepada para pemangku kepentingan dan melakukan konfirmasi secara rinci atas kebutuhan data statistik. Baik survei maupun kompilasi produk administrasi, dapat dilakukan konsultasi dan konfirmasi melalui Forum Satu Data, khususnya yang terkait data prioritas. Forum Satu Data merupakan suatu forum yang mengumpulkan berbagai stakeholder sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsultasi dan konfirmasi kebutuhan data/indikator.
3. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi konsep dan definisi indikator yang akan diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Konsep dan definisi dapat berdasarkan referensi berbagai sumber. Konsep dan definisi yang sudah diidentifikasi bisa saja tidak sesuai dengan standar statistik yang ada. Namun, untuk memperoleh keterbandingan hasil, perlu menggunakan konsep dan definisi yang sesuai dengan standar statistik. Baik survei maupun kompilasi produk administrasi perlu menerapkan tahapan ini. Saat mengidentifikasi konsep dan definisi ini dapat pula mulai menggunakan standar data. Apabila standar data belum tersedia maka perlu melakukan pengajuan standar data.
4. Setelah dilakukan identifikasi terhadap konsep dan definisi, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap ketersediaan data dan statistik. Hal ini dilakukan untuk memeriksa data dan statistik yang telah tersedia saat ini bisa memenuhi kebutuhan sesuai yang telah diidentifikasi. Salah satu cara memeriksa ketersediaan data dapat dilakukan melalui aplikasi Malang Satu Data (satudata.malangkota.go.id) dan Sistem Informasi Rujukan Statistik (sirusa.bps.go.id). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan ketersediaan data adalah kelebihan dan kekurangan data yang tersedia, termasuk keterbatasan dalam penggunaannya, serta kemungkinannya dalam memenuhi kebutuhan pengguna data. Pemeriksaan terhadap data yang

tersedia dapat memengaruhi bentuk kegiatan statistik yang akan dilakukan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan adanya data yang tersedia sudah dapat memenuhi kebutuhan, maka kegiatan statistik yang akan dilakukan cenderung bersifat kompilasi data. Sebaliknya, jika data yang tersedia masih belum bisa memenuhi kebutuhan, maka pelaksanaan kegiatan dapat berupa sensus atau survei. Data yang tersedia bisa digunakan sebagai data pendukung terhadap hasil sensus atau survei yang dihasilkan.

5. Langkah perencanaan terakhir adalah menyusun proposal kegiatan/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR) yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya dari suatu kegiatan. Proposal kegiatan berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kegiatan statistik yang dilakukan dengan cara survei maupun kompilasi produk administrasi perlu menerapkan tahapan ini.

3.2 Racangan

1. Perancangan adalah tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Tahapan ini harus dilakukan dengan benar agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei dan kompilasi produk administrasi, penyelenggara survei statistik sektoral berkewajiban terlebih dahulu mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada di sirusa.bps.go.id. Kemudian pengajuan rekomendasi kepada BPS dilakukan dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3) baik secara offline ke BPS maupun secara online melalui ROMANTIK ONLINE (<https://pst.bps.go.id>). FS3 tersebut disampaikan setelah berkoordinasi dengan Walidata yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Setelah FS3 diterima, BPS melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelayakan rancangan kegiatan statistik. Jika diperlukan perbaikan, maka penyelenggara survei statistik sektoral hendaknya melakukan perbaikan hingga dinyatakan layak. Setelah dinyatakan layak, BPS mengeluarkan surat rekomendasi. Didalam surat rekomendasi tersebut, terdapat nomor rekomendasi yang nantinya dicantumkan dalam kuesioner survei. Pengajuan rekomendasi ini wajib untuk kegiatan survei namun tidak diwajibkan untuk kegiatan kompilasi produk administrasi.
2. Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dinyatakan bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Penggunaan standar data mampu menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data. Standar data terdiri atas lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik, sebelum memulai kegiatan produksi data statistik, produsen data terlebih dahulu menentukan target kegiatan yang akan dicapai, indikator yang akan digunakan sebagai capaian target dan variabel apa saja yang akan digunakan untuk mengukur capaian target. Pengertian indikator secara umum adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur

perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Ketika dievaluasi secara berkala, sebuah indikator dapat menunjukkan arah perubahan di berbagai unit dan melalui waktu. Sementara variabel adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada kegiatan statistik. Secara sederhana, variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data. Adapun tahapan dalam mengidentifikasi standar data statistik adalah Menyusun konsep, definisi, variable, dan yang terakhir adalah:Menyusun indikator. Pengajuan standar data statistik ini dilakukan secara berjenjang melalui Walidata (Diskominfo), mulai dari walidata Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota diteruskan ke walidata Instansi Daerah Tingkat Provinsi diteruskan ke walidata Instansi Pusat untuk diteruskan ke Pembina Data Statistik.

3. Tahap selanjutnya adalah merancang output statistik yang akan dihasilkan. Penyusunan output didasarkan pada tujuan kegiatan statistik yang ditetapkan pada tahap identifikasi kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar output yang dihasilkan dapat menjawab tujuan survei. Hasil penyusunan output dapat berupa rancangan tabel (dummy table), daftar indikator, atau keduanya. Selain penyusunan output statistik yang akan dihasilkan, tahapan ini juga mencakup penentuan mekanisme diseminasi (penyebarluasan) output tersebut.
4. Tahapan merancang konsep dan definisi variable merupakan kegiatan mendefinisikan variabel- variabel yang akan dikumpulkan dalam kegiatan statistik. , variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. Selain itu, variabel sering disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Setelah menentukan variabel yang akan dikumpulkan beserta konsep dan definisinya, selanjutnya adalah menyusun metadata variable. Metadata Statistik berdasarkan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 terbagi menjadi metadata kegiatan statistik, variable statistik, dan indicator statistik. Metadata statistik tersebut kemudian diinventarisasi menggunakan Formulir Metadata Statistik, yaitu MS-Keg, MS- Var, dan MS-Ind. Mekanisme pelaporan metadata statistik dapat dilakukan secara langsung ke BPS dan dapat pula melalui portal Satu Data Indonesia (data.go.id).
5. Langkah selanjutnya adalah Langkah krusial yang menentukan data seperti apa yang akan didapatkan, yaitu Langkah pemilihan metode pengumpulan data. Pemilihan metode pengumpulan data dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara kegiatan statistik. Metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data untuk survei adalah :
 - a. Wawancara baik melalui moda PAPI (Paper Assisted Personal Interview) maupun CAPI (Computer Assisted Personal Interview),
 - b. Swacakah/self-enumeration (responden mengisi kuesioner sendiri) baik offline maupun online,
 - c. Pengamatan (observasi).

Sedangkan metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk kompilasi produk administrasi antara lain :

- a. Pengumpulan data sekunder
 - b. Pengisian dummy tabel atau lembar kerja
 - c. Web API
 - d. Web Crawling
 - e. dll.
6. Selanjutnya merancang kerangka sampel. Keseluruhan unit dalam populasi akan membentuk kerangka sampel dan dari sinilah anggota sampel dipilih. Kerangka sampel bisa merupakan daftar dari orang, rumah tangga, perusahaan, catatan dalam sebuah file, kumpulan dokumen, atau berupa sebuah peta dimana telah tergambar unitnya secara jelas. Untuk bisa melakukan penarikan sampel secara acak, diperlukan kerangka sampel berupa daftar dari unit berikut keterangan tentang nama, alamat (identifikasi) dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Persyaratan yang harus dipenuhi kerangka sampel adalah:
- a. Lengkap dan up to date, artinya seluruh unit dalam populasi dalam keadaan terakhir harus didaftar.
 - b. Dapat dikenali, artinya seluruh unit di dalam kerangka sampel dapat dikenal kembali melalui alamat atau petanya.

Apabila kerangka sampel belum tersedia dalam proses pemilihan unit sampel, maka sebagai kerangka sampel perlu mempersiapkan terlebih dahulu melalui data hasil pendaftaran secara lengkap (sensus) atau jika data hasil sensus tidak tersedia dapat melakukan listing berupa pendaftaran secara lengkap terhadap unit-unit populasi yang akan dipilih sebagai sampel. Setelah kerangka sampel tersusun, metode pengambilan sampel perlu ditentukan. Terdapat dua jenis pengambilan sampel yaitu non-probability sampling (judgment) dan probability sampling, yaitu sampel berpeluang (Probability Sampling) dan sampel tidak berpeluang (non- probability sampling).

- a. Sampel berpeluang (Probability Sampling). Terdapat banyak pilihan kumpulan unit yang bisa diambil karena hanya sebagian yang akan dipilih dari unit yang ada dalam populasi. Tiap kumpulan unit yang mungkin akan diambil sebagai sampel yang menghasilkan nilai pendugaan yang berbeda. Sehingga bila nilai-nilai unit di dalam populasi sama atau relatif hampir sama (homogen), bisa dikatakan bahwa hasil dugaan dari survei sampel adalah sama dengan nilai populasinya. Sebagai contoh darah yang ada pada tubuh seseorang adalah homogen, sehingga walaupun hanya diambil beberapa cc dan dari satu tempat maka dapat ditentukan golongan darah dalam tubuh seseorang tersebut. Namun homogenitas nilai unit seperti darah sangat jarang ditemui di karakteristik lainnya, sehingga nilai dugaan yang sama dengan populasinya jarang ditemui. Dengan demikian apabila melakukan survei sampel, harus dicari suatu cara untuk dapat mengukur tingkat kecermatan dari penduga. Apabila nilai penduga mempunyai kemungkinan cukup besar nilainya akan mendekati nilai populasi, maka tentunya hasil survei dapat dikatakan cukup baik, dan kurang baik apabila terjadi sebaliknya. Permasalahannya adalah bagaimana cara melakukan pengambilan sampel tersebut, sehingga bisa memperkirakan tingkat kecermatannya. Cara yang bisa digunakan adalah

dengan menggunakan hukum-hukum peluang (acak) untuk penarikan unit ke dalam sampel. Cara ini dinamakan metode penarikan sampel berpeluang atau sering disingkat metode penarikan sampel. Pada metode ini setiap unit di dalam populasi mempunyai peluang tertentu untuk terpilih sebagai anggota sampel. Jadi setiap anggota sampel sudah ditentukan nilai peluang untuk dapat terpilih. Beberapa metode pengambilan sampel berpeluang adalah sebagai berikut:

- i. Sampel Acak Sederhana (Simple Random Sampling). Suatu sampel dinamakan sampel acak sederhana (simple random sampling) bila setiap unit dalam populasi diberi peluang sama untuk terpilih. Metode ini merupakan metode yang cukup mudah dan biasa digunakan pada populasi yang memuat karakteristik unit (unit) bersifat relatif homogen.
 - ii. Sistematis Sampling (Systematic Sampling). Suatu metode pengambilan sampel secara acak sistematis dengan interval (jarak) tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan.
 - iii. Sampel Acak Berlapis (Stratified Random Sampling). Sampel Acak Berlapis merupakan metode pemilihan sampel dimana berdasarkan suatu informasi (data) unit-unit di dalam populasi dikelompok- kelompokkan. Proses pembentukan kelompok-kelompok ini dinamakan stratifikasi. Diusahakan nilai-nilai unit di dalam suatu kelompok cukup homogen, sedangkan antar lapisan heterogen. Kelompok-kelompok semacam ini dinamakan lapisan (strata). Kemudian dari setiap lapisan yang dibentuk, dipilih sejumlah sampel secara random.
 - iv. Sampel Acak Berkelompok (Cluster Sampling). Prosedur sampling di mana unit terkecil dalam populasi tidak teridentifikasi secara lengkap hanya kelompok-kelompok dari unit-unit tersebut yang dapat diidentifikasi secara lengkap, di mana kelompok-kelompok itu disebut cluster. Kemudian dipilih sebuah sampel yang anggotanya adalah cluster-cluster bukan lagi sebuah sampel yang anggotanya adalah unit- unit analisa terkecil. Cluster-cluster yang terpilih ke dalam sampel inilah yang selanjutnya menentukan semua unit-unit yang akan diselidiki. Sebagai contoh, untuk meneliti pendapatan rumah tangga di suatu daerah, sampling cluster dapat dilakukan. Dimisalkan daerah itu terdiri dari kabupaten, kabupaten terdiri dari kecamatan, kecamatan terdiri dari kelurahan/desa dan kelurahan/desa terdiri dari rumah tangga. Untuk mendapatkan sampel cluster mula-mula secara acak diambil sampel yang terdiri dari kabupaten. Dari tiap kabupaten dalam sampel, diambil kecamatan secara acak. Banyak kecamatan yang diambil dari tiap kabupaten sampel mungkin sama banyak mungkin pula berbeda. Sekarang didapat kecamatan sampel. Selanjutnya dari tiap kecamatan sampel diambil rumah tangga sebagai objek penelitian.
- b. Sampel tidak berpeluang (Non-probability sampling). Prosedur pengambilan sampel ini tergantung pada kebijakan dan pengalaman, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah probability. Bias dan sampling error pengambilan sampel ini tidak dapat ditentukan berdasarkan sampel yang

terpilih, sehingga kurang dapat dipertanggungjawabkan untuk analisis secara statistik. Beberapa metode pengambilan sampel tidak berpeluang adalah sebagai berikut:

- i. Convenience sampling. Pengambilan sampel yang semata-mata hanya mempertimbangkan kemudahan saja, oleh karena itu pengambilan sampel dengan cara ini tidak mewakili populasi dan hanya cocok untuk penelitian yang sifatnya eksploratif atau untuk pilot study. Misalnya untuk mempermudah penelitian, peneliti mengambil lima kelurahan yang terdekat dengan rumahnya padahal belum tentu kelurahan tersebut memenuhi kriteria objek penelitian.
 - ii. Purposive sampling. Pengambilan sampel semata-mata menurut kriteria pemikiran dan pengetahuan pengambil sampel. Sampel yang terpilih sangat dipengaruhi sekali oleh pemahaman pengambil sampel terhadap karakteristik populasi. Metode ini sering digunakan dalam survei dengan jumlah unit sampel kecil. Sebagai contoh, peneliti ingin memutuskan untuk menarik sampel satu kota yang mewakili populasi yang mencakup seluruh kota. Ketika menggunakan metode ini, peneliti harus yakin bahwa sampel yang dipilih benar-benar mewakili dari seluruh populasi.
 - iii. Quota sampling. Pengambilan sampel dimana jumlah sampel telah ditentukan terlebih dahulu. Pengambil sampel memilih sampai jumlah tersebut dan pada umumnya tanpa kerangka sampel. Pengambilan sampel semacam ini sering digunakan dalam survei pendapat masyarakat. Misalnya Survei kepuasan masyarakat Kota Malang terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - iv. Snowball sampling. Pengambilan sampel yang dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Sehingga dari beberapa sampel yang diambil dan diketahuinya, ia mengambil sampel lain dengan penjelasan dari sampel yang dikenalnya.
7. Langkah selanjutnya adalah merancang pengolahan dan analisis. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik.

3.3 Rekomendasi Statistik

Rekomendasi Statistik adalah Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik. Rekomendasi Kegiatan Statistik disediakan BPS sebagai salah satu jenis layanan di PST BPS. Layanan dapat diakses pada tautan <https://pst.bps.go.id>

3.3.1 Dasar kegiatan

Dasar kegiatan PP 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik menyebutkan bahwa setiap penyelenggara survei statistik sektoral wajib :

- memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
- mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS

3.3.2 Tujuan Rekomendasi Statistik:

- Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik
- Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien
- Menyediakan metadata rancangan kegiatan statistik yang menjadi pusat rujukan statistik di Indonesia
- Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

3.3.3 Standar Pelayanan Rekomendasi Statistik

Persyaratan :

- Pengguna memiliki alamat email yang aktif
- Pengguna adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.
- Pengisian Formulir kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jangka Waktu

- 30 hari

Biaya/Tarif

- Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Rekomendasi

3.3.4 Mekanisme Rekomendasi

- K/L/I/D mengajukan rancangan kegiatan statistik ke BPS melalui Romantik Online
- BPS melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan rancangan kegiatan statistik
- BPS memberikan rekomendasi kegiatan statistik. (Diberikan BPS ke penyelenggara survei sektoral selambatnya 30 hari setelah FS3 lengkap)
- K/L/I/D mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- K/L/I/D menyerahkan hasil (publikasi dan metadata), yang hasilnya disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain

3.4 Implementasi

1. Tahapan ini merupakan penerapan dari tahapan rancangan. Langkah pertama dari implementasi rancangan adalah dengan menyusun instrumen pengumpulan data. Salah satu instrumen pengumpul data dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang terstruktur. Dalam merancang kuesioner, perlu memperhatikan elemen-elemen dalam perancangan kuesioner. Rancangan suatu kuesioner dapat dibagi menjadi 3 elemen, yaitu menentukan jenis pertanyaan, menyeleksi jenis pertanyaan dan menuliskan pertanyaan dengan kalimat yang mudah dipahami, serta menyusun urutan pertanyaan dan format kuesioner secara keseluruhan. Apabila kegiatan statistik dilakukan dengan cara kompilasi produk administrasi, umumnya tidak memerlukan kuesioner. Pengumpulan data kompilasi produk administrasi biasanya dilakukan dengan cara berbagi pakai data disertai dengan penggunaan instrumen dummy table dan/ atau lembar kerja.
2. Pada tahapan selanjutnya, dibangun komponen proses yaitu aplikasi untuk melakukan input data dan mengolah data. Aplikasi input data yang dibangun harus memenuhi kaidah validasi yang terdapat pada instrumen pengumpulan data. Komponen diseminasi juga dibangun pada subtahapan ini. Komponen diseminasi dibangun untuk penyebarluasan hasil kegiatan statistik, sesuai rancangan pada tahap 2 (rancangan output). Komponen diseminasi yang dibangun dapat berupa buku, brosur, leaflet, booklet, banner, dan tampilan pada halaman website. Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, perlu dilakukan ujicoba terlebih dahulu. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur dimaksud. Jika ternyata dalam uji coba terdapat banyak kesalahan, maka kuesioner yang telah dibangun dapat diubah dan disempurnakan.

3.5 Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh pertanyaan (variabel) yang ada dalam kuesioner yang merupakan satu kesatuan hipotesis atau dugaan terhadap suatu indikator yang merupakan bagian dari tujuan penelitian. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui suatu kegiatan survei yang berbasis sampel yang telah ditentukan tahapan atau

prosedurnya dan disepakati sebelumnya. Dengan telah ditentukannya kerangka sampel dan metode pengambilan sampel, maka pada tahapan ini adalah melakukan koordinasi terhadap terpilih dengan kegiatan statistik/survei yang lain (contohnya untuk mengatasi adanya overlap sampel dengan kegiatan lain), atau dengan kegiatan yang menggunakan kerangka sampel yang sama. Pelatihan petugas juga diperlukan dengan tujuan untuk mempersiapkan petugas yang andal dalam melakukan pendataan sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP) dan konsep dan definisi yang telah ditetapkan. Dengan demikian didapatkan hasil atau data survei yang akurat.

2. Pengumpulan data merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Terdapat beberapa cara pengumpulan data yang bila digunakan pada satu set tertentu akan menghasilkan berbagai jenis data. Jenis pengumpulan data adalah Sensus, Survei, dan Kompilasi Produk Administrasi. Kegiatan tersebut merupakan cara pengumpulan data dalam kegiatan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik. Dari tiga kegiatan pengumpulan data, maka umumnya kegiatan kompilasi produk administrasi dilakukan secara rutin oleh kementerian/lembaga tertentu. Sementara kegiatan Sensus dan Survei dilakukan secara berkala pada periode-periode tertentu sesuai tingkat kebutuhan.

a. Survei

Metode survey dilakukan dengan mengambil sebagian kecil dari unit-unit di dalam populasi untuk diteliti. Selanjutnya dari penelitian sampel tersebut digunakan untuk menduga (estimasi) nilai karakteristik populasi yang diteliti. Akibatnya hanya sebagian unit dalam populasi yang diteliti, oleh karena itu survei lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya dibandingkan dengan sensus. Beberapa hal yang menyebabkan survei sampel dilakukan di dalam proses pengumpulan data adalah:

- Populasinya tidak terbatas atau sangat besar.
- Terbatasnya biaya, tenaga dan waktu.
- Penelitian bersifat destruktif (merusak).
- Pengaturan manajemen pengumpulan data lebih terkendali.

Salah satu kegiatan statistik yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah selaku lembaga publik adalah penilaian kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan instansi pemerintah bersangkutan. Penilaian kepuasan tersebut dapat dikemas melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merupakan salah satu kegiatan statistik untuk memperoleh gambaran persepsi masyarakat terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kegiatan SKM yang dilaksanakan secara periodic merupakan salah satu kunci dari upaya perbaikan pelayanan publik.

b. Kompilasi produk administrasi (KOMPROMIN)

Salah satu contoh pelaksanaan Kompromin adalah pada kegiatan registrasi data perhubungan udara yang menggunakan catatan administrasi/data primer yang dikumpulkan oleh Dinas Perhubungan.

Perbedaan pelaksanaan survei dengan kompilasi produk administrasi (kompromin) di dalam tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 3.5.1 Perbedaan Survei dengan Kompromin

Fase	Aktivitas	Survei	Kompromin
Rancangan	Merancang sampel kerangka	Ya, untuk survei dengan probability sampling	Tidak
		Tidak, untuk selain probability	
	Merancang metode pengambilan sampel	Ya	Tidak
	Merancang data pengumpulan	Ya, Merancang pengumpulan data dan instrument berupa kuisisioner	Ya, merancang instrumen berupa dummy table
Tidak, secara khusus Membuat rancangan metode			
Pengumpulan	Membangun sampel kerangka	Ya, untuk survei dengan probability sampling	Tidak ada
		Tidak, untuk selain probability sampling	
	Melakukan sampel pemilihan	Ya	Tidak
Proses	Menghitung penimbang Menghitung estimasi dan agregat	Ya	Tidak

3.6 Penyiapan Instrumen Penelitian dari Kegiatan Statistik

1. Dalam melaksanakan kegiatan statistik, Perangkat Daerah terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian. Menurut Purwanto (2018), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian.
2. Kuesioner (angket) merupakan salah satu instrumen penelitian yang banyak digunakan pada sektor pemerintahan. Kuesioner yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berisi pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Menurut Purwanto (2018), kuesioner merupakan instrumen penelitian yang umumnya digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang berisi pernyataan-pernyataan yang disusun sedemikian rupa tentang variabel penelitian.
3. Skala pengukuran harus dimiliki oleh setiap instrumen penelitian. Skala pengukuran akan membuat variabel yang diukur dengan menggunakan instrumen dapat dinyatakan dengan angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif. Ukuran panjang, lebar, lama usia suatu benda dapat saja diukur, sedangkan untuk mengukur suatu sikap/persepsi maka

dibutuhkan skala pengukuran yang khusus. Adapun skala pengukuran sikap/persepsi yang sering digunakan yaitu skala Likert, skala Guttman, skala Semantic Differential dan skala Rating.

4. Pada penggunaan skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Berdasarkan indikator-indikator tersebut akan dibuat suatu pertanyaan/ Pernyataan yang akan digunakan sebagai item pada instrumen. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:

- Sangat setuju/Selalu
- Setuju/Sering
- Ragu-ragu/Kadang-kadang
- Tidak setuju/Hampir tidak pernah
- Sangat tidak setuju/Tidak pernah

Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban dapat diberi skor, misalnya:

- Sangat setuju/selalu diberi skor 5
- Setuju/sering diberi skor 4
- Ragu-ragu/kadang-kadang diberi skor 3
- Tidak setuju/hampir tidak pernah diberi skor 2
- Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi skor 1

Skala Likert yang digunakan pada penyusunan instrumen penelitian dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda.

5. Pada skala Guttman terdapat dua jawaban tegas yaitu ya-salah, pernah- tidak pernah, dan sebagainya. Skala Guttman digunakan apabila pada penelitian yang dilakukan ingin memperoleh jawaban yang tegas terhadap rumusan masalah yang ditanyakan. Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban dapat diberi skor, misalnya :

- Setuju/ya/pernah diberi skor 2
- Tidak setuju/tidak/tidak pernah diberi skor 1

Skala Guttman yang digunakan pada penyusunan instrumen penelitian dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda.

6. Skala Semantic Differential digunakan untuk mengukur sikap. Bentuk pada penyusunan instrumen penelitian pada skala Semantic Differential berbeda dengan skala Likert dan skala Guttman. Pada skala ini, bentuk jawaban tidak menggunakan checklist ataupun pilihan ganda, namun disusun dalam satu garis kontinum dimana jawaban “sangat positif” terletak di sebelah kiridan jawaban “sangat negatif” terletak di sebelah kanan, atau sebaliknya. Pengukuran menggunakan skala Semantic Differential menghasilkan data interval. Contoh penggunaan skala ini adalah sebagai berikut.

Setuju / Aktif	5	4	3	2	1	Tidak Setuju / Pasif
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------------------

7. Skala Rating tidak hanya mengukur sikap, namun juga mengukur persepsi atau penilaian terhadap fenomena lainnya, sehingga pengukuran pada skala Rating menjadi lebih luwes, fleksibel, dan tidak terbatas dibandingkan skala lainnya. Pada skala ini responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah diberikan, namun menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Pada penyusunan skala Rating, yang perlu diperhatikan adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap instrumen. Contoh penggunaan skala Rating adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6.1 Contoh Pengukuran Menggunakan Skala Rating

No	Pertanyaan	Interval Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Kenyamanan ruang kerja					
2.	Pencahayaan alami					
3.	Kebersihan ruang					

8. Pengujian validitas dan reliabilitas perlu dilakukan untuk instrumen penelitian yang mengukur mengenai sikap/persepsi. Pengujian ini dilakukan sebelum kuesioner disebarkan kepada responden. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengacu pada seberapa konsisten hasil penelitian saat diulang dengan cara yang sama.

3.7 Implementasi

1. Tahapan ini merupakan penerapan dari tahapan rancangan. Langkah pertama dari implementasi rancangan adalah dengan menyusun instrumen pengumpulan data. Salah satu instrumen pengumpul data dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang terstruktur. Dalam merancang kuesioner, perlu memperhatikan elemen-elemen dalam perancangan kuesioner. Rancangan suatu kuesioner dapat dibagi menjadi 3 elemen, yaitu menentukan jenis pertanyaan, menyeleksi jenis pertanyaan dan menuliskan pertanyaan dengan kalimat yang mudah dipahami, serta menyusun urutan pertanyaan dan format kuesioner secara keseluruhan. Apabila kegiatan statistik dilakukan dengan cara kompilasi produk administrasi, umumnya tidak memerlukan kuesioner. Pengumpulan data kompilasi produk administrasi biasanya dilakukan dengan cara berbagi pakai data disertai dengan penggunaan instrumen dummy table dan/ atau lembar kerja.
2. Pada tahapan selanjutnya, dibangun komponen proses yaitu aplikasi untuk melakukan input data dan mengolah data. Aplikasi input data yang dibangun

harus memenuhi kaidah validasi yang terdapat pada instrumen pengumpulan data. Komponen diseminasi juga dibangun pada subtahap ini. Komponen diseminasi dibangun untuk penyebarluasan hasil kegiatan statistik, sesuai rancangan pada tahap 2 (rancangan output). Komponen diseminasi yang dibangun dapat berupa buku, brosur, leaflet, booklet, banner, dan tampilan pada halaman website. Sebelum kuesioner disebar kepada responden, perlu dilakukan ujicoba terlebih dahulu. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur dimaksud. Jika ternyata dalam uji coba terdapat banyak kesalahan, maka kuesioner yang telah dibangun dapat diubah dan disempurnakan.

3.8 Pengolahan dan Analisis Data

1. Penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan rahasia ilmu secara obyektif, dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan kokoh.
2. Penelitian mempunyai beberapa ciri khas. Oleh Crawford (1928) telah diberikan 9 buah kriteria penting dari penelitian. Sebenarnya ciri-ciri penelitian dari Crawford ini tidak lain dari suatu kesimpulan tentang ilmu dan pemikiran reflektif. Kesembilan kriteria penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Penelitian harus berkisar di sekeliling masalah yang ingin dipecahkan
 - b. Penelitian sedikit-dikitnya harus mengandung unsur-unsur orisinalitas
 - c. Penelitian harus didasarkan pada pandangan “ingin tahu”
 - d. Penelitian harus berdasatkrkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan (order)
 - e. Penelitian berkendak untuk menemukan generalisasi atau dalil
 - f. Penelitan merupakan studi tentang sebab-akibat
 - g. Penelitan harus menggunakan pengukuran yang akurat
 - h. Penelitan harus menggunakan Teknik yang secara sadar diketahui.
3. Pada umumnya suatu penelitian dapat diperinci dalam tujuh tahap yang satu sama lainnya saling bergantung dan berhubungan. Dengan kata lain, masing-masing tahap itu memengaruhi dan dipengaruhi oleh tahap-tahap yang lain. Kesadaran terhadap keadaan ini membuat seorang peneliti lebih bijaksana dalam mengambil setiap keputusan pada setiap tahap penelitian. Adapun tujuh tahap itu adalah :

a. Perencanaan

Perencanaan meliputi penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu penelitian dan merencanakan strategi umum untuk memperoleh dan menganalisis data bagi penelitian itu. Hal ini harus dimulai dengan memberikan perhatian khusus terhadap konsep dan hipotesis yang akan mengarahkan peneliti yang bersangkutan, dan penelaahan kembali terhadap literatur, termasuk penelitian-penelitian yang pernah diadakan sebelumnya, yang berhubungan dengan judul dan masalah penelitian yang bersangkutan. Tahap ini merupakan tahap penyusunan “Terms Of Reference (TOR)”.

b. Pengkajian secara teliti terhadap rencana penelitian.

Tahap ini merupakan pengembangan dari tahap perencanaan. Di sini disajikan lagi latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, hipotesis, serta metode atau prosedur analisis dan pengumpulan data. Tahap ini meliputi pula penentuan jenis data yang diperlukan untuk mencapai tujuan pokok penelitian. Tahap ini merupakan tahap penyusunan usulan proyek penelitian.

c. Pengambilan contoh (sampling).

Tahap ini adalah proses pemilihan sejumlah unsur/bagian tertentu dari suatu populasi guna mewakili seluruh populasi itu. Dalam tahap ini peneliti harus secara teliti membuat definisi atau rumusan mengenai populasi yang akan dikaji. Rencana pengambilan contoh ini terdiri dari prosedur pemilihan unsur- unsur populasi dan prosedur menjadikan atau mengubah data dari hasil sampel untuk memperkirakan sifat-sifat seluruh populasi. Tantangan yang dihadapi dalam penyusunan rencana pengambilan contoh ini adalah bagaimana kita dapat menjalin sedemikian rupa prosedur yang kita punya dengan keadaan setempat dan dengan sumber daya yang tersedia sementara tetap mempertahankan kebaikan atau keuntungan dari Sample Survey.

d. Penyusunan daftar pertanyaan.

Ini adalah proses penerjemahan tujuan-tujuan studi ke dalam bentuk pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang berupa informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya ini merupakan proses coba-coba (trial and error) yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah dan macam pertanyaan serta urutan dari masing-masing pertanyaan. Tidak ketinggalan pula adalah usaha bagaimana agar orang- orang yang diwawancarai (responden) dengan senang hati mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan tetap senang dalam memberikan jawaban-jawaban.

e. Kerja lapang.

Tahap ini meliputi pemilihan dan latihan para pewawancara, bimbingan dalam wawancara serta pelaksanaan wawancara. Ini dapat meliputi pula berbagai tugas yang berhubungan dengan pemilihan lokasi sampel dan juga pre-testing daftar pertanyaan. Kerja lapang ini tidak akan diperlukan bila kita menggunakan cara wawancara lewat telepon atau surat.

f. Editing dan Coding.

Coding adalah proses memindahkan jawaban yang tertera dalam daftar pertanyaan ke dalam berbagai kelompok jawaban yang dapat disusun dalam angka dan ditabulasi. Editing biasanya dikerjakan sebelum coding agar pelaksanaan coding dapat sesederhana mungkin. Editing adalah meneliti lagi daftar pertanyaan yang telah diisi apakah apa yang ditulis di situ benar atau sudah sesuai dengan yang dimaksud.

g. Analisis dan laporan.

Ini meliputi berbagai tugas yang saling berhubungan dan terpenting pula dalam suatu proses penelitian. Suatu hasil penelitian yang tidak dilaporkan atau dilaporkan tetapi dengan cara yang kurang baik tidak akan ada

gunanya. Tugas yang dikerjakan pada tahap ini ialah penyajian tabel- tabel dalam bentuk frekuensi distribusi, tabulasi silang atau dapat pula berupa daftar yang memerlukan metode statistik yang kompleks, dan kemudian interpretasi dari penemuan- penemuan itu atas dasar teori yang kita ketahui.

4. Di dalam penelitian sekurang-kurangnya dapat dibedakan adanya lima jenis variabel, meskipun di dalam suatu penelitian tidak harus dinyatakan semua. Kelima variabel itu adalah:

- a. **Variabel Bebas (Independence Variable)**

Variabel ini adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor yang menentukan atau memengaruhi adanya variabel yang lain. Tanpa variabel ini, maka variabel yang lain itu tidak akan ada. Variabel yang ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel bebas disebut variabel tak bebas (terikat).

- b. **Variabel Tak Bebas (Dependence Variable)**

Variabel ini adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang ditentukan/dipengaruhi oleh adanya variabel lain. Tanpa variabel lain, maka variabel ini tidak akan ada. Perubahan variabel ini hanya terjadi jika variabel bebasnya mengalami perubahan yang berarti bukan lagi variabel yang semula atau sebenarnya menjadi variabel yang lain. Variabel ini disebut variabel terikat karena tergantung/ditentukan/dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan kata lain variabel ini disebut tidak bebas.

- c. **Variabel Kontrol (Control Variable)**

Variabel ini adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya, yang harus dikendalikan agar tidak memengaruhi atau dapat merubah variabel bebas, yang akan berakibat terjadinya perubahan pada variabel tak bebas. Pengendalian variabel ini dimaksudkan untuk menghindari adanya sesuatu yang dapat memengaruhi atau merubah variabel bebas, yang dapat berakibat munculnya variabel lain (bukan variabel tak bebas) yang akan diungkapkan dalam suatu penelitian, karena variabel bebasnya telah berubah akibat atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dikendalikan. Dengan kata lain penelitian harus berusaha mengungkapkan adanya variabel tak bebas murni karena pengaruh variabel bebas murni, maka peneliti harus berusaha mengendalikan atau mengontrol adanya variabel lain yang dapat memengaruhinya, yang akan berakibat kedua variabel tersebut menjadi tidak murni.

- d. **Variabel Antara (Intervining Variable)**

Variabel ini adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang tidak perlu dikontrol, karena diperhitungkan pengaruhnya pada variabel bebas. Dengan demikian dalam penelitian dapat dibedakan antara pengaruh variabel bebas murni terhadap variabel tak bebas murni, dengan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas yang dipengaruhi oleh variabel ketiga yang dikendalikan. Untuk memungkinkan perhitungan itu dilakukan, variabel antara dapat berbentuk usaha memisahkan atau blok terhadap sampel. Misalnya dengan memperhitungkan pengaruh perbedaan jenis kelamin, pemisahan tingkat penghasilan, pemisahan tingkat intelegensi dan lain-lain.

e. Variabel Ekstrane (Extraneous Variable)

Variabel ini adalah sejumlah gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya yang berpengaruh pada variabel bebas, akan tetapi sulit atau tidak dapat dikontrol dan tidak dapat pula diperhitungkan pengaruhnya. Dalam bidang/ilmu social, variabel ini sangat banyak karena obyeknya yang terdiri dari manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia bersifat heterogen, sehingga gejalanya sangat bervariasi. Dengan kata lain variabel ini dapat bersumber dari kondisi sampel dan di luar sampel.

5. Kebenaran ilmu menuntut adanya bukti-bukti ilmiah, baik yang bersumber dari empiris maupun hasil pemikiran yang rasional dan obyektif. Sehubungan dengan itu perlu ditegaskan lagi bahwa data bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Data yang akan dikumpulkan harus relevan dengan hipotesis, masalah dan judul penelitian, yang untuk menetapkannya harus dijabarkan dari variabel penelitian, yang terdiri dari satu atau beberapa gejala dengan berbagai unsur atau faktor di dalamnya. Terdapat 2 jenis data yang memiliki sifat masing-masing yaitu sebagai berikut.

a. Data Kualitatif

Data ini menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu yang ada, berupa keadaan, proses, kejadian/peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Seberapa jauh penyimpangan itu sebagai data kualitatif dinyatakan dengan kata-kata.

b. Data Kuantitatif

Data ini dinyatakan dalam bentuk jumlah atau angka yang dapat dihitung secara matematik dan didalam penelitian dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus statistika. Penggunaan data kuantitatif dalam penelitian dinilai lebih obyektif, karena bersifat nyata/konkrit untuk dijadikan bukti ilmiah. Data kuantitatif terbagi menjadi 4 skala data, yaitu:

- Skala Nominal yang berbentuk diskrit
 - Skala Ordinal yang menunjukkan posisi dalam suatu urutan atau suatu seri/rangkaian tertentu
 - Skala Interval yang menunjukkan suatu urutan atau seri/rangkaian nilai/angka yang masing- masing menepati titik dengan jarak yang sama antar nilai/angka yang berdekatan.
 - Skala rasio menunjukkan bentuk presentase yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Perbedaan dengan data interval adalah bahwa data rasio mempunyai titik nol yang sesungguhnya.
6. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan yaitu: Statistik Deskriptif, dan Statistik Inferensial (meliputi metode parametrik dan non parametrik).

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi analisisnya menggunakan statistik deskriptif, sedangkan jika menggunakan sampel maka analisisnya menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, desil, persentil, rata-rata, standar deviasi dan persentase.

b. Statistik Inferensia

Statistik Inferensial (statistik induktif atau statistik probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.

Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran (kepercayaan) yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Bila peluang kesalahan 5 % maka taraf kepercayaan 95 %, bila peluang kesalahan 1 %, maka taraf kepercayaannya 99 %. Peluang kesalahan dari kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi. Misalnya dari hasil analisis korelasi ditemukan koefisien korelasi 0.54 dan untuk signifikansi 5%, artinya bahwa hubungan variabel sebesar 0.54 itu dapat berlaku pada 95 dari 100 sampel.

- Metode Parametrik
- Metode parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Parameter populasi itu meliputi: rata-rata dengan notasi μ , simpangan baku σ , dan varians σ^2 . Sedangkan statistiknya adalah meliputi: rata-rata x , simpangan baku s , dan varians s^2 .
- Contoh nilai suatu pelajaran 1.000 mahasiswa rata-ratanya 7,5. Selanjutnya dari 1.000 mahasiswa diambil 50 orang, dari sampel 50 orang ternyata rata-rata nilainya 7,5. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan antara parameter dan statistik.
- Metode Nonparametrik
- Metode Nonparametrik digunakan untuk menguji distribusi untuk menganalisis data nominal dan ordinal, dan tidak menuntut banyak asumsi yang harus dipenuhi. Tabel berikut ditunjukkan untuk penggunaan statistik parametrik dan nonparametrik untuk menganalisis data khususnya untuk pengujian hipotesis.

Tabel 3.8.1 Pedoman Umum Memilih Metode untuk Pengujian Hipotesis

Macam Data	Bentuk Hipotesis					
	Deskriptif (satu sampel)	Komparatif Dua Sampel		Komparatif Lebih dari dua sampel		Asosiatif/hubungan
		Berpasangan	Independen	Berpasangan	Independen	

Nominal	Binomial	Mc. Nemar	Fisher Exact Probability	Cochran	Chi Kuadrat k Sampel	Koefisien Kontingensi
	Chi Kuadrat 1 Sampel		Chi Kuadrat 2 Sampel			
Ordinal	Run Test	Sign Test	Median Test	Friedman Two-Way Anova	Median Extension	Korelasi Spearman Rank
			Mann Whitney U Test			
		Wilcoxon Matched Pairs	Kolmogorov-Smirnov		Kruskal Wallis One Way ANOVA	Korelasi Kendal Tau
			Waid Wolfowitz			

7. Berikut adalah beberapa metode statistik inferensia yang sering digunakan:

a. Regresi Linier Sederhana

Regresi Linier Sederhana merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara dua variabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Analisis regresi mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel.

Analisis regresi lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi, karena pada analisis itu kesulitan dalam menunjukkan slop (tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan). Dengan demikian maka melalui analisis regresi, peramalan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula.

1. Persamaan regresi linier dari Y terhadap X dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

2. Keterangan:

Y= variabel tak bebas X= variabel bebas a= intersep

b= koefisien regresi

b. Regresi Linier Berganda

Pada kehidupan sehari-hari banyak kasus yang memerlukan pengetahuan tentang hubungan tersebut, namun terkadang tidak hanya terbatas pada dua variabel saja. Sebagai contoh pada kasus konsumsi, Teori Keynes (1883-1946) menyatakan bahwa yang memengaruhi konsumsi seseorang adalah pendapatannya. Contoh lain adalah keputusan investasi dari investor asing dipengaruhi tidak hanya tingkat suku bunga, tetapi indeks harga saham, tingkat inflasi, politik dan lain-lain. Pada contoh diatas ternyata investasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja, tetapi oleh banyak variabel lainnya. Penting bagi kita untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, bagaimana pengaruhnya dan seberapa besar pengaruh setiap variabel terhadap variabel lain. Pada modul ini akan dibahas mengenai hubungan antara tiga (dua variabel bebas) atau lebih variabel yang dikenal dengan analisis regresi berganda, regresi digunakan untuk menduga hubungan statistika (hubungan yang mengandung error/kesalahan). Regresi tidak

digunakan untuk menduga hubungan matematika (hubungan yang tidak mengandung error/kesalahan). Regresi Linier Berganda ini sering digunakan untuk menganalisis hal-hal yang lebih kompleks.

3. Bentuk umum persamaan regresi untuk variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_kX_k$$

3.9 Penyebarluasan Data

1. Data yang disebarluaskan harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sebagai berikut:

- a. Memenuhi Standar Data
- b. Memiliki metadata
- c. Memenuhi kaidah Interoperabilitas Data
- d. Menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk

2. Data yang dapat disebarluaskan terbagi menjadi daftar data dan Data Prioritas.

3. Penyelenggaraan Penyebarluasan Data mengikuti tata cara sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- b. Walidata wajib memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- c. Walidata wajib memastikan Data yang disebarluaskan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- d. Penyebarluasan Data oleh Walidata dilakukan melalui Portal Malang Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Portal Data Instansi wajib terhubung dengan Portal Malang Satu Data dengan memperhatikan kaidah interoperabilitas.
- f. Integrasi antara Portal Data Instansi dan Portal Malang Satu Data dapat difasilitasi oleh Sekretariat.
- g. Pengembangan Portal Data Instansi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Sekretariat dapat memfasilitasi pengembangan Portal Data Instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terkait Portal Data Instansi dapat difasilitasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- j. Data dapat disimpan di Portal Data Instansi dengan memerhatikan keterhubungan terhadap Portal Malang Satu Data dan/ atau berada pada Portal Malang Satu Data
- k. Data yang telah disebarluaskan melalui Portal Data Instansi dimiliki oleh Walidata.

3.10 Ketersediaan Data Serta Penjaminan Transparansi Informasi Statistik Untuk Pengguna Data

1. Perangkat Daerah selaku Produsen Data memastikan ketersediaan data untuk setiap periode waktu yang telah disepakati pada saat Perencanaan Data
2. Pengisian data untuk setiap periode waktu yang telah disepakati dilakukan oleh Perangkat Daerah pada Portal Malang Satu Data
3. Pengguna data dapat mengakses data selama data tersebut tidak mencakup data yang diberikan batasan akses sesuai kesepakatan Forum Satu Data serta data pribadi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi
4. Berdasarkan SOP Pemanfaatan Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang No. SOP/BidangStatistik/1275/2022, Pemohon Data dapat memanfaatkan data statistik sektoral dengan pedoman sebagai berikut.
 - Pemohon mengunjungi Portal Malang Satu Data dan memeriksa ketersediaan data. Jika data yang dibutuhkan telah tersedia, Pemohon mengajukan permohonan unduh data
 - Jika data yang dibutuhkan tidak tersedia, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan data dikecualikan
 - Pemohon mengajukan permohonan data dikecualikan dengan mengisi Form Permohonan Informasi dan menyertakan surat permohonan
 - PPID menindaklanjuti permohonan data dan mempertimbangkan status data terbuka atau rahasia. Jika data termasuk data rahasia, maka PPID menerbitkan surat penolakan
 - Jika data termasuk data terbuka, PPID menyampaikan informasi kepada PPID Pembantu untuk memberikan data dikecualikan yang dimohon
 - Pemohon menerima data dikecualikan yang dibutuhkan

3.11 Sumber Data Dan Metodologi

1. Proses pengumpulan data dapat menghasilkan data yang berkualitas jika dilakukan perencanaan dalam menetapkan teknik penelitian yang digunakan. Jenis penelitian berdasarkan teknik penelitian dibagi menjadi dua, yaitu (1) Penelitian Sensus, Survei, atau Administrasi dan (2) Penelitian Percobaan (Experiment Research).
2. Teknik penelitian yang sering digunakan pada sektor pemerintahan yaitu Penelitian Sensus, Survei, atau Administrasi dimana data pada jenis penelitian ini biasanya sudah ada di lapangan dan dikumpulkan melalui metode sensus, survey sampel (sampling) maupun catatan administrasi.
3. Jenis Data secara umum diklasifikasikan menjadi empat macam antara lain:
 - a. Jenis Data Menurut Sifat
 - Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka. Misalnya adalah jumlah pembeli daging saat hari raya Idul Adha, data produksi padi tiap bulan, harga daging sapi per kilogram rata-rata adalah Rp.65.000 dan lain-lain.

- **Data Kualitatif**
Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, penyaluran pupuk berjalan lancar dan sebagainya.

b. Jenis Data Menurut Sumber

- **Data Internal**
Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal : data keuangan, data pegawai, data produksi, data penjualan dan sebagainya.
- **Data Eksternal**
Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya.

c. Jenis Data Menurut Cara Memperoleh

- **Data Primer**
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Misalnya, suatu perusahaan ingin mengetahui konsumsi rata-rata susu penduduk di suatu daerah dengan cara melakukan wawancara langsung kepada penduduk setempat.
- **Data Sekunder**
Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian atau diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain. Misalnya adalah peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah dan dalam bentuk publikasi data.

d. Jenis Data Menurut Waktu Pengumpulan

- **Data Cross-Section**
Data Cross-Section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut. Misalnya, hasil sensus penduduk tahun 2010 menggambarkan keadaan Indonesia pada tahun 2010 menurut umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan dan lain-lain.
- **Data Time Series/Berkala**
Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Misalnya data perkembangan nilai tukar dollar amerika terhadap euro eropa dari tahun 2004 sampai 2006, perkembangan produksi padi selama lima tahun terakhir, perkembangan penjualan produk suatu perusahaan selama lima tahun terakhir, dan sebagainya.

4. Cara pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu cara pengumpulan data dengan sensus dan survey. Sensus adalah cara pengumpulan data dimana semua unit (elemen) yang menjadi objek penelitian harus diteliti seluruhnya,

sedangkan survey adalah cara pengumpulan data dengan mengambil sebagian kecil dari unit-unit populasi untuk diteliti. Sebagian kecil dari unit-unit populasi inilah yang disebut sebagai sampel.

Tabel 3.11.1 Perbandingan Survei Sampel dan Sensus

Segi	Survei Sampel	Sensus
Tenaga	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah relatif sedikit Dapat dipilih yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sangat besar Lebih sulit untuk memilih yang berkualitas seluruhnya
Waktu	<ul style="list-style-type: none"> Lebih cepat 	<ul style="list-style-type: none"> Lebih lama
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> Lebih murah 	<ul style="list-style-type: none"> Lebih mahal
Pertanyaan dan kualitas data	<ul style="list-style-type: none"> Biasanya kualitas data lebih baik Pertanyaan yang lebih sulit bisa dipergunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas data kurang baik, hal ini akibat dari kualitas tenaga pengumpul Pertanyaan sederhana
Penyajian data	<ul style="list-style-type: none"> Data tidak bisa disajikan sampai ke tingkat yang paling rendah 	<ul style="list-style-type: none"> Data bisa disajikan sampai ke tingkat yang paling rendah, karena semua unit dalam populasi dikumpulkan
Kesalahan (<i>Error</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kesalahan sampel Adanya kesalahan bukan dari sampel, namun relatif kecil 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kesalahan sampel Adanya kesalahan bukan dari sampel yang besar

3.12 Akurasi dan Penjaminan Kualitas Data

1. Data/informasi dari suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berasal dari sumber data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Sumber data tercantum dalam setiap jenis publikasi dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
3. Kesimpulan dari data/informasi hasil kegiatan statistik yang memerlukan pengolahan dan analisis lebih lanjut dihasilkan dari suatu proses pengolahan dan analisis yang tepat dan jelas
4. Dalam perolehan data yang akurat, Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.
5. Berdasarkan SOP Pengelolaan Data Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang No. 1257/SOP/Kominfo-PE/9/2021, Walidata sebelum mempublikasikan data statistik sektoral terlebih dahulu melakukan pengelolaan data dengan pedoman sebagai berikut.
 - Perangkat Daerah selaku Produsen Data menginput data periodik secara online melalui aplikasi
 - Walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang terinput untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia
 - Perangkat Daerah dapat melakukan perbaikan jika diperlukan
 - Walidata mengolah data yang telah selesai dilakukan proses verifikasi dan validasi
 - Walidata mempersiapkan publikasi hasil pengolahan data

3.13 Penjaminan Konfidensialitas Data

1. Dalam memberikan dan menggunakan data/informasi, Perangkat Daerah menjaga hal-hal yang bersifat konfidensial untuk tidak dipublikasikan terutama mengenai data yang bersifat pribadi
2. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
3. Data pribadi terbagi menjadi data pribadi yang bersifat spesifik dan umum.
 - a. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:
 - data dan informasi kesehatan
 - data biometrik
 - data genetika
 - catatan kejahatan
 - data anak
 - data keuangan pribadi
 - data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Data pribadi yang bersifat umum meliputi:
 - data dan informasi kesehatan
 - data biometrik
 - data genetika
 - catatan kejahatan
 - data anak
 - data keuangan pribadi
 - data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Portal Malang Satu Data dan Portal Data Instansi menjamin keamanan data melalui pemberian hak akses sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan
5. Pengelola Portal Malang Satu Data dan Portal Data Instansi melakukan backup data secara berkala guna mencegah adanya kehilangan data akibat gangguan pada server, serangan hacker, dan lain sebagainya

BAB IV

QUALITY GATES

Quality Gates merupakan titik pengambilan keputusan (checkpoint) dalam penyelenggaraan statistik untuk menentukan kelayakan suatu proses berlanjut ke tahapan berikutnya, dengan memeriksa kualitas proses tersebut. Pada sebuah gate dilakukan pengukuran dari penyelenggaraan statistik yang berjalan dengan batas toleransi yang telah ditetapkan. Setidaknya ada dua kemungkinan kondisi, yaitu:

1. berada dalam batas toleransi, maka pengambil keputusan dapat menyetujui dan proses dapat dilanjutkan seperti biasa; atau
2. berada di luar batas toleransi, maka perlu melakukan aksi yang telah disepakati sebelumnya.

4.1 Dimensi Kualitas Output Statistik

Beberapa gate mungkin berisi tiga atau lebih kondisi, sehingga membutuhkan aksi yang berbeda. Dengan adanya quality gates maka output yang dihasilkan dari kegiatan statistik sektoral akan sesuai dengan dimensi output statistik. Dimensi kualitas *output* statistik tersebut antara lain:

4.1.1 Relevansi

Relevansi mencerminkan sejauh mana suatu output statistik (data dan statistik yang dihasilkan) dapat memenuhi kebutuhan pengguna baik dari aspek cakupan maupun konten (isi). Relevansi terkait erat dengan tahapan identifikasi kebutuhan (specify needs). Pemenuhan kebutuhan pengguna sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya sehingga perlu melakukan prioritas kebutuhan pengguna.

Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan relevansi output statistik, diantaranya:

- a. memastikan seluruh pengguna/stakeholder utama sudah teridentifikasi dengan baik, baik pengguna internal maupun eksternal;
- b. memastikan seluruh kebutuhan pengguna utama telah teridentifikasi dengan benar dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya; dan
- c. melakukan konfirmasi kepada pengguna utama mengenai perbedaan (gap) yang terjadi karena ketidaksesuaian antara output statistik yang dihasilkan dengan kebutuhan pengguna yang telah dirancang sebelumnya.

4.1.2 Akurasi

Akurasi merujuk pada kemampuan data/informasi dalam menjelaskan fenomena secara tepat, yaitu seberapa dekat nilai estimasi dari suatu survei terhadap nilai sebenarnya (true value) yang tidak pernah diketahui. Jika nilainya semakin dekat, maka statistik yang dihasilkan akan semakin akurat. Produsen data harus merancang, memproduksi, dan mendiseminasikan output statistic yang mampu menggambarkan fakta/realitas secara akurat. Tingkat akurasi

dapat dilihat melalui ukuran-ukuran statistik, seperti sampling error atau non-sampling error.

Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi output statistik, diantaranya:

- a. melakukan pengawasan pada tahapan pengumpulan dan pengolahan untuk memastikan SOP (Standard Operating Procedure) sudah dilaksanakan;
- b. melakukan pemeriksaan data secara sistematis;
- c. jika menggunakan sampel, maka perlu memastikan bahwa penarikan sampel sesuai kaidah dan sampling error terukur; dan
- d. mengidentifikasi seluruh potensi non-sampling error dan Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kesalahan tersebut, misalnya pada kegiatan survey yang menggunakan kerangka sampel (frame), perlu memastikan bahwa frame yang digunakan sudah up-to-date untuk meminimalisir terjadinya kesalahan cakupan akibat kerangka sampel yang usang.

4.1.3 Aktualitas dan Ketepatan Waktu

Aktualitas mengacu pada perbedaan antara waktu suatu data/informasi statistik dihasilkan dengan waktu data/informasi tersebut didiseminasikan atau dirilis. Semakin pendek jangka waktu tersebut, maka data/informasi tersebut semakin aktual. Tepat waktu menunjukkan kesesuaian suatu data/informasi dirilis dengan jadwal yang telah ditetapkan dan diinformasikan ke pengguna (Advanced Release Calendar, ARC).

Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktualitas dan tepat waktu output statistik, diantaranya:

- a. memastikan penyedia data/informasi mentaati kesepakatan/perjanjian mengenai kapan data/informasi tersedia; dan
- b. memastikan output yang dihasilkan sesuai dengan kriteria aktualitas dan tepat waktu yang disyaratkan pengguna utama.

4.1.4 Koherensi dan Keterbandingan

Koherensi merujuk pada data/informasi statistik yang berasal dari sumber dan metode yang berbeda tetapi menggambarkan fenomena yang selaras. Keterbandingan memiliki makna bahwa data statistik yang diagregasi berdasarkan konsep, klasifikasi, alat ukur, proses pengukuran, dan data dasar yang sama dapat dibandingkan dengan data statistik lain yang berbeda waktu dan wilayah. Keterbandingan digunakan untuk memeriksa suatu data dapat dibandingkan dengan data negara atau wilayah lain, atau dibandingkan antartahun. Dimensi koherensi dan keterbandingan memiliki keterkaitan dengan dimensi akurasi. Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan koherensi dan keterbandingan output statistik, diantaranya:

- a. memastikan penggunaan konsep / definisi dan klasifikasi yang digunakan mengikuti standar nasional atau internasional; dan
- b. memastikan output statistik dibandingkan dengan informasi lainnya.

4.1.5 Aksesibilitas

Aksesibilitas menunjukkan seberapa mudah pengguna dapat mengakses data/informasi statistik beserta metadatanya melalui media akses yang disediakan. Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas output statistik, diantaranya:

- a. memastikan publikasi cetak atau elektronik dapat diakses melalui berbagai media sesuai dengan kebutuhan pengguna utama;
- b. memastikan data dan metadata tersedia sesuai kesepakatan dengan pengguna utama; dan
- c. memastikan ketersediaan katalog publikasi untuk membantu pengguna dalam mengakses output yang dihasilkan produsen data.

4.1.6 Interpretabilitas

Interpretabilitas mengacu pada kemudahan pengguna untuk memahami data/ informasi statistik yang dihasilkan. Artinya, data/ informasi tersebut disajikan dalam format yang jelas serta mudah dipahami. Format yang jelas pada setiap publikasi juga harus disertai dengan informasi tambahan berupa metadata.

Beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan interpretabilitas output statistik, diantaranya:

- d. memastikan data dan metadata disajikan dengan jelas dan mudah dipahami pengguna;
- e. menyediakan ringkasan mengenai hasil atau temuan penting agar memudahkan pengguna dalam memahami output statistik; dan
- f. memastikan adanya layanan bagi pengguna untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai data/informasi statistik sehingga dapat membantu pengguna lebih memahami output statistik dengan tepat dan jelas.

4.2 Implementasi Quality Gates

4.2.1 Penempatan Quality Gates

Satuan kerja penyelenggara kegiatan statistik sektoral melakukan identifikasi dan analisis risiko pada setiap tahapan proses bisnis statistik yang terdiri dari *specify needs* (identifikasi kebutuhan), *design* (perancangan), *build* (implementasi rancangan), *collect* (pengumpulan data), *process* (pengolahan), *analyse* (analisis), *disseminate* (diseminasi), dan *evaluate* (evaluasi) untuk mengetahui letak penempatan *Quality Gates*. Contoh hubungan antara dimensi kualitas dan tahapan kegiatan ditunjukkan seperti pada tabel analisis risiko berikut:

Tabel 4.2.1 Tabel Analisis Risiko

No	Tahapan*	Dimensi Kualitas	Risiko	Dampak	Peluang Terjadi	Skala Dampak	Tingkat Risiko
1	Identifikasi kebutuhan	Relevansi					
2	Perancangan	Relevansi					

No	Tahapan*	Dimensi Kualitas	Risiko	Dampak	Peluang Terjadi	Skala Dampak	Tingkat Risiko
3	Implementasi Rancangan	Aktualitas dan Tepat Waktu	Instrumen pendataan tidak tersedia tepat waktu	Keterlambatan dalam pelaksanaan pendataan lapangan	3	2	10
4	Implementasi Rancangan	Akurasi					
5	Pengumpulan Data	Akurasi	Response rate hasil pendataan tidak memenuhi target	Target sampel tidak tercapai dan hasil survey menjadi tidak optimal	4	4	19
6	Pengumpulan Data	Relevansi					
7	Pengolahan	Koherensi dan keterbandingan					
8	Analisis	Koherensi dan keterbandingan					
9	Diseminasi	Aktualitas dan tepat waktu					
10	Diseminasi	Interpretabilitas					

Keterangan *) hubungan antara dimensi kualitas dan tahapan kegiatan dapat berbeda antar kegiatan statistik

Tabel 4.2.2 Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Tabel 4.2.3 Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna	Aksi yang diambil
Sangat Rendah	1-5	Biru	Tidak diperlukan tindakan
Rendah	6-10	Hijau	Diperlukan tindakan jika diperlukan

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna	Aksi yang diambil
Sedang	11-14	Kuning	Diperlukan tindakan jika sumber daya tersedia
Tinggi	15-19	Orange	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sangat Tinggi	20-25	Merah	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko

Pemilihan *gate* dilakukan pada tahapan yang memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi. Pada risiko dengan level sedang, pengendaliannya dilakukan dengan tidak membuat *gate* sendiri melainkan dapat digabungkan dengan *gate* terdekat yang terbentuk dari risiko level tinggi atau yang sangat tinggi di belakangnya

4.2.2 Penentuan ukuran kualitas, toleransi, peran dan aksi QG

Contoh penentuan Penentuan ukuran kualitas, toleransi, peran dan aksi QG: Misalkan diletakkan *gate* ke-2 pada tahap pengumpulan data

1. Ukuran kualitas 2: Penyelesaian pendataan

Ukuran kualitas ini terkait dengan *response rate* hasil pendataan tidak memenuhi target yang berdampak pada hasil survey yang tidak optimal.

Toleransi:

- Lampu hijau: pendataan memenuhi target 100%
- Lampu kuning: pendataan tidak memenuhi target, antara 90% sampai dengan <100%
- Lampu merah: pendataan tidak memenuhi target, kurang dari 90%

Peran:

- Pengelola *gate*: penanggung jawab kegiatan survei
- Pengambil Keputusan: Kepala bidang
- Pemangku kepentingan: penanggung jawab kegiatan survey

Tabel 4.2.4 Aksi Preventif Dan Korektif

Preventif		Korektif	
Aksi	Pelaksana	Aksi	Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan surat dukungan dari Gubernur/Walikota/Bupati/Dinas terkait Menyediakan atribut pencacahan, surat tugas, dan tanda bukti petugas Mengidentifikasi awal terkait wilayah sampel/responden yang berpotensi <i>nonresponse</i> dan sulit untuk ditemui Melakukan monitoring dan pengawasan secara berkala terkait progress lapangan 	Penanggung jawab kegiatan survei	<p>Kuning:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat kesepakatan waktu yang sesuai untuk bertemu dengan responden yang <i>nonresponse</i> Melakukan uji petik agar mengetahui penyebab terjadinya responden yang <i>nonresponse</i> 	Penanggung jawab kegiatan survei

Preventif		Korektif	
Aksi	Pelaksana	Aksi	Pelaksana
		Merah: 1. Membentuk tim khusus melakukan kunjungan terhadap responden yang tidak merespon	Penanggung jawab kegiatan survei

Setelah kelima komponen QG tersusun seperti pada poin A dan B, selanjutnya pelaksana aksi pada masing-masing ukuran kualitas menjalankan seluruh daftar aksi preventif agar ukuran kualitas dapat memenuhi target. Ketika memasuki periode penilaian gate, maka pengelola gate akan melakukan penilaian ukuran kualitas, jika ukuran kualitas masuk kategori merah/kuning maka pelaksana perlu menjalankan aksi korektif yang telah dirancang. Untuk selanjutnya keputusan lanjut atau tidaknya gate atau tahapan kegiatan statistik berikutnya ditentukan oleh *sign off person*

4.2.3 Evaluasi QG

Evaluasi dilakukan di akhir siklus proses statistik. Evaluasi dilakukan untuk melihat gates mana yang bekerja dengan baik, mana yang tidak, dan mana yang perlu ditingkatkan. Pada tahapan ini dilakukan juga penyusunan rencana tindak lanjut untuk perbaikan manajemen risiko ke depan. Hasil evaluasi, rencana perbaikan, dan dokumentasi disimpan bersama metadata kegiatan dalam repositori masing-masing pihak yang terlibat dalam implementasi QG. Seluruh implementasi QG harus tertuang (*embedded*) di dalam SOP penyelenggaraan statistik.

4.2.4 Dokumen hasil penerapan QG

Dokumen hasil penerapan QG memuat hal-hal berikut:

1. Lembar Kerja *Risk Assesment*

Lembar kerja ini bisa digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan penempatan QG

No	Tahapan*	Dimensi Kualitas	Risiko	Dampak	Peluang Terjadi	Skala Dampak	Tingkat Risiko
1	Identifikasi kebutuhan						
2	Perancangan						
3	Implementasi Rancangan						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan						
6	Analisis						
7	Diseminasi						

8	Evaluasi						
---	----------	--	--	--	--	--	--

Tabel 4.2.5 Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5x5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Tabel 4.2.6 Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna	Aksi yang diambil
Sangat Rendah	1-5	Biru	Tidak diperlukan tindakan
Rendah	6-10	Hijau	Diperlukan tindakan jika diperlukan
Sedang	11-14	Kuning	Diperlukan tindakan jika sumber daya
Tinggi	15-19	Orange	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sangat Tinggi	20-25	Merah	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko

2. Dokumen QG

Nama <i>Gate</i>			
Ukuran Kualitas			
Deskripsi			
Penempatan			
Toleransi	1. Hijau		
	2. Kuning		
	3. Merah		
Aksi			
Aksi Preventif	Pelaksana	Aksi Korektif	Pelaksana
		Kuning: -	
		Merah: -	

3. Hasil implementasi QG

<i>Gate:</i>				
No	Ukuran Kualitas	Kriteria Penilaian	Penilaian Ukuran Kualitas	Penjelasan
			<ul style="list-style-type: none"> ● Merah ● Kuning ● Hijau 	
			<ul style="list-style-type: none"> ● Merah ● Hijau 	

BAB V

KELEMBAGAAN

5.1 Aspek Profesionalitas

Profesional artinya adanya keahlian khusus dalam menjalankan profesi. Dalam hal kelembagaan statistik, setiap institusi harus dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan berdasarkan pada keahlian dan keilmuan statistik. Penyelenggara statistik sektoral yang professional harus mempunyai sikap kompeten, efektif, inovatif dan sistemik.

- a) Kompeten adalah mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
- b) Efektif adalah memberikan hasil maksimal.
- c) Efisien adalah mengerjakan tugas secara produktif, dengan sumber daya.
- d) Inovatif adalah selalu melakukan pembaruan dan/atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus.
- e) Sistemik adalah meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

5.1.1 Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik

Setiap produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan transparansi informasi statistik bagi pengguna data, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain. Penjaminan transparansi informasi statistik meliputi:

1. Terdapat prosedur untuk memastikan kerahasiaan data.
2. Semua informasi yang berkaitan dengan sumber data, konsep, metode, dan standar statistik yang digunakan tersedia dan terbuka untuk publik.
3. Jika terjadi perubahan konsep, definisi, klasifikasi, dan metodologi maka tersedia informasi kepada pengguna mengenai perubahan tersebut.
4. Kebijakan diseminasi diinformasikan kepada publik.
5. Program kerja pada K/L/D/I serta laporan berkala yang digunakan dalam menjelaskan progress kegiatan statistik sektoral tersedia untuk publik.

Secara berkala, proses penjaminan ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas penjaminan transparansi informasi statistik.

Contoh " Telah Melakukan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data", diantaranya:

1. Laporan/dokumen formal yang menunjukkan adanya kegiatan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data
2. Notulen rapat reviu dan evaluasi terhadap proses Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data yang dilakukan secara berkala
3. Perbaikan tata kelola proses Penjaminan Transparansi Informasi Statistik bagi Pengguna Data berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang dilakukan pada level 4

5.1.2 Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi

Penjaminan Netralitas dan Obyektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data dan Metodologi bertujuan menjamin data/informasi yang dihasilkan objektif sesuai dengan keilmuan statistik, dengan rujukan atau standar nasional dan internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi, meliputi:

1. Output statistik yang dihasilkan diakui (dan tidak diperdebatkan) oleh pengamat netral dan juga masyarakat/pengguna data
2. Sumber, konsep definisi, metodologi, dan proses untuk menghasilkan dan diseminasi data/informasi statistik merujuk pada standar nasional atau internasional, serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
3. Rilis data statistik dan penjelasan yang diberikan kepada publik dan media bersifat objektif dan didukung oleh fenomena dan data pendukung yang relevan
4. Terdapat regulasi yang mengatur tentang penggunaan logo, desain, atau format dalam produk statistik, yang menjadi identitas K/L/D/I yang tidak berafiliasi dengan badan politik manapun
5. Adanya kebijakan untuk menanggapi pemberitaan di media yang bersifat negatif agar informasinya lebih berimbang

Produsen data harus melaksanakan upaya penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data dan metodologi statistik, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan unit kerja lain. Penjaminan netralitas dan obyektivitas merujuk pada data/informasi statistik yang dihasilkan dan didiseminasikan merupakan output statistik yang independent, netral, dan tidak bias.

5.1.3 Penjaminan Kualitas Data

Penjaminan Kuallitas dilakukan dalam rangka memberikan jaminan kualitas data dan informasi yang diberikan kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Upaya ini dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk statistik.

Secara detail, upaya penjaminan kualitas data mencakup:

1. Tersedia kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk umum.
2. Tersedianya pedoman penjaminan kualitas data yang tersedia untuk pengguna. Contoh informasi yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah ukuran dan metode pengukuran kualitas data.
3. Dilakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas data.
4. Tersedia unit/fungsi/tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan penjaminan kualitas data.

Upaya penjaminan kualitas data ini dapat dilakukan produsen data bersama dengan unit kerja lain yang ditugaskan khusus untuk melakukan penjaminan kualitas data. Secara berkala, proses penjaminan kualitas data ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Kemudian dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut guna peningkatan kualitas.

5.1.4 Penjaminan Konfidensialitas Data

Penjaminan Konfidensialitas Data dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Upaya penjaminan konfidensialitas data, antara lain:

1. Tersedianya regulasi K/L/D/I yang mengatur tentang konfidensialitas data
2. Tersedianya pedoman ttg perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis untuk semua produsen data
3. Tersedianya kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data
4. Tersedianya hasil audit terhadap sistem keamanan data dilakukan secara rutin
5. Tersedianya dokumen pelaksanaan manajemen risiko terkait konfidensialitas data

- Setiap instansi penyelenggara statistik harus menjamin terjaga dan terlindunginya privasi dari sumber/penyedia data.
- Data dan sumber data harus dijaga kerahasiaannya, tidak boleh diakses oleh pengguna yang tidak berhak dan hanya digunakan untuk keperluan statistik.
- Suatu statistik dianggap tidak memenuhi prinsip keamanan dan kerahasiaan ketika suatu unit statistik dapat diidentifikasi (baik secara langsung atau

5.2 Aspek Sumber Daya Manusia yang Memadai dan Kapabel

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dasar Pembangunan nasional, oleh karena itu kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dandiarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Berbicara mengenai sumber daya manusia sebenarnya dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kuantitas mencakup jumlah SDM yang tersedia, sedangkan aspek kualitas mencakup kemampuan SDM baik fisik maupun non fisik/kecerdasan dan mental dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dalam proses pembangunan, pengembangan SDM sangat diperlukan, sebab kuantitas SDM yang besar tanpa didukung kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa.

5.2.1 Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik

SDM di bidang statistik merupakan SDM yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan pengembangan, produksi, dan

diseminasi statistik. Beberapa upaya untuk pemenuhan kompetensi SDM bidang statistik mencakup:

1. Penyediaan Jabatan Fungsional Statistisi

Upaya yang paling ideal untuk memenuhi SDM tersebut dengan cara penyusunan ABK (Analisis Beban Kerja) Fungsional Statistisi. ABK ini harus didorong kepada setiap pihak yang berhubungan dengan penentuan kebijakan SDM Aparatur Pemerintah di daerah. Harapannya, jika keterjaminan penyediaan Jabatan Fungsional Statistisi telah dikuatkan secara hukum, maka pengadaan, pengembangan dan evaluasi SDM penyelenggara SDI dapat lebih mudah dilakukan.

2. Penyediaan SDM Lulusan Jurusan Statistika

Langkah lainnya yaitu dengan pengadaan pegawai baru dari lulusan perguruan tinggi jurusan statistika. Dengan pengadaan SDM lulusan bidang statistika maka kompetensi SDM pada suatu satker dapat ditingkatkan. Implementasi keahlian bidang statistika dapat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan statistik terutama pada bidang perencanaan. Pegawai baru tersebut juga dapat diangkat dalam jabatan fungsional statistisi untuk menjamin kesesuaian tupoksinya dengan pendidikan yang ditamatkan.

3. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Statistika

Pemenuhan kompetensi bidang statistika dapat juga dilakukan dengan Pendidikan dan pelatihan. Pegawai yang diikutkan pada pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya idealnya diberikan surat keterangan, sertifikat atau tanda bukti lain keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

Bentuk kegiatan pengembangan dan peningkatan kemampuan statistika sangat beragam. Kegiatan ini dapat dilakukan atas inisiatif BPS maupun nonBPS. Beberapa bentuk kegiatan untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang statistik, antara lain diklat/bimtek, seminar/webinar, asistensi, FGD, Rapat Koordinasi, workshop, coaching clinic, konsultasi, audiensi, konsolidasi, knowledge sharing, maupun pameran.

5.2.2 Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data

Kompetensi SDM bidang manajemen data yang harus dimiliki adalah kemampuan SDM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Komponen yang ada dalam pengelolaan data mencakup:

1. Arsitektur data
2. Pemodelan data
3. Administrasi database
4. Integrasi dan interoperabilitas data
5. Analisis data dan kecerdasan bisnis
6. Manajemen kualitas data
7. Keamanan data
8. Tata kelola data dan manajemen data

Secara berkala, pemenuhan kompetensi SDM Bidang Manajemen Data perlu dilakukan peningkatan, penilaian, reviu, dan evaluasi. Selanjutnya, suatu instansi perlu melakukan pemutakhiran/peningkatan kualitas kompetensi SDM Bidang Manajemen Data berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan. Perencanaan dan pengembangan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik harus dilakukan secara komprehensif serta dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala.

5.3 Aspek Pengorganisasian Statistik

Pada dokumen Rencana Aksi Strategis 2022-2024 yang dipublikasikan oleh Sekretariat SDI pusat menjelaskan terkait Milestone Satu Data Indonesia 2022- 2024, periode ini difokuskan pada pembangunan dan penguatan fondasi melalui perkuatan kebijakan dan ekosistem Satu Data Indonesia. Formulasi strategi imperatif yang harus ditempuh pada periode ini diantaranya kebijakan data yang harmonis dan konsisten, penyediaan dan penerapan pedoman pada seluruh proses bisnis, serta ekosistem kolaborasi yang matang termasuk infrastruktur dan talenta.

5.3.1 Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, diperlukan koordinasi dan kolaborasi bersama antar unit kerja/perangkat daerah di suatu instansi pusat/pemerintah daerah. Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik ini harus dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK tim kerja, dokumen rancangan kerja, laporan kegiatan, dan lain-lain. Kolaborasi kegiatan statistik dapat dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik guna menghindari pekerjaan yang silo yang dapat mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan. Beberapa contoh kolaborasi kegiatan statistik diantaranya:

1. kolaborasi dalam penyusunan rencana kegiatan statistik agar tidak tumpang tindih antar unit kerja baik dari sisi waktu maupun sumber daya
2. kolaborasi penyusunan instrumen kegiatan statistik
3. kolaborasi antara produsen data dengan walidata dalam satu instansi

Secara berkala, proses kolaborasi antar unit kerja ini perlu dilakukan reviu dan evaluasi, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas proses kolaborasi penyelenggaraan kegiatan statistik.

5.3.2 Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus membentuk 1 (satu) unit yang berperan sebagai walidata, yaitu suatu unit yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data. Di tingkat daerah, kepala daerah dapat membentuk walidata pendukung yang berkedudukan di dalam instansi daerah untuk membantu pelaksanaan tugas walidata di tingkat daerah.

Pembina data dan walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI). Beberapa hal yang dibahas dalam Forum SDI diantaranya mengenai:

1. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
2. daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
3. rencana aksi Satu Data Indonesia;
4. Kode referensi dan data induk;
5. Instansi Pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas Walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
6. calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan instansi pusat;
7. pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat; dan
8. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia. Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:

1. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
3. kegiatan terkait pengumpulan Data;
4. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
5. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
6. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, dan kemudian disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat tersebut. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024 diatur melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022. Rencana Aksi SDI 2022-2024 memuat program yang terdiri atas:

1. Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia;
2. perluasan kolaborasi dan penguatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia;
3. pengembangan infrastruktur dan platform data, serta Fasilitas Analitika Data;
4. penguatan sumber daya manusia penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan partisipasi publik;
5. stimulasi dan dorongan percepatan Satu Data Indonesia; dan
6. pemanfaatan data dalam mendukung agenda pembangunan nasional

Hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Forum SDI, harus ditindaklanjuti oleh seluruh walidata/walidata pendukung di instansinya masing-masing.

Disamping itu, secara berkala perlu dilakukan reviu dan evaluasi terhadap keterlibatan walidata dalam Forum SDI.

5.3.3 Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik

Kolaborasi bersama dalam pembangunan/pengembangan data juga perlu dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan pembina data statistik. Kolaborasi ini diantaranya bertujuan untuk:

1. menghindari duplikasi/tumpang tindih data
2. memperoleh hasil/data statistik yang secara kaidah statistik dapat dipertanggungjawabkan
3. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi data
4. mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Kolaborasi pembangunan/pengembangan data antara instansi pemerintah dan pembina data statistik harus dilakukan secara formal dan tersedia dokumen resmi seperti SK Tim, berita acara rapat, perjanjian kerja sama, laporan kegiatan, dan lain-lain.

Secara berkala, kegiatan kolaborasi dengan pembina data statistik ini harus dilakukan reviu dan evaluasi. Selanjutnya, perlu dilakukan pemutakhiran berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

5.3.4 Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata

Walidata adalah suatu unit pada instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data. Setiap instansi pemerintah memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas walidata di instansi tersebut. Tugas Walidata di instansi pemerintah pusat mencakup:

1. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
3. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Sementara itu, tugas Walidata di pemerintah daerah mencakup:

1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
3. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Penetapan walidata dan ketentuan lebih lanjut mengenai walidata di instansi pemerintah pusat diatur dalam Peraturan Menteri/Lembaga/Badan. Sedangkan

penetapan dan ketentuan mengenai walidata di instansi pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Implementasi pelaksanaan tugas walidata ini harus dilakukan revidu dan evaluasi secara berkala. Kemudian, dilakukan pemutakhiran guna peningkatan kualitas pelaksanaan tugas walidata.

BAB VI

SISTEM STATISTIK NASIONAL

6.1 Umum

Data/Statistik yang dihasilkan harus akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar instansi pusat dan daerah. Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

BPS melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN), dan mendukung pembangunan nasional. BPS senantiasa melakukan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi (KISS) seluruh penyelenggara kegiatan statistik dalam mewujudkan SSN

6.2 Tujuan

1. Agar penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
2. Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik, dan
3. Terciptanya sistem yang andal, efektif, dan efisien

6.3 Pengertian Sistem Statistik Nasional

Suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

6.4 Kegiatan Statistik

1. Sensus
cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
2. Survei
cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
3. Kompromin (kompilasi produk administrasi)
cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
4. Cara lain sesuai perkembangan teknologi

Adanya perkembangan teknologi, seperti adanya internet dan media sosial, dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Salah satu contohnya, data diperoleh melalui hasil registrasi akun media sosial, web crawling, dan big data mining. Big data merupakan cara pengumpulan data dari sekumpulan.

6.5 Jenis-jenis Statistik

a) Statistik Dasar

Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

b) Statistik Sektoral

Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

c) Statistik Khusus

Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

6.6 Indikator kematangan perwujudan SSN

6.6.1 Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Sebagai institusi pemerintahan yang memegang peran sebagai penyedia data statistik dasar, BPS telah banyak menyediakan berbagai data yang bersifat lintas sektoral dan diperuntukkan untuk pemerintah maupun masyarakat luas. Di kalangan pemerintahan, data-data statistik dasar harus dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan oleh seluruh instansi pemerintahan. Setiap instansi pemerintah harus mengetahui data-data apa saja yang selama ini telah dihasilkan oleh BPS, agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir duplikasi kegiatan statistik, dimana setiap instansi tidak harus membuat kegiatan statistik (sensus/survei/kompilasi produk administrasi) sendiri.

Setiap instansi pemerintah harus mengetahui data-data apa saja yang selama ini telah dihasilkan oleh BPS dan memanfaatkannya untuk pembangunan baik perencanaan maupun evaluasinya

Lebih lanjut, instansi pemerintah perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala dalam penggunaan data-data statistik dasar, serta berkoordinasi/berkonsultasi terhadap data-data statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS. Bentuk koordinasi ini diantaranya dapat berupa konsultasi ketersediaan data statistik dasar, penyampaian kebutuhan data instansi, kemungkinan integrasi kegiatan statistik, dan lain-lain.

Contoh "Telah Menggunakan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan", diantaranya:

1. Penggunaan data statistik dasar pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
2. Penggunaan data statistik dasar untuk dasar pengambilan keputusan/kebijakan dalam suatu instansi pemerintah

6.6.2 Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan

Statistik sektoral yang dihasilkan harus dapat dimanfaatkan oleh instansinya untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya. Pada tahapan perencanaan kegiatan statistik perlu dilakukan identifikasi kebutuhan data dan pengguna datanya, agar data yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Hal ini seharusnya sejalan pada saat data sudah tersedia, bahwa data digunakan dan dimanfaatkan untuk kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala terkait dengan penggunaan datanya.

Contoh "Telah Menggunakan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan", diantaranya:

1. Penggunaan data statistik sektoral pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
2. Penggunaan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan keputusan/kebijakan dalam suatu instansi pemerintah

6.6.3 Sosialisasi dan Literasi Data Statistik

Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penggunaan statistik yang benar melalui peningkatan literasi statistik untuk pengguna data. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme untuk mempromosikan/mensosialisasikan statistik serta memberikan literasi statistik, diantaranya dapat melalui:

1. Pengelolaan dan pemeliharaan hubungan dengan media
2. mengadakan pelatihan atau sosialisasi secara rutin baik di kalangan pemerintahan, swasta, akademisi, jurnalis, maupun masyarakat umum.
3. melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan data statistik
4. Mengimbau agar publikasi/artikel bertema statistik dapat dipahami dengan benar dan bagaimana statistik harus digunakan dengan benar

Contoh "Telah Melakukan Sosialisasi Data Statistik kepada publik", diantaranya:

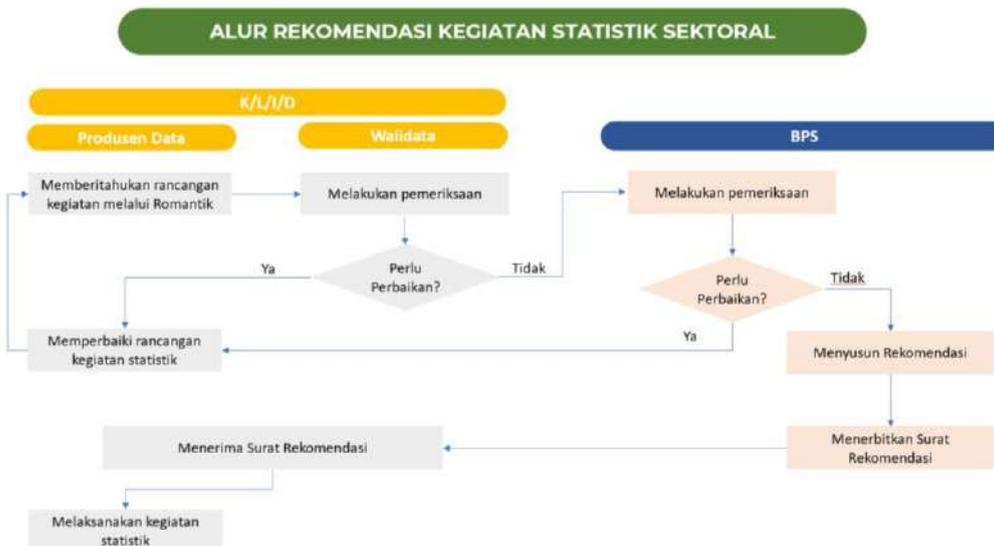
1. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi ketersediaan data-data yang dihasilkan dari kegiatan statistik yang dinilai
2. Kegiatan edukasi dalam rangka peningkatan literasi terhadap data yang dihasilkan dari kegiatan yang dinilai

6.6.4 Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Salah satu bentuk koordinasi dan kerjasama antara BPS dengan instansi pemerintah adalah melalui mekanisme pemberitahuan rancangan kegiatan statistik

oleh instansi pemerintah ke BPS serta pemberian rekomendasi statistik oleh BPS ke instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 ayat 2, yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara survei statistik sektoral wajib:

- memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS;
- mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS;
- menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS.



6.6.5 Perencanaan Pembangunan Statistik

Aksi Satu Data Indonesia yang disepakati dalam Forum SDI Tingkat Pusat merupakan salah satu contoh dokumen perencanaan Pembangunan statistik di Indonesia. Rencana Aksi SDI dapat mencakup:

- a) pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
- b) penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- c) kegiatan terkait pengumpulan Data;
- d) kegiatan terkait pemeriksaan Data;
- e) kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
- f) kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Perencanaan pembangunan statistik ini harus direviu dan dievaluasi secara berkala, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan statistik.

Contoh "Telah Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Statistik", diantaranya:

1. Terdapat rencana aksi Satu Data di lingkungan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah
2. Terdapat rencana kerja penyelenggaraan statistik sectoral di lingkungan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah

6.6.6 Kematangan Penyebarluasan Data

Data statistik yang dipublikasikan, sifatnya terbuka untuk digunakan dan disebarluaskan secara gratis. Dalam penyebarluasan data perlu ada manajemen akses data dimana ada data yang sifatnya terbuka, terbatas, dan tertutup. Kebijakan Satu Data Indonesia mengatur bahwa penyebarluasan data dilakukan oleh walidata melalui portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Contoh "Telah Melaksanakan Penyebarluasan Data", diantaranya:

1. Penyebarluasan data telah dilakukan satu pintu oleh walidata
2. Penyebarluasan data sudah terhubung dengan pusat rujukan informasi statistik, portal SDI, JIGN dan/atau Sistem Big Data Pemerintah
3. Tidak semua data disebarluaskan untuk public, sehingga ada manajemen akses data

6.6.7 Kematangan Pemanfaatan Big Data

Big data dapat menjawab kebutuhan statistik dengan menghasilkan indikator baru seperti mengukur kegiatan ekonomi digital maupun perilaku masyarakat di dunia maya. Sistem/proses pengendalian dan akuntabilitas pemanfaatan berbagai sumber data untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Diperlukan berbagai perubahan untuk dapat beradaptasi terhadap disrupsi Big Data dalam produksi statistik.

Pemenuhan indikator ini antara lain:

1. Tersedianya kebijakan terkait pemanfaatan big data untuk mendukung data statistik yang dihasilkan
2. Tersedianya prosedur standar dalam pemanfaatan big data
3. Tersedianya unit/fungsi/tim pemanfaatan dan pengembangan big data
4. Tersedianya laporan hasil evaluasi (termasuk penjaminan kualitas) pemanfaatan big data
5. Tersedianya hasil pemanfaatan big data yang tersedia untuk public

Contoh "Telah Melaksanakan Pemanfaatan Big Data", diantaranya:

1. Memanfaatkan *big data* yang menghasilkan data statistik sebagai data pendukung

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2023a. Modul Pembinaan Statistik Sekotrak Seri EPSS: Satu Data Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2023b. Modul Pembinaan Statistik Sekotral Seri EPSS: Proses Bisnis Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2023c. Modul Pembinaan Statistik Sektoral Seri EPSS : Sistem Statistik Nasional. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2023d. Modul Pembinaan Statistik Sektoral Seri EPSS: Kelembagaan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2024. Modul Pembinaan Statistik Sektoral Seri EPSS: Kualitas Data. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 117 Tahun 2023 Pedoman Penjaminan Kualitas Statistik Melalui Quality Gates
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana.
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Dan Satu Data Indonesia.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bdan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.

LAMPIRAN



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1091, 2020

BPS. Petunjuk Teknis. Standar Data Statistik

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR DATA STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan standar data statistik bagi instansi pusat dan/atau instansi daerah serta mendukung sistem statistik nasional dan satu data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR DATA STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan;
2. Standar Data Statistik adalah Standar Data yang mendasari data statistik;
3. Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi;
4. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain;
5. Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas;
6. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan;
7. Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan;
8. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik;
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda,

isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau

menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;

10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan,

penyajian, dan analisis;

11. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data;

12. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data; dan

13. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Standar Data Statistik Lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik.
- (2) Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data Statistik untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data Statistik yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan Standar Data Statistik, Kepala Badan Pusat Statistik dapat membentuk tim Standar Data Statistik.

Pasal 3

Petunjuk teknis standar data statistik tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR
DATA STATISTIK

PETUNJUK TEKNIS STANDAR DATA STATISTIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangannya Sistem Statistik Nasional. Dalam upaya penyediaan data dan penyebarluasan data yang dihasilkan pemerintah diperlukan suatu standar untuk menjaga konsistensi penggunaan data agar dapat dibandingkan antar periode waktu maupun antar wilayah.

Penggunaan standar data mampu menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data. Standar data dapat digunakan sebagai garansi kualitas data itu sendiri. Selain itu standar data dapat digunakan untuk menguji efektifitas kegiatan statistik agar kegiatan yang sama tidak dilakukan berulang dan data menjadi lebih mudah untuk dibagipakaikan.

Dalam tatanan Satu Data Indonesia, cakupan dari data yang perlu distandardisasi adalah data yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah melalui Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah. Hal ini dikarenakan data tersebut dimanfaatkan untuk membuat kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Data tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui standar data, Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan satu data yang bermanfaat bagi semua pihak.

B. Tujuan

Tujuan Standar Data Statistik adalah untuk memudahkan pengumpulan, berbagipakai, dan pengintegrasian data dengan

memastikan bahwa ada pemahaman yang jelas tentang data yang dihasilkan. Tujuan Khusus Standar Data Statistik memudahkan penggunaan data, memberikan akurasi dan konsistensi data, memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa oleh banyak Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah.

C. Manfaat

Penyusunan standar data statistik adalah inti dari harmonisasi dan integrasi yang diharapkan dari penerapan Sistem Statistik Nasional. Pembina Data harus selalu melakukan peninjauan untuk memastikan penggunaan standar data statistik di seluruh proses produksi statistik, pengembangan standar lebih lanjut, dan peningkatan terhadap manajemen dan penggunaan standar itu sendiri. Mekanisme penetapan standar data statistik yang berpedoman pada azas standardisasi harus dilakukan agar dapat diterima pengguna standar data statistik secara luas.

Manfaat menggunakan standar data statistik, terutama yang mengacu pada standar internasional adalah bahwa standar tersebut sudah berdasarkan praktik terbaik di banyak Negara. Selain itu penggunaan standar data statistik membuat statistik yang dihasilkan dapat dibandingkan secara nasional dan internasional antar periode waktu. Dampak positif penerapan Satu Standar Data Statistik adalah:

1. meningkatkan integritas dataset yang dirilis oleh pemerintah melalui standardisasi penyelenggaraan data pemerintah dalam hal penetapan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, aturan dan asumsi,
2. memperbaiki alur koordinasi dan komunikasi antar Pembina Data selaku Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan Standar Data Statistik dengan Walidata dan Produsen data di setiap Instansi Pemerintah, dan
3. menghindari terjadinya multi standar penyelenggaraan data rilis pemerintah melalui mekanisme harmonisasi data antar instansi pemerintah, penentuan ownership (kepemilikan) pada setiap rilis dataset, dan penetapan kode referensi pada data.

Manfaat standar statistik baru dapat dirasakan ketika digunakan dengan benar. Oleh karenanya standar data statistik harus dikelola secara tepat oleh unit organisasi yang ditunjuk untuk memastikan standar

statistik dirumuskan, disepakati, dipromosikan, dipahami sepenuhnya dan digunakan secara efektif. Standar statistik harus selalu dipelihara dan dimutakhirkan agar dapat menangkap perkembangan maupun perubahan yang terjadi. Standar data statistik yang diubah harus dapat diimplementasikan.

D. Standardisasi Data Statistik

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Pasal 17 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia bahwa standar data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

Standardisasi data sangat penting karena data sangat beragam. Standardisasi data adalah proses untuk membawa data ke dalam format umum yang memungkinkan untuk perbandingan data, analisis lintas sektor yang bersifat kolaboratif, dan berbagi pakai data itu sendiri. Dalam proses standardisasi, penetapan standar harus memenuhi azas yaitu:

1. Relevansi, Ketidakberpihakan, dan Keterbukaan

Relevan artinya agar dapat memfasilitasi dan memperhatikan kebutuhan Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidakberpihakan artinya tidak memihak kepentingan Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah tertentu.

Keterbukaan artinya terbuka bagi semua Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan standar dan dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil.

2. Standar Profesional, Prinsip Ilmiah, dan Etika Profesional

Dalam penetapan standar, badan statistik memutuskan berdasarkan pertimbangan profesional, termasuk prinsip ilmiah dan etika professional.

3. Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas artinya penetapan standar harus sesuai dengan

standar ilmiah tentang sumber, metode dan prosedur statistik agar dapat digunakan untuk interpretasi data dengan benar.

Transparansi, artinya transparan agar semua Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah yang berkepentingan dapat mengikuti dan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan standar.

4. Sumber Statistik Resmi

Standar yang ditetapkan harus dijadikan sumber rujukan statistik resmi. Oleh karena itu standar yang ditetapkan juga harus memiliki sumber yang sah.

5. Koheren dengan Penggunaan Standar Internasional

Koheren dengan Penggunaan Standar Internasional artinya pengembangan standar sejalan dengan standar internasional untuk menjamin keterbandingan data secara internasional dan mendorong konsistensi dan efisiensi sistem statistik meskipun digunakan dengan cara yang berbeda dan untuk berbagai penggunaan.

6. Berdimensi pembangunan

Berdimensi pembangunan artinya memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional.

Standardisasi data menggunakan standar data sebagai acuan, yang terdiri atas 5 komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran; dan satuan.

1. Konsep

Suatu konsep mempunyai berbagai dimensi atau aspek yang merupakan karakteristik umum, dimana masing-masing dimensi dapat digambarkan ke dalam satu atau lebih indikator yang terukur; satu atau lebih indikator dapat merefleksikan variabel, satu atau lebih variabel menggambarkan dimensi, serta satu atau lebih dimensi menggambarkan sebuah konsep.

Konsep dapat dituangkan ke dalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap. Dalam kegiatan statistik, konsep adalah hal yang paling mendasar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dimana konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

2. Definisi

Konsep yang telah diidentifikasi kemudian didefinisikan. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Definisi yang standar merupakan hal yang sangat penting bagi kegiatan statistik. Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.

3. Klasifikasi

Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional dan /atau melalui forum resmi lainnya.

Klasifikasi statistik digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyelenggaraan statistik. Selain itu klasifikasi statistik juga menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, dalam format yang didesain untuk penyelenggaraan statistik, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan.

4. Ukuran

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio, seperti frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

5. Satuan

Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Satuan dapat digolongkan menjadi satuan baku yang disepakati secara internasional seperti meter, gram, liter dan lain- lain, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, bata, ulas, yang dapat dikonversi ke dalam satuan internasional.

BAB II

TAHAPAN IDENTIFIKASI STANDAR DATA STATISTIK

Sebelum memulai kegiatan produksi data statistik, produsen data terlebih dahulu menentukan target kegiatan yang akan dicapai, indikator yang akan digunakan sebagai capaian target dan variabel apa saja yang akan digunakan untuk mengukur capaian target. Pengertian indikator secara umum adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Ketika dievaluasi secara berkala, sebuah indikator dapat menunjukkan arah perubahan di berbagai unit dan melalui waktu. Sementara variabel adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada kegiatan statistik. Secara sederhana, variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/ atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data. Adapun tahapan dalam mengidentifikasi standar data statistik:



A. Identifikasi Indikator dan/atau Variabel

Pada tahapan ini indikator dan/ atau variabel diidentifikasi berdasarkan jenis indikator dan/ atau variabel tersebut. Variabel dapat dibedakan menjadi variabel tunggal dan variabel turunan yang diperoleh dari kombinasi perhitungan lebih dari satu variabel tunggal.

B. Penentuan Cakupan Indikator dan/atau Variabel

Pada tahapan ini cakupan dari satu indikator dan/ atau variabel yang sama dapat digunakan dalam beberapa lingkup statistik yaitu statistik ekonomi, sosial, pertanian, neraca/ analisis, sesuai dengan tujuan dari pengumpulannya.

C. Pembentukan Komponen Standar Data Statistik

Pada tahapan ini variabel yang sudah diidentifikasi dan ditentukan cakupannya dibakukan berdasarkan lima standar data yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan. Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik.

Tujuan	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya
Pengumpulan Data	setengah proporsi laki-laki, perempuan dan

Indikator	anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
Variabel	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Jumlah Penduduk, jenis kelamin, kemiskinan, umur.

No	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1.	Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.	1 = WNI 2 = WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen
2.	Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang	1 Laki-laki 2 = Perempuan	Jumlah, persentase	Orang / jiwa, persen

No	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
		ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.			
3.	Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	Klasifikasi berdasarkan Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index-P1</i>), Klasifikasi berdasarkan Keparahan Kemiskinan (<i>Poverty Severity Index-P2</i>)	Indeks	Persen-tase
4.	Umur	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi umur usia sekolah, klasifikasi umur lima tahunan	Rata-rata	Tahun

BAB III

TATA CARA DAN ALUR PENGAJUAN STANDAR DATA STATISTIK

A. Pelaksana dalam Tata Kelola Standar Data Statistik

Ada tiga pelaksana yang terlibat dalam tata kelola standar data statistik, yaitu pembina data, walidata dan produsen data.

1. Pembina Data

Peran instansi vertikal BPS seperti tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah. Sementara Pasal 20 ayat (2) memberi kewenangan kepada instansi vertikal BPS sebagai Pembina Data Statistik tingkat daerah.

2. Walidata

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyatakan bahwa Walidata tingkat pusat memiliki tugas:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kade Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Dalam pelaksanaannya setiap Instansi Pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja untuk melaksanakan tugas Walidata tingkat pusat. Walidata di Instansi Pusat dapat berupa unit pusat data dan informasi (Pusdatin) atau unit lain yang ditunjuk sebagai walidata di Instansi Pusat.

Walidata tingkat daerah seperti tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 21 memiliki tugas:

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan

- c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Dalam pelaksanaannya setiap Instansi Daerah (tingkat provinsi/kabupaten/kota) hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah untuk melaksanakan tugas Walidata tingkat daerah. Walidata di tingkat daerah dapat berupa Instansi Daerah yang memiliki fungsi penyebarluasan informasi atau instansi yang ditunjuk sebagai walidata tingkat daerah.

3. Produsen Data

Selain bertugas menghasilkan data, Produsen Data dapat memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data Statistik.

Dalam pengembangan standar data statistik statistik, Walidata Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah melakukan kompilasi masukan data yang diusulkan oleh produsen data sebelum disampaikan ke pembina data. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data. Selain itu dengan adanya alur penyampaian berjenjang dari produsen data melalui walidata hingga ke pembina data, pengajuan berulang/ duplikasi dapat dihindari. Melalui alur pengajuan berjenjang walidata dapat melihat keragaman data yang ada di produsen data sehingga dapat memberikan masukan kepada produsen data terkait indikator dan variabel apa saja yang dapat distandarkan.

B. Alur Pengajuan Standar Data Statistik Lintas Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah

Standar Data Statistik Lintas Instansi merupakan standar data statistik yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah. Tata cara dan alur petunjuk teknis untuk pengajuan pemutakhiran pada standar data statistik yang berlaku lintas instansi, baik yang telah ditetapkan maupun usulan baru, kepada pembina data statistik pusat:

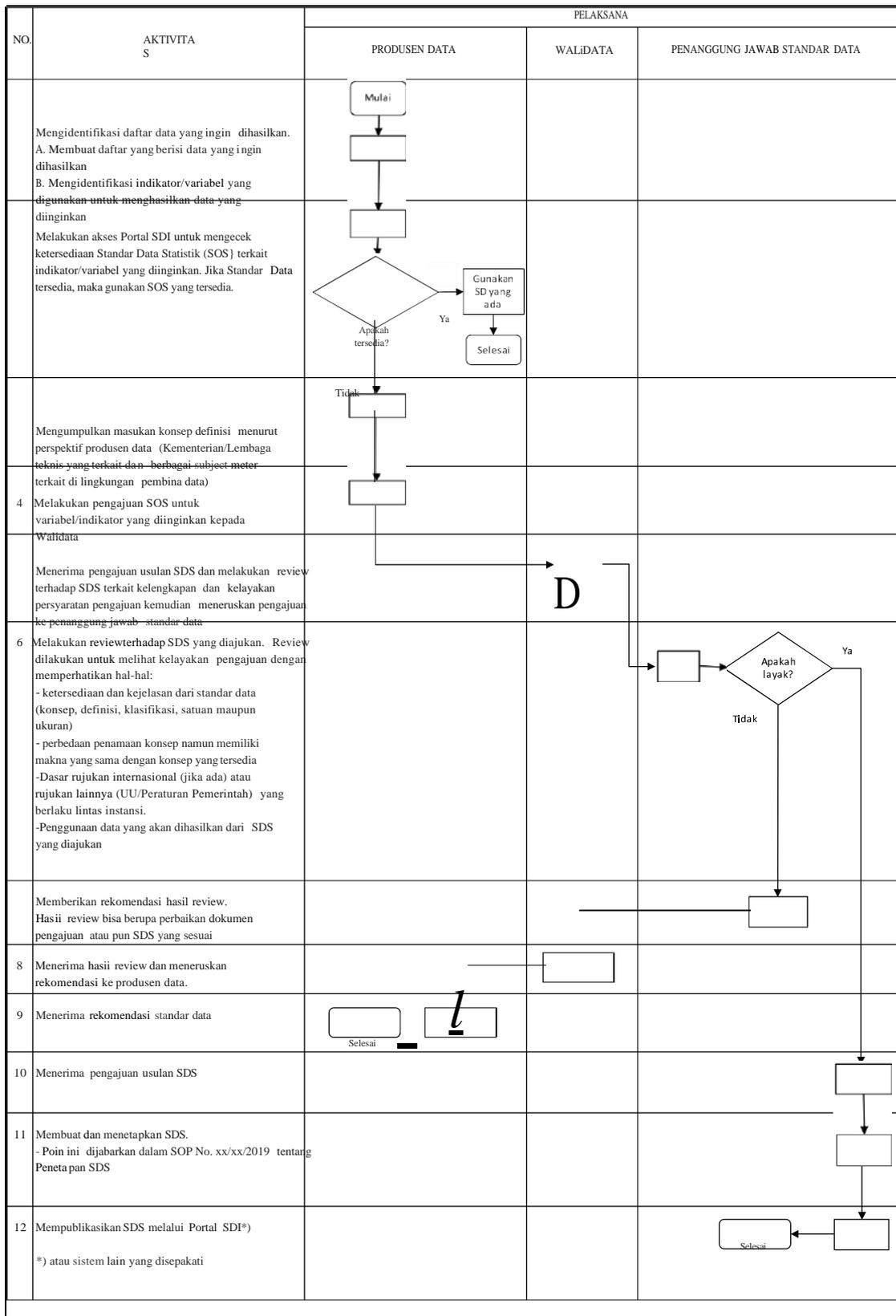
1. Produsen data yang berhak melakukan pengajuan pemutakhiran/usulan baru standar data statistik adalah Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, dengan terlebih dahulu melakukan:
 - a. identifikasi daftar data yang ingin dihasilkan dan menentukan cakupan penggunaan (lintas instansi/tidak lintas instansi);
 - b. membuat daftar yang berisi data yang ingin dihasilkan;

- c. mengidentifikasi indikator /variabel yang digunakan untuk menghasilkan data yang diinginkan;
 - d. mengecek standar data statistik yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Statistik;
 - e. mengecek standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat;
 - f. mempertimbangkan standar data statistik lintas instansi yang telah ditetapkan oleh Pembina Pusat; dan
 - g. mempertimbangkan standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat jika ada. Standar data statistik tidak lintas instansi dapat diusulkan menjadi standar data statistik lintas instansi jika digunakan oleh lebih dari satu Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah.
2. Pengajuan standar data statistik oleh produsen data di dalam instansi Pembina data statistik dilakukan melalui Walidata (unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang diseminasi statistik). Walidata selanjutnya meneruskan pengajuan tersebut ke Pembina Data Statistik (unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang standardisasi statistik).
 3. Pengajuan standar data statistik di luar instansi Pembina data statistik dilakukan secara berjenjang melalui Walidata di Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah, mulai dari walidata Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota diteruskan ke walidata Instansi Daerah Tingkat Provinsi diteruskan ke walidata Instansi Pusat.
 4. Produsen Data wajib melengkapi dokumen pengajuan standar data statistik yang disediakan oleh Pembina Data Pusat, yaitu form variabel/indikator yang berisi alasan pemutakhiran ataupun usulan baru serta melampirkan rujukan internasional ijika ada), rujukan lainnya (UU /Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi dan surat pengajuan standar data statistik yang ditanda tangani oleh pejabat eselon 2. Pengajuan dapat dilakukan melalui Portal atau sistem/media lain yang ditentukan dengan mengunggah dokumen pendukung yang telah disahkan pimpinan walidata.
 5. Dalam proses pengajuannya, walidata Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat berkonsultasi ijika diperlukan) dengan Pembina Data Statistik di wilayah bersangkutan. Walidata terlebih

dahulu mengelompokkan dan memeriksa kelengkapan dan kelayakan usulan standar data statistik berdasarkan Instansi Pusat pembina. Walidata Instansi Pusat selanjutnya meneruskan pengajuan tersebut ke Pembina Data statistik tingkat pusat.

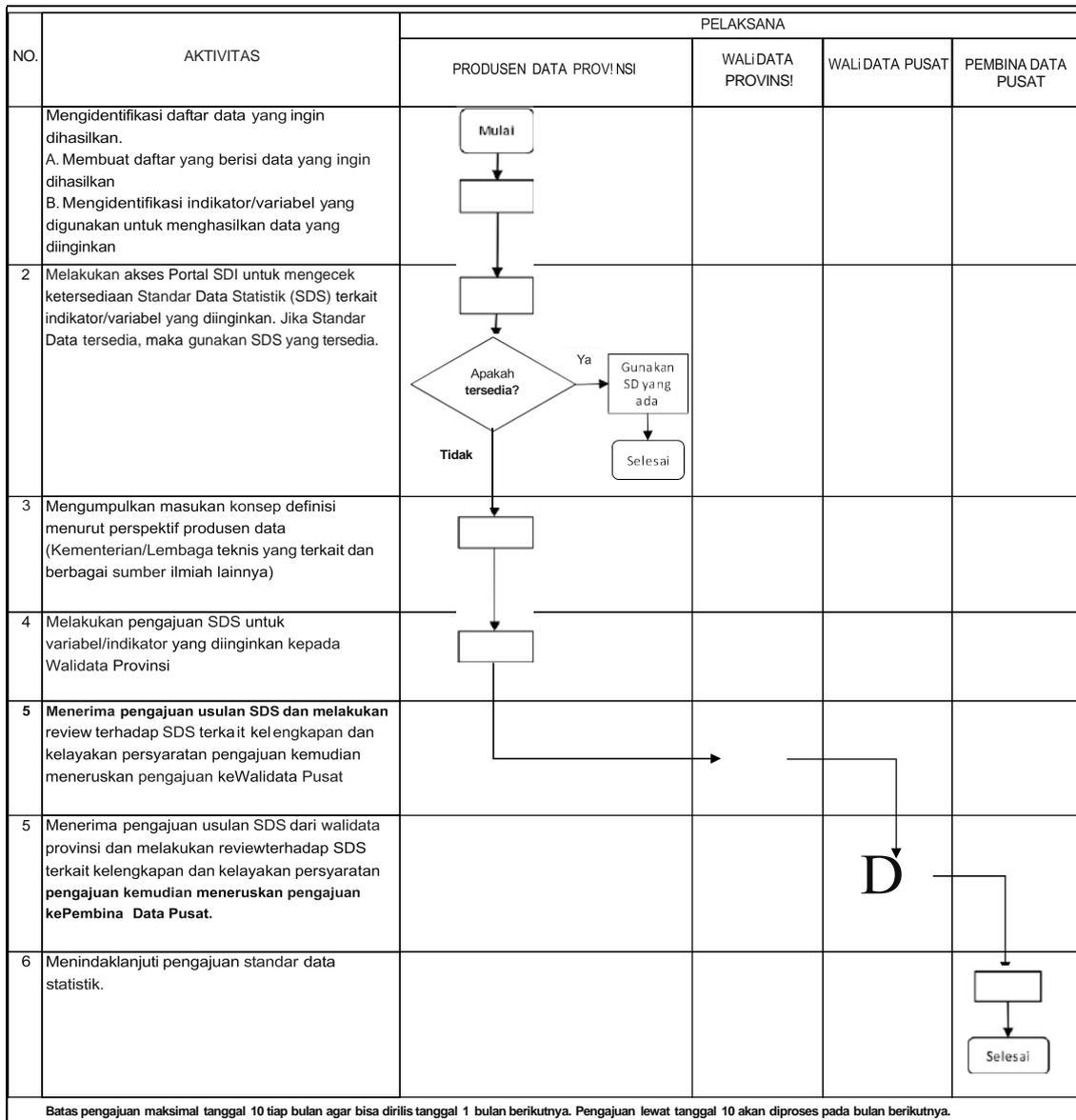
6. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Walidata Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah wajib mengetahui perkembangan standar data statistik terbaru dan memeriksa pengajuan standar data statistik dari Produsen Data.
7. Pembina data statistik pusat melakukan peninjauan terhadap standar data statistik yang diajukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar rujukan internasional (jika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi;
 - b. Ketersediaan dan kejelasan dari standar data statistik (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan);
 - c. Perbedaan penamaan standar data statistik yang diajukan namun memiliki makna yang sama dengan standar data statistik yang telah ditetapkan; dan
 - d. Penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan.
8. Pembina data statistik pusat dapat menerima atau menolak pengajuan standar data statistik setelah melakukan pengecekan persyaratan dan kelengkapan yang telah ditentukan dengan mengkonfirmasi usulan dari walidata yang mengajukan.
9. Dalam hal pengajuan dari walidata yang belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang ditentukan maka usulan pengajuan akan dikembalikan ke walidata yang mengajukan dan wajib melakukan pengajuan dan memenuhi kelengkapan persyaratan kembali selambat-lambatnya 15 hari kerja. Jika pengajuan tidak dilengkapi hingga batas waktu yang ditentukan, Pembina data statistik berhak membatalkan permohonan.
10. Dalam hal persyaratan dan kelengkapan yang telah diterima maka pembina data statistik pusat melakukan pembahasan standar data statistik yang diajukan dengan subjek meter terkait di lingkungan pembina data statistik pusat dan/ atau Instansi Pusat lainnya dan/ atau Forum Satu Data Indonesia.

11. Pembina data statistik pusat melakukan penetapan standar data statistik dalam satu periode penetapan standar data statistik.
12. Standar data statistik yang telah ditetapkan dipublikasikan dalam portal atau media lain yang disepakati dengan mencantumkan tanggal efektif mulai berlaku standar data statistik.
13. Pengajuan standar data statistik harus memperhatikan efektifitas kegiatan statistik yang akan dilakukan dan periode penetapan standar data statistik.
14. Pengajuan usulan standar data statistik dilakukan pada $t - 2$ untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik pada tahun t .
15. Pengajuan usulan standar data statistik dapat dilakukan segera setelah ditetapkannya standar data statistik terbaru. Penutupan pengajuan usulan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum standar data statistik ditetapkan yakni pada triwulan 3.

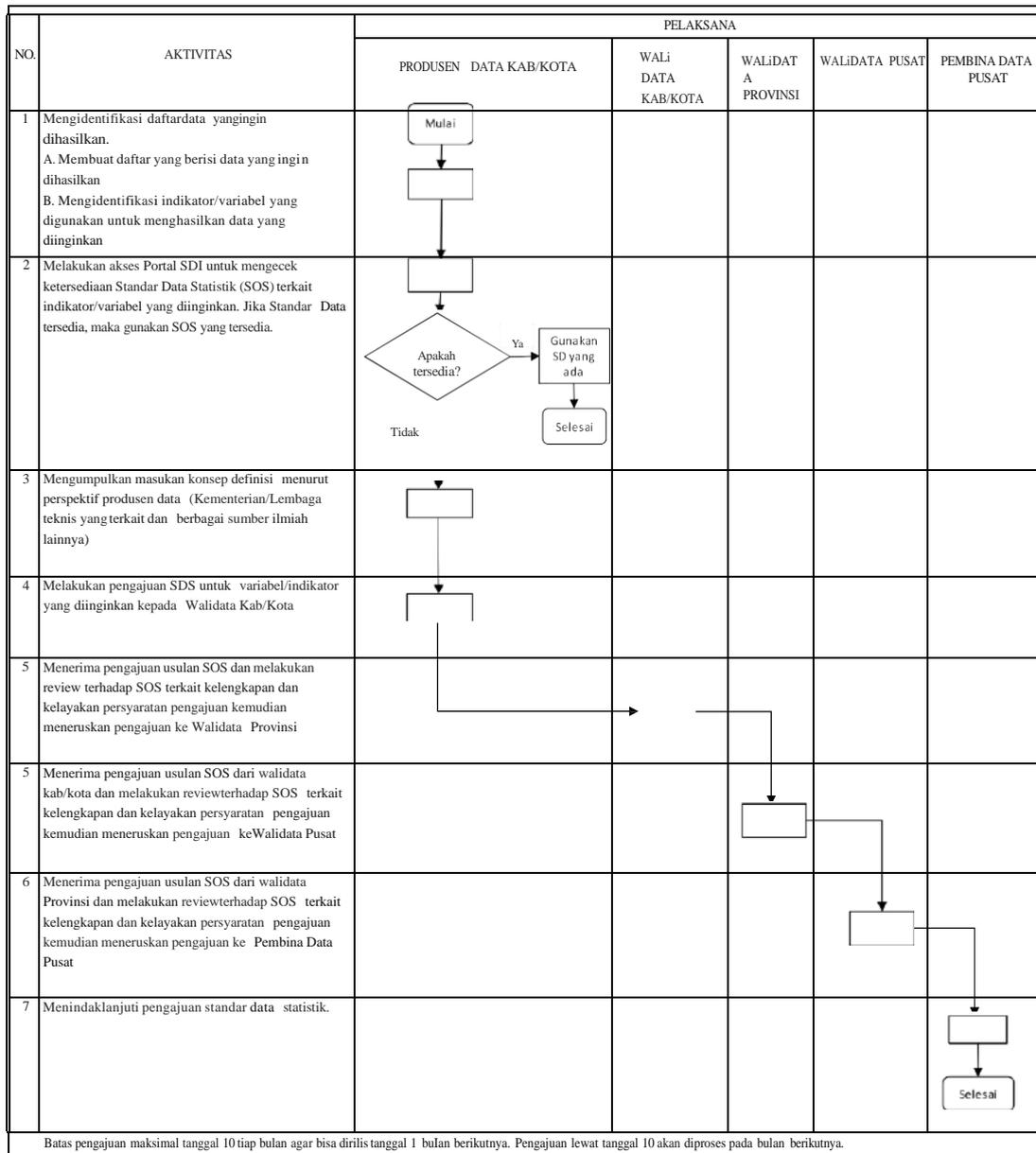


Batas pengajuan maksimal tanggal 10 tiap bulan agar bisa dirilistanggal 1 bulan berikutnya. Pengajuan lewat tanggal 10 akan di proses pada bulan berikutnya.

Gambar 1. Alur Kegiatan Pengajuan Standar Data Statistik Lintas Instansi Pusat



Gambar 2. Alur Kegiatan Pengajuan Standar Data Statistik Lintas Instansi Daerah Tingkat Provinsi



Gambar 3. Alur Kegiatan Pengajuan Standar Data Statistik Lintas Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota

C. Alur Pengajuan Standar Data Statistik Tidak Lintas Intansi Pusat dan/ atau Daerah

Standar Data Statistik Tidak Lintas Instansi merupakan standar data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tata kelola dan alur petunjuk teknis untuk pengajuan pemutakhiran pada standar data statistik yang berlaku tidak lintas instansi adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Pada Tingkat Pusat

Menteri atau Kepala Instansi Pusat dapat menetapkan standar data statistik untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini pembina data statistik tingkat pusat dapat memberikan rekomendasi, masukan, arahan dan/ atau konsultasi standar data statistik (jika diperlukan).

a. Standar data statistik yang diajukan oleh Menteri/Kepala Instansi Pusat terkait harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan dan kejelasan dari standar data statistik (konsep, definisi, klasifikasi, satuan maupun ukuran);
- 2) Dasar rujukan internasional (jika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi;
- 3) Penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan; dan
- 4) Bukti terpenuhinya standar data statistik (form penilaian mandiri) yang diunduh dari portal atau sistem/media lain yang ditentukan.

b. Standar data statistik yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala instansi pusat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaporkan dan melampirkan standar data statistik yang telah ditetapkan oleh menteri atau kepala Instansi Pusat kepada pembina data statistik pusat berikut form penilaian mandiri pada butir a. pain 4) dengan mekanisme pelaporan dilakukan saat penetapan standar data statistik tidak lintas instansi oleh Instansi Pusat pembina yang bersangkutan.
- 2) Instansi pusat yang telah menetapkan standar data statistik wajib melakukan sosialisasi terkait penggunaan standar data statistik kepada instansi binaannya di daerah.
- 3) Instansi pusat yang telah menetapkan standar data statistik wajib memantau dan melakukan evaluasi terkait penggunaan standar data statistik yang telah ditetapkan.

2. Pengajuan pada Tingkat Provinsi

Kepala Instansi Daerah Tingkat Provinsi hanya dapat mengajukan standar data statistik untuk data yang pemanfaatannya

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Instansi Pusat pembina. Dalam hal ini pembina data statistik pada tingkat provinsi dapat memberikan rekomendasi, masukan, arahan dan/ atau konsultasi standar data statistik ijika diperlukan).

a. Standar data statistik yang diajukan oleh Kepala instansi provinsi terkait harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan dan kejelasan dari standar data statistik (konsep, definisi, klasifikasi, satuan maupun ukuran);
- 2) Dasar rujukan internasional ijika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi;
- 3) Penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan;
- 4) Mempertimbangkan standar data statistik lintas instansi yang telah ditetapkan oleh Pembina Pusat;
- 5) Mempertimbangkan standar data statistik tidak lintas instansi yang telah ditetapkan oleh instansi induk masing- masing; dan
- 6) Bukti terpenuhinya standar data statistik (formulir penilaian mandiri) yang diunduh dari portal atau sistem/media lain yang ditentukan.

b. Terhadap standar data statistik yang telah di tetapkan oleh Instansi Pusat, Instansi Daerah Tingkat Provinsi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Instansi Daerah Tingkat Provinsi wajib melakukan sosialisasi terkait penggunaan standar data statistik kepada instansi binaannya di kabupaten/kota; dan
- 2) Instansi Daerah Tingkat Provinsi wajib memantau dan melakukan evaluasi terkait penggunaan standar data statistik yang telah ditetapkan.

3. Pengajuan pada Tingkat Kabupaten/Kota

Kepala Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota hanya dapat mengajukan standar data statistik untuk data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini pembina data statistik pada tingkat Kabupaten/Kota dapat memberikan rekomendasi, masukan, arahan dan/atau konsultasi standar data statistik ijika diperlukan).

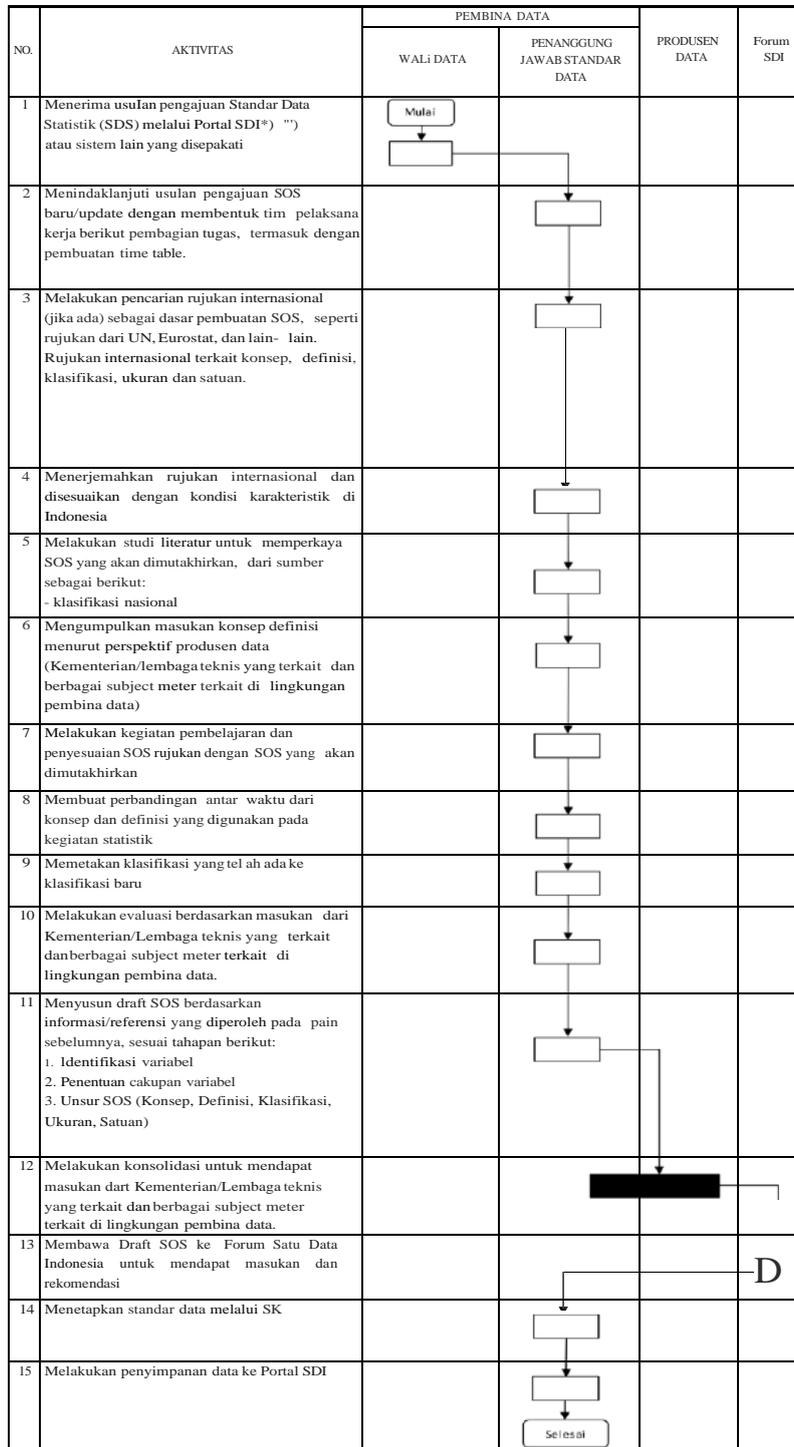
- a. Standar data statistik yang diajukan oleh kepala Instansi Kabupaten/Kota terkait harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Ketersediaan dan kejelasan dari standar data statistik (konsep, definisi, klasifikasi, satuan maupun ukuran);
 - 2) Dasar rujukan internasional (jika ada) atau rujukan lainnya (UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku lintas instansi;
 - 3) Penggunaan data yang akan dihasilkan dari standar data statistik yang diajukan;
 - 4) Mempertimbangkan standar data statistik lintas instansi yang telah ditetapkan oleh Pembina Pusat;
 - 5) Mempertimbangkan standar data statistik tidak lintas instansi yang telah ditetapkan oleh instansi induk masing-masing; dan
 - 6) Bukti terpenuhinya standar data statistik (formulir penilaian mandiri) yang diunduh dari portal atau sistem/media lain yang ditentukan.
- b. Terhadap standar data statistik yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat, Instansi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memantau dan melakukan evaluasi terkait penggunaan standar data statistik yang telah ditetapkan.
- c. Standar data statistik tidak lintas instansi dapat berubah menjadi standar data statistik lintas instansi jika terjadi perubahan penggunaan data yang dihasilkan. Mekanisme perubahan standar data statistik tidak lintas instansi dapat berubah menjadi standar data statistik lintas instansi mengikuti alur pengajuan standar data statistik lintas instansi.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN STANDAR DATA STATISTIK LINTAS INSTANSI OLEH
PEMBINA DATA STATISTIK

Dalam menetapkan standar data statistik pembina data statistik melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Walidata menyampaikan usulan pengajuan standar data statistik melalui portal atau sistem/media lain yang ditentukan.
2. Pembina data statistik menerima usulan pengajuan standar data statistik melalui portal atau sistem/ media lain yang ditentukan.
3. Menindaklanjuti usulan pengajuan standar data statistik dengan membentuk tim pelaksana kerja berikut pembagian tugas, termasuk dengan pembuatan *time table*.
4. Mencari dan menerjemahkan sumber rujukan internasional yang berasal dari *United Nations* (UN), Eurostat, Asia, ASEAN dan atau hasil studi dari berbagai referensi yang diakui secara internasional terkait standar data statistik dan menyesuaikan dengan kondisi karakteristik di Indonesia.
5. Melakukan studi literatur terhadap standar data statistik yang akan dievaluasi dari berbagai sumber nasional seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, atau peraturan lainnya yang resmi dikeluarkan Instansi Pusat yang ada di Indonesia.
6. Meminta dan mengumpulkan masukan dari berbagai Instansi Pusat yang terkait dengan standar data statistik yang akan dibuat.
7. Meminta dan mengumpulkan masukan dari berbagai subjek meter terkait di lingkungan pembina data statistik mengenai standar data statistik yang telah disusun/ dibuat dan operasional di lapangan dalam melaksanakan kegiatan statistik.
8. Melakukan evaluasi berdasarkan referensi yang didapat pada butir 1-7 dan menyusun draft standar data statistik.
9. Draft standar data statistik yang sudah dibuat kemudian dikonsolidasikan dalam bentuk rapat/pertemuan/forum diskusi dengan unit kerja terkait di lingkungan pembina data statistik pusat dan/ atau Instansi Pusat lainnya dan/ atau Forum Satu Data Indonesia.
10. Menetapkan standar data statistik dan melakukan penyimpanan ke portal atau sistem/media lain yang ditentukan dalam bentuk dokumen hukum dalam satu periode penetapan.

11. Penetapan standar data statistik lintas instansi dilakukan setahun sekali pada triwulan 3 (tiga).



Gambar 4. Alur Kegiatan Penetapan Standar Data Statistik Lintas Instansi

BABV

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR STANDAR DATA STATISTIK

A. Tata cara Pengisian Formulir Usulan Standar Data Statistik

Tuliskan judul kegiatan yang akan dilaksanakan secara lengkap pada tempat yang disediakan.

1. Blok I. Identifikasi Penyelenggaraan Kegiatan

a. Nama Instansi Pemerintah

Tuliskan nama Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah penyelenggara kegiatan ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II, misal *Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja RI*.

b. Alamat Lengkap Instansi

Tuliskan dengan lengkap alamat Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email). Contoh :

Departemen Tenaga Kerja RI, Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Jl. Gatot Subroto Kav 51, Jakarta 12950, Telp. 525688 Kabupaten/

Kota: Jakarta Selatan

Provinsi : DKI Jakarta

2. Blok II. Penanggung Jawab Pengajuan Variabel (*Contact Person*)

Penanggung Jawab Pengajuan Variabel

Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax dan alamat email penanggung jawab pengajuan variabel 1.

3. Blok III. Deskripsi Singkat Dari Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Tuliskan dengan jelas dan singkat kegiatan statistik/ survei yang akan dilakukan misalnya meliputi tujuan dan metodologi survei yang akan dilakukan, serta data yang ingin didapatkan dari kegiatan statistik/ survei tersebut.

4. Blok IV. Variabel Yang Diajukan

a. Indikator /Variabel

Variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data

b. Konsep Variabel

Konsep adalah ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

c. Definisi Variabel

Definisi adalah penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu. dengan Data yang lain.

d. Klasifikasi Variabel

Klasifikasi adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Klasifikasi statistik digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyelenggaraan statistik Selain itu klasifikasi statistik juga menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, dalam format yang didesain untuk penyelenggaraan statistik, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan.

e. Ukuran Variabel

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk saat data disajikan, apakah dalam bentuk frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

f. Satuan Variabel

Satuan adalah besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Menjadi pembeda atau pembanding dalam pengukuran, satuan baku: disepakati secara internasional, cm, meter, km, mil, ha dan lain-lain.

g. Dasar Rujukan

Dasar rujukan bisa berupa referensi dari internasional, peraturan dan perundangan yang berlaku, kajian dan referensi ilmiah lainnya ataupun *best practice* maupun standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat.

h. Cakupan Penggunaan Variabel

Cakupan Penggunaan Variabel*): Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi

Lintas Instansi adalah jika variabel tersebut akan digunakan juga oleh instansi lain.

 **BPS**
BADAN PUSAT STATISTIK
FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU STATISTIK

I. Identifikasi
 Nama: _____
 Alamat: _____
 Kabupaten/Kota: _____

II. Informasi Kontak
 Nomor Telepon/Fax: _____
 Email: _____

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Gambar 5. Formulir Pengajuan Usulan Baru Halaman 1

W. Indikator/Variabel Yang Diajukan

Cakupan Penggunaan Variabel*): Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi

*): coret yang tidak perlu

No.	Kelompok Indikator/Variabel	file/final	Kategori/klasifikasi	Urutan	Dasar Rujukan

Jakarta, 2020
 Mengetahui,
 Kepala

Gambar 6. Formulir Pengajuan Usulan Baru Halaman 2

B. Tata cara Pengisian Formulir Pemutakhiran Standar Data Statistik

Tuliskan judul kegiatan yang akan dilaksanakan secara lengkap pada tempat yang disediakan.

1. Blok I. Identifikasi Penyelenggaraan Kegiatan

a. Nama Instansi Pemerintah

Tuliskan nama Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah penyelenggara kegiatan ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II, misal *Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja RI.*

b. Alamat Lengkap Instansi

Tuliskan dengan lengkap alamat Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email). Contoh :

Departemen Tenaga Kerja RI, Badan Perencanaan dan Pengembangan Tenaga Kerja

Jl. Gatot Subroto Kav 51, Jakarta 12950, Telp. 525688 Kabupaten/

Kata: Jakarta Selatan

Provinsi : DKI Jakarta

2. Blok II. Penanggung Jawab Pengajuan Variabel (*Contact Person*)

Penanggung Jawab Pengajuan Variabel

Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax dan alamat email penanggung jawab pengajuan variabel 1.

3. Blok III. Deskripsi Singkat Dari Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

Tuliskan dengan jelas dan singkat kegiatan statistik/ survei yang akan dilakukan misalnya meliputi tujuan dan metodologi survei yang akan dilakukan, serta data yang ingin didapatkan dari kegiatan statistik/ survei tersebut.

4. Blok IV. Variabel Yang Lama

Diisi dengan variabel yang telah ada sebelumnya dan sudah ditetapkan menjadi standar data statistik.

5. Blok V. Variabel Yang dimutakhirkan

Diisi dengan variable baru yang memutakhirkan/mengganti yang

telah ada sebelumnya dan sudah ditetapkan menjadi standar data statistik.

a. Variabel

Variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/ atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data.

b. Konsep Variabel

Konsep adalah ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

c. Definisi Variabel

Definisi adalah penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

d. Klasifikasi Variabel

Klasifikasi adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Klasifikasi statistik digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyelenggaraan statistik Selain itu klasifikasi statistik juga menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, dalam format yang didesain untuk penyelenggaraan statistik, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan.

e. Ukuran Variabel

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk saat data disajikan, apakah dalam bentuk frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

f. Satuan Variabel

Satuan adalah besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Menjadi pembeda atau pembanding dalam pengukuran, satuan baku: disepakati secara internasional, cm, meter, km, mil, ha dan lain-lain.

g. Dasar Rujukan

Dasar rujukan bisa berupa referensi dari internasional, peraturan dan perundangan yang berlaku, kajian dan referensi ilmiah lainnya ataupun *best practice*, maupun standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat.

h. Cakupan Penggunaan Variabel

Cakupan Penggunaan Variabel*): Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi Lintas Instansi adalah jika variabel tersebut akan digunakan juga oleh instansi lain.

The image shows a form from the Badan Pusat Statistik (BPS) titled "FORMULIR PENGAJUAN PEMUTAKHIRAN STANDAR DATA STATISTIK". The form is divided into three main sections:

- I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan**: This section contains four fields for identifying the government institution: "Nama Instansi Pemerintah", "Alamat Lengkap Instansi", "Kabupaten/Kota", and "Provinsi".
- II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person)**: This section contains four fields for contact information: "Nama Penanggung Jawab", "Jabatan", "Telepon/Fax", and "Email".
- III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan**: This section contains a large empty rectangular box for providing a brief description of the statistical activity.

The form also features the BPS logo and the acronym "KUC-MSDS" in the top right corner.

Gambar 7. Formulir Pengajuan Usulan Pemutakhiran Halaman 1

V. Indikator/Variabel Yang Lama

Cakupan Penggunaan Variabel*): *Lintas Instansi/ Tidak Lintas Instansi*

*] coret yang tidak perlu

No.	Konsep Variabel	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Dasar Rujukan

VI. Variabel Yang Dimutakhirkan Menjadi:

No.	Indikator/Variabel	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Alasan Pemutakhiran

Jakarta, /..... /2020

Mengetahui,

Kepala

Gambar 8. Formulir Pengajuan Usulan Pemutakhiran Halaman 2

C. Tata cara Pengisian Formulir Penilaian Mandiri Standar Data Statistik

Secara umum formulir penilaian mandiri diisi dengan dengan memberikan tanda ceklist () pada kolom jawaban [Ya/Ada] ataupun kolom jawaban [Tidak] pada untuk setiap pertanyaan dalam formulir. Kolom keterangan diisi jika terdapat keterangan tambahan ataupun informasi yang perlu diketahui atau hal-hal khusus yang ingin disampaikan ke walidata ataupun pembina data.

1. Identifikasi Standar Data Statistik

- a. Untuk menjawab pertanyaan ini produsen data/walidata harus terlebih dahulu melakukan pencarian pada database pada portal atau media tertentu apakah standar data statistik yang diusulkan/dimutakhirkan sudah terdapat pada list database yang standar data statistik telah ada atau telah ditetapkan dan dipublikasikan oleh pembina data. Berikan tanda ceklist () pada kolom jawaban Ya/Ada atau Tidak. Dan berikan keterangan yang akan ditambahkan.

Contoh keterangan:

Sudah melakukan konsultasi dengan BPS Provinsi Standar data statistik yang dimaksud tidak ditemukan

- b. Berikan tanda ceklist () pada kolom Ya/ Ada jika standar data statistik yang diajukan/ dimutakhirkan berasal dari referensi standar data statistik tidak lintas instansi. Atau berikan tanda ceklist () kolom Tidak jika standar data statistik berasal dari sumber referensi lainnya.

Contoh isian keterangan:

Standar data statistik dari kementerian pertanian

Standar data statistik dari World Health Organization (WHO)

- c. Berikan tanda ceklist () sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan.

Contoh isian keterangan:

Sudah digunakan dalam Survei Pendapatan Nelayan 2018 di

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Baru akan digunakan pada tahun depan

2. Penentuan Cakupan Data

- a. Berikan tanda ceklist () pada kolom Ya/ Ada jika standar data statistik yang diajukan/ dimutakhirkan berlaku lintas instansi.

Contoh isian keterangan:

Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pengguna data

Hanya digunakan untuk Kementerian Kesehatan

- b. Berikan tanda ceklist () pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Digunakan pada Dinas Perikanan Provinsi Banten

Bappeda provinsi maupun kabupaten memanfaatkannya

- c. Berikan tanda ceklist () pada kolom jawaban yang sesuai.

Wajib memberikan keterangan pada pertanyaan ini baik yang membubuhkan tanda ceklist () pada kolom Ya/ Ada maupun pada kolom Tidak.

Contoh isian keterangan:

Termasuk dalam sektor ekonomi

Bisa digunakan dalam sektor ekonomi maupun sosial

3. Kelengkapan Komponen Standar Data Statistik

- a. Berikan tanda ceklist () pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Konsep dari indikator

Konsep dari variabel

- b. Berikan tanda ceklist () pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Definisi yang digunakan mencakup cara perhitungannya Definisi menjelaskan operasional petugas di lapangan

- c. Berikan tanda ceklist () pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Klasifikasi berdasarkan jenis pendapatan Klasifikasi berdasarkan jenis pengeluaran

- d. Berikan tanda ceklist () pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Ukuran panjang Ukuran volume

- e. Berikan tanda ceklist () pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

Dalam meter Dalam kubik

- f. Berikan tanda ceklist () pada kolom jawaban yang sesuai.

Contoh isian keterangan:

*Rujukan internasional dari WHO
Dari UUNo.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*

4. Pemanfaatan Data

Isikan dengan jelas dan lengkap nama Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dan lokasi kedudukannya.

Contoh Penulisan:

Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perindustrian RI Dinas Transportasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Transportasi Kota Bekasi, Dinas Transportasi Kota Bogor

**FORMULIR PENILAIAN MANDIRI
STANDAR DATA STATISTIK**

	Ya/Ada	Tidak	Keterangan
LJ Identifikasi; Standar Data Statistik			
a. Apakah standar data statistik sudah merujuk standar data statistik yang ditetapkan oleh pembina data statistik?			
b. Apakah standar data statistik merujuk standar data statistik tidak lintas instansi?			
c. Apakah standar data statistik sudah pernah digunakan dalam kegiatan sensus dan/atau survei sebelumnya?			
LI Penentuan Cakupan Data			
a. Apakah data statistik berlaku lintas kementerian/ lembaga/ dinas/ instansi?			
b. Apakah pemanfaatan data statistik hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sendiri?			
c. Apakah data statistik dapat dikelompokkan ke dalam minimal satu sektor ekonomi/ sosial/ pertanian?			
3. Kelengkapan Komponen Standar Data Statistik			
a. Konsep			
b. Definisi			
c. Klasifikasi			
d. Ukuran			
e. Satuan			
f. Dasar Rujukan			

4. Pemanfaatan Data

Sebutkan dengan lengkap dan jelas nama K/L/D/I
(Kab/ Kota/ Provinsi/ Pusat pengguna data:

Gambar 9. Formulir Penilaian Mandiri

BAB VI
INDIKATOR *OUTPUT*

Tersedianya standar data statistik lintas instansi yang digunakan oleh Produsen Data. Standar data statistik tersebut harus tercantum dalam Metadata Baku yang diserahkan ke Walidata Pusat.

BAB VII
PENUTUP

Penerapan standar data statistik mutlak diperlukan untuk lebih menjamin pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari satu data Indonesia. Pelaksanaan standar data statistik diawali dengan identifikasi standar data statistik, proses pengajuan, dan penetapan standar data statistik. Agar petunjuk teknis tentang standar data statistik dapat diimplementasi dengan baik, diperlukan peran serta seluruh pihak baik internal Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah maupun pemangku kepentingan lain. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh elemen termasuk sistem yang telah berjalan di Instansi Pusat dan/ atau Instansi Daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan standar data statistik.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

SUHARIYANTO



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS METADATA STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang

bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan metadata statistik bagi instansi pusat dan/ atau instansi daerah, serta mendukung sistem statistik nasional dan satu data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PETUNJUK TEKNIS METADATA STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
2. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/ dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.
3. Metadata variabel adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/ dokumentasi dari penyusunan suatu variabel, standar ukuran dan satuan yang digunakan, aturan pengisian, bentuk pertanyaan yang digunakan, dan informasi lain yang mendukung dasar pemilihan suatu variabel dalam kegiatan statistik.
4. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/ dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator dalam upaya memberikan pemahaman dan penggunaan secara tepat dari suatu indikator.
5. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
9. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
10. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Struktur yang baku dan format yang baku Metadata Statistik yang berlaku lintas instansi pusat dan/ atau instansi daerah ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik.
- (2) Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik.

- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan Metadata Statistik, Kepala Badan Pusat Statistik dapat membentuk tim Metadata Statistik.

Pasal 3

Petunjuk teknis Metadata Statistik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1092

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PUSAT STATISTIK

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum



Endang Retno Sri Subiyandani

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS METADATA
STATISTIK

PETUNJUK TEKNIS METADATA STATISTIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan bahwa statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. SSN diwujudkan dengan cara membentuk tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. SSN mengandung arti bahwa semua pihak diharapkan mampu menyelenggarakan statistik, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, hingga evaluasi.

Kebutuhan statistik untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman mengenai statistik. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi (KISS) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik guna memenuhi kebutuhan statistik. Kewenangan penyelenggaraan statistik dibagi sesuai pembedangan jenis statistik, yaitu

(i) statistik dasar yang diselenggarakan oleh BPS; (ii) statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bersama BPS, serta (iii) statistik khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat (lembaga, organisasi,

perorangan, atau unsur masyarakat lainnya), baik secara mandiri maupun bersama BPS.

Penyelenggaraan statistik dilakukan dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan statistik harus disertai dengan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan penyelenggaraan statistik. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk metadata.

Selaku inisiator dalam rangka KISS dan pembina data dalam Satu Data Indonesia (SDI), BPS memiliki kewenangan untuk menetapkan struktur dan format yang baku dari metadata serta mengelola metadata tersebut. Dalam pengelolaannya, BPS membagi metadata menjadi metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Metadata kegiatan memuat informasi yang menggambarkan tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik. Metadata variabel memuat informasi mengenai variabel, sedangkan metadata indikator memuat informasi mengenai indikator.

Dalam rangka mengelola metadata, BPS melakukan inventarisasi metadata. Inventarisasi tersebut dilakukan dengan menggunakan Formulir Metadata Statistik. Formulir tersebut terdiri atas Metadata Statistik - Kegiatan (MS-Keg), Metadata Statistik - Variabel (MS-Var), dan Metadata Statistik - Indikator (MS-Ind). Guna memudahkan pemahaman dan pengisian formulir-formulir tersebut, BPS menyusun Pedoman Metadata Statistik yang memuat mekanisme penghimpunan metadata dan tata cara pengisian Formulir Metadata Statistik.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Metadata Statistik adalah:

1. Mendukung perwujudan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
2. Menjelaskan mekanisme penghimpunan metadata kegiatan, variabel, dan indikator.
3. Menjelaskan tata cara pengisian Formulir Metadata Statistik-Kegiatan (MS-Keg), Metadata Statistik-Variabel (MS-Var), dan Metadata Statistik-Indikator (MS-Ind).

C. Manfaat

Metadata yang didokumentasikan dengan baik akan bermanfaat bagi banyak pihak, yaitu:

1. Pembina data

Metadata dapat menjadi alat bagi pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan statistik. Dengan adanya ukuran tersebut, pembina data dapat menentukan program pembinaan statistik yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhan.

2. Produsen data

Metadata dapat menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, serta peningkatan nilai organisasi karena tatakelola informasi yang baik.

3. Walidata

Metadata dapat memudahkan memahami dan pengelolaan data dan informasi sebagai investasi organisasi, dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya. Metadata juga dapat mencegah kesalahan dalam penyampaian data.

4. Pengguna data

Metadata dapat memudahkan memahami data serta mencegah penggunaan dan interpretasi data.

D. Jenis Metadata Statistik

1. Metadata Kegiatan Statistik

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik ini bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir guna mendukung pembangunan nasional. Data statistik dapat diinterpretasikan dengan benar dan tepat jika karakteristik atau atribut dari data tersebut didefinisikan dalam bentuk metadata statistik. Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/ dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tabel 1
Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama kegiatan statistik	Nama yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik disertai dengan tahun kegiatan	Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2018
2	Identifikasi penyelenggara	Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan/ atau pihak yang menjadi pemilik kegiatan	Kemeterian Agama RI
3	Tujuan Pelaksanaan	Narasi yang memberikan penjelasan dari maksud diselenggarakannya suatu kegiatan statistik. Mencakup informasi mengenai hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan statistik yang akan diselenggarakan	Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Perlu penelusuran terkait dengan aspek yang dianggap tidak memuaskan oleh para jemaah haji. Mengetahui dimensi apa saja dari aspek-aspek yang 'tidak

Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
		memuaskan 'yang paling signifikan mempengaruhi tingkat kepuasan jemaah haji
4	Periode pelaksanaan Referensi waktu terlaksananya kegiatan statistik	Agustus - Desember 2018
5	Cakupan wilayah Cakupan wilayah yang menjadi area pelaksanaan kegiatan pengumpulan data	Seluruh wilayah Indonesia
6	Rancangan pengumpulan data/ Metodologi Berisikan informasi umum mengenai metode statistik yang digunakan seperti, - Cara pengumpulan data (sensus, survei, kompilasi produk administrasi) - Tahap pengambilan sampel - Metode pemilihan sampel - Kerangka dan fraksi sampel - Perkiraan <i>sampling error</i> - Unit sampel - Unit observasi - Metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan, data sekunder, lainnya)	Metode sampling yang digunakan adalah <i>four stage sampling</i> dengan sampel probabilitas. Tahap 1 (daftar asrama haji embarkasi Indonesia) Tahap 2 (daftar jemaah pendaftaran haji reguler) Tahap 3 (daftar keberangkatan jemaah haji reguler dar asrama haji embarkasi terpilih) Tahap 4 (daftar kepulauan jemaah haji reguler asrama haji embarkasi terpilih) Fraksi sampel: Tahap 1 (dipilih 13 asrama haji)

Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
	<p>Informasi rancangan pengumpulan data digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu kegiatan statistik untuk dilaksanakan</p>	<p>Tahap 2 (dipilih 650 jemaah haji dari 21.087 jemaah haji) Tahap 3 (dipilih 650 jemaah keberangkatan haji reguler) Tahap 4 (dipilih 650 jemaah kepulauan haji reguler)</p>
7	<p>Rancangan Pengolahan Data</p> <p>Berisikan informasi umum mengenai tahapan pemrosesan data setelah tahap pengumpulan data seperti,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode pengolahan - Rencana waktu 	<p>Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia, 2018 melalui tahap pengolahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Editing</i> - <i>Coding</i> - Data Entri/ <i>Scan</i> - Validasi
8	<p>Level Estimasi</p> <p>Informasi mengenai tingkat penyajian hasil yang akan dilakukan apakah nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau level administrasi lainnya</p>	<p>Nasional</p>
9	<p>Analisis</p> <p>Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.</p> <p>1. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan</p>	<p>Analisis deskriptif</p>

Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
	karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana. 2. Analisis inferensia adalah analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel, yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi.	

2. Metadata Variabel Statistik

Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Setiap variabel memiliki konsep dan definisi yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan variabel tersebut. Data yang dikumpulkan dari variabel-variabel kegiatan statistik akan menghasilkan angka-angka statistik maupun indikator. Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga.

Tabel 2
Struktur Baku Metadata Variabel Statistik

EJ	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Kode Kegiatan	Informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar	Kode kegiatan akan diisi oleh petugas verifikasi BPS berdasarkan kode rekomendasi kegiatan yang bersesuaian
2	Nama Variabel	Informasi yang ingin dikumpulkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan statistik	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan
3	Alias	Penamaan lain yang biasanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu variabel.	Misal alias pada penamaan variabel ini di basis data adalah BIRI , maka ketika pengguna mengakses data akan terlihat nama variabel BIRI sebagai identitas variabel "Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan"
4	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Kemudahan
5	Definisi	Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah penilaian yang diberikan oleh jemaah haji yang menjadi responden atas pelayanan petugas haji

Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
		terkait dengan seberapa mudahnya pelayanan diperoleh jemaah. Kemudahan mencakup kemudahan prosedur dan proses pelayanan dari petugas secara umum.
6	Referensi Pemilihan Referensi pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi maupun penyusunan program.	Referensi yang mendasari pemilihan variabel kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan adalah PermenPAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
7	Referensi Waktu	Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.	Selama pelaksanaan ibadah haji
8	Tipe Data	Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman (<i>Integer, Float, Char, String, dsb</i>)	Untuk variabel kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan dengan domain value 1-4, maka tipe data yang cocok adalah "INTEGER"

Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
9	<p><i>Domain Value</i></p> <p><i>Domain value</i> atau klasifikasi merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data statistik atau dibakukan secara luas. Klasifikasi statistik terdiri dari struktur yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional</p>	<p><i>Domain value</i> untuk kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan,</p> <p>1 = tidak puas 2 = kurang puas 3 = puas 4 = sangat puas</p>
10	<p>Kalimat Pertanyaan</p> <p>Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrument penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait.</p>	<p>"Kepuasan mendapatkan pelayanan petugas haji:</p> <p>(1) Tidak Puas (2) Kurang Puas (3) Puas (4) Sangat Puas"</p>

Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
11 Apakah Variabel dapat Diakses Umum	<i>Confidential status</i> merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Opsi jawaban adalah "ya" atau "tidak"	Ya

3. Metadata Indikator Statistik

Indikator variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran / dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memperikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 3
Struktur Baku Metadata Indikator Statistik

EJ	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
1	Nama Indikator	Nama atau istilah yang digunakan untuk menyebut suatu nilai hasil dari penghitungan variabel	Indeks Kepuasan J amaah Haji Indonesia (IKJHI)
2	Konsep	Rancangan, ide, atau pengertian tentang sesuatu	Jamaah Haji
3	Definisi	Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain	Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) adalah perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan. Kriteria kepuasan jemaah haji ditentukan berdasarkan nilai IKJHI yang diperoleh.
4	Interpretasi	Interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi	Terhadap hasil penyusunan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia didapatkan rentang persepsi, IKJHI < 50 = sangat buruk 50 :5 IKHJI < 65 = buruk 65 :5 IKJHI < 75 = sesuai 75 :5 IKJHI < 85. = memuaskan IKJHI 85 = sangat

	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
			<p>memuaskan</p> <p>IKJHI 2018 sebesar 85,23 artinya tingkat pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji sudah sangat memuaskan</p>
5	Metode/Rumus Penghitungan	Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik	$IKHJI = (\text{rata-rata skor tingkat kepuasan}) / (\text{Rata-rata skor tingkat kepentingan}) \times 100$
6	Ukuran	Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan	Indeks
7	Satuan	Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan	(tanpa satuan)
8	Klasifikasi	Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan	<p>Indikator IKJHI dapat disajikan berdasarkan klasifikasi,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kelompok umur 2. jenis kelamin

Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
	kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas	3. pendidikan 4. profesi 5. dimensi pelayanan 6. area pelayanan
9 Publikasi ketersediaan indikator pembangun	Judul publikasi utama yang memuat indikator dimaksud sebagai konten publikasi	Berita Resmi Statistik
10 Nama Indikator Pembangun	Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkategorian dalam penghitungan indikator kapasitas	IKJHI dibangun berdasarkan indikator 1. tingkat kepuasan pelayanan petugas haji 2. tingkat kepuasan pelayanan ibadah 3. tingkat kepuasan pelayanan transportasi bus 4. tingkat kepuasan pelayanan akomodasi 5. tingkat kepuasan pelayanan katering 6. tingkat kepuasan pelayanan kesehatan klater 7. tingkat kepuasan pelayanan lainnya
11 Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Kode kegiatan statistik yang menghasilkan indikator yang dilaporkan	(dikasangkan karena IKJHI adalah indikator kapasitas)

EJ	Nama Atribut	Penjelasan	Contoh
12	Nama Variabel Pembangun	Nama-nama variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai indikator	(dikosongkan karena IKJHI adalah indikator komposit)
13	Level Estimasi	Level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait	Nasional
14	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum	Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak	Ya

BAB II METADATA KEGIATAN STATISTIK

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data. Penyelenggaraan kegiatan statistik merupakan serangkaian proses bisnis sebagai upaya penyediaan dan penyebarluasan data. Proses bisnis yang digunakan oleh BPS mengacu pada proses bisnis standar internasional, yaitu *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM). GSBPM mendefinisikan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik dalam beberapa tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan desain kegiatan, implementasi desain kegiatan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, diseminasi, dan evaluasi kegiatan.

Setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut perlu didokumentasikan sebagai bagian dari penyediaan dan penyebarluasan data. Penyelenggaraan kegiatan statistik didokumentasikan dalam bentuk metadata kegiatan statistik. Dengan demikian, metadata kegiatan statistik memuat informasi yang menggambarkan penyelenggaraan kegiatan statistik pada setiap tahapan GSBPM.

A. Formulir Metadata Statistik - Kegiatan (MS-Keg)

Inventarisasi metadata kegiatan statistik dilakukan dengan menggunakan Formulir Metadata Statistik - Kegiatan (MS-Keg). Informasi setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik tercatat dalam Formulir MS-Keg. Formulir tersebut terdiri atas 8 (delapan) blok, yaitu Penyelenggara, Penanggung Jawab, Perencanaan dan Persiapan, Desain Kegiatan, Desain Sampel, Penjaminan Kualitas, Pengolahan dan Analisis, serta Diseminasi Hasil. Pada bagian awal formulir terdapat informasi umum mengenai kegiatan statistik. Penjelasan selanjutnya merupakan tata cara pengisian Formulir MS-Keg.

1. Umum

a. Judul Kegiatan

Tuliskan judul kegiatan statistik yang dilakukan.

Judul kegiatan minimal memuat cara pengumpulan data, komponen utama kegiatan, cakupan wilayah, dan periode

pelaksanaan. Apabila kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan yang mengalami perubahan judul, maka tuliskan pula judul kegiatan periode sebelumnya.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018



MS-Keg

METADATA STATISTIK KEGIATAN

Judul Kegiatan: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI)	Tahun: 2018
--	-------------

Bagan 1. Contoh pengisian judul kegiatan dan tahun kegiatan

b. Kode Kegiatan

Tuliskan kode kegiatan statistik yang dilakukan. Kolom ini diisi oleh petugas.

Kode kegiatan statistik merupakan suatu kode unik yang diberikan oleh BPS berdasarkan kegiatan statistik yang diselenggarakan dan telah dilaporkan kepada BPS.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Kode KEGIATAN (diisi oleh petugas): (Kosongkan)			
Cara Pengumpulan Data:			
Pencacahan Lengkap	-1	Kompilasi Proou A<lmlllStrasi	-3
Survei	0	cara lain sesuai <1engan perkembangan TI	-4

Bagan 2. Contoh pengisian kode kegiatan

c. Cara Pengumpulan Data

Lingkari salah satu kode sesuai cara pengumpulan data yang digunakan.

Cara pengumpulan data terdiri atas:

1) Pencacahan Lengkap

Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan seluruh unit populasi pada pengambilan sampel tahap terakhir untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

2) Survei

Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

3) Kompilasi Produk Administrasi

Cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah, swasta, dan atau masyarakat.

4) Cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas): (Kosongkan)			
Cara Pengumpulan Data:			
Pencacahan Lengkap	- 1	Kompilasi Produk Administrasi	- 3
Survei	- 2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	- 4

Bagan 3. Contoh pengisian cara pengumpulan data

d. Sektor Kegiatan

Lingkari salah satu kode sesuai dengan sektor kegiatan statistik yang dilakukan.

Sektor kegiatan merujuk pada *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), yaitu:

- | | |
|--|--|
| 1. Pertanian dan Perikanan | 12. Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan |
| 2. Demografi dan Kependudukan | 13. Ketenagakerjaan |
| 3. Pembangunan | 14. Neraca Nasional |
| 4. Proyeksi Ekonomi | 15. Indikator Ekonomi Bulanan |
| 5. Pendidikan dan Pelatihan | 16. Produktivitas |
| 6. Lingkungan | 17. Harga dan Paritas Daya Beli |
| 7. Keuangan | 18. Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar |
| 8. Globalisasi | 19. Perwilayahan dan Perkotaan |
| 9. Kesehatan | 20. Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten |
| 10. Industri dan Jasa | 21. Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan |
| 11. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 22. Transportasi |

Sektor Kegiatan:			
Pertanian dan Perikanan	- 1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	- 12
Demografi dan Kependudukan	- 2	Ketenagakerjaan	- 13
Pembangunan	- 3	Neraca Nasional	- 14
Proyeksi Ekonomi	- 4	Indikator Ekonomi Bulanan	- 15
Pendidikan dan Pelatihan	- 5	Produktivitas	- 16
Lingkungan	- 6	Harga dan Paritas Daya Beli	- 17
Keuangan	- 7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	- 18
Globalisasi	- 8	Perwilayahan dan Perkotaan	- 19
Kesehatan	- 9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	- 20
Industri dan Jasa	- 10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	- 21
Teknologi Informasi dan Komunikasi	- 11	Transportasi	- 22

Bagan 4. Contoh pengisian sektor kegiatan

- e. Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?

Lingkari kode 1 jika mendapatkan rekomendasi atau kode 2 jika tidak mendapatkan rekomendasi. Jika mendapatkan rekomendasi, tuliskan identitas rekomendasi pada tempat yang disediakan.

Sebagaimana tercantum dalam PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setiap penyelenggara statistik sektoral yang akan melakukan survei, wajib memberitahukan rencana survei kepada BPS, mengikuti rekomendasi survei dari BPS, dan melaporkan hasil survei kepada BPS. Survei statistik sektoral yang telah mendapatkan rekomendasi survei dari BPS akan memiliki identitas rekomendasi.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?	
Ya	- 1
Tidak	- 2
Jika "Ya", Identitas Rekomendasi: 3.90.2.08.17.00.00.00.000.D101	

Bagan 5. Contoh pengisian nomor rekomendasi

2. Penyelenggara

- a. Instansi Penyelenggara

Tuliskan nama instansi penyelenggara kegiatan statistik, yaitu nama kementerian/lembaga/ organisasi perangkat daerah.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

I. PENYELENGGARA	
1.1. Instansi Penyelenggara:	Kementerian Agama RI

Bagan 6. Contoh pengisian nama instansi penyelenggara

b. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Tuliskan alamat lengkap instansi penyelenggara kegiatan statistik, meliputi alamat, nomor telepon, nomor faksimile, dan *e-mail*.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:	Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710		
Telepon	: (+6221) 3811679	Faksimile	: -
E-mail	: pinmas@kemenag.go.id		

Bagan 7. Contoh pengisian alamat instansi penyelenggara

3. Penanggung Jawab

a. Unit Eselon Penanggung Jawab

Tuliskan unit kerja penanggung jawab kegiatan statistik setingkat eselon 1 dan eselon 2.

Penanggung jawab adalah pihak yang menjadi koordinator utama penyelenggaraan kegiatan statistik.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

II. PENANGGUNG JAWAB	
2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab	
Eselon 1	: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Eselon 2	: Direktur ...

Bagan 8. Contoh pengisian penanggung jawab kegiatan

b. Penanggung Jawab Teknis jika dari instansi penyelenggara, tuliskan setingkat eselon 3)

Tuliskan penanggung jawab teknis kegiatan statistik, meliputi jabatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, dan e-mail. Jika penanggung jawab teknis berasal dari instansi penyelenggara, maka tuliskan setingkat eselon 3.

Penanggung jawab teknis adalah pihak yang menjadi koordinator teknis penyelenggaraan kegiatan dan memahami penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Penanggung jawab teknis dapat berasal dari instansi penyelenggara atau pihak ketiga (konsultan atau instansi lain).

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

2.2. Penanggung Jawab Teknis (jika dari instansi penyelenggara, tuliskan setingkat eselon 3)	
Jabatan	: Kepala ...
Alamat	: ...
Telepon	: ...
E-mail	: ...
Faksimile	: ...

Bagan 9. Contoh pengisian penanggung jawab kegiatan

4. Perencanaan dan Persiapan

a. Latar Belakang Kegiatan

Tuliskan latar belakang penyelenggaraan kegiatan statistik.

Latar belakang adalah ide dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman mengenai kegiatan statistik apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN
3.1. Latar Belakang Kegiatan: Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengamanahkan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara berkelanjutan, yang meliputi aspek Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan bagi Jemaah Haji. Konsekuensi dari UU tersebut adalah Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) perlu terus meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji melalui manajemen penyelenggaraan haji yang tepat dan efektif. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Dalam rangka peningkatan ibadah haji, pada tahun 2016, Ditjen PHU melakukan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji melalui sepuluh inovasi pelayanan. Kesepuluh inovasi layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah sehingga dapat dengan khusus menjalankan rangkaian ibadah haji selama di tanah suci. Semua layanan dan inovasi yang diberikan pemerintah kepada jemaah haji perlu diketahui efektivitasnya agar dapat dievaluasi dan menjadi bahan perbaikan setiap tahun. Untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan ibadah haji, diperlukan suatu ukuran kuantitatif pelayanan jemaah haji. Untuk itu perlu disusun indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan jemaah haji terhadap layanan yang diterima jemaah selama di tanah suci.

Bagan 10. Contoh pengisian latar belakang kegiatan

b. Tujuan Kegiatan

Tuliskan tujuan penyelenggaraan kegiatan statistik secara ringkas dan jelas.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

3.2. Tujuan Kegiatan: Survei Kepuasan Jemaah Haji (SKJHI) dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari jemaah terkait dengan layanan yang mereka lihat dan rasakan. Data dan informasi ini merupakan salah satu jenis pengukuran kinerja/ <i>performance</i> dari Sistem Manajemen Mutu yang ada di Ditjen PHU yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan SKJHI adalah: 1. Memperoleh angka Indeks Kepuasan Jemaah Haji pada kualitas setiap jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. 2. Memperoleh informasi jenis-jenis layanan yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun ke depan.
--

Bagan 11. Contoh pengisian tujuan kegiatan

c. Rencana Jadwal Kegiatan

Tuliskan tanggal/bulan/tahun dimulainya dan berakhirnya jadwal setiap tahapan dari kegiatan statistik yang akan dilakukan.

Penyelenggaraan kegiatan statistik harus menerapkan proses bisnis yang sesuai dengan kerangka baku dan terminologi proses statistik yang harmonis. Kerangka baku yang diterapkan pada proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik mengacu pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). Dalam GSBPM, metadata perlu ada mulai perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan.

5) Tahapan dalam GSBPM terdiri atas:

Perencanaan mencakup perencanaan kegiatan dan desain,

a) Perencanaan kegiatan secara umum mencakup kegiatan dalam menentukan latar belakang, tujuan, riwayat, perubahan yang terjadi, referensi yang digunakan, klasifikasi/master yang digunakan, sertajadwal kegiatan.

b) Desain (perancangan) mencakup menentukan variabel utama yang akan dikumpulkan; merancang metode pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, merancang pengolahan dan metode analisis yang akan digunakan, serta merancang sistem dan alur kerja. Selain itu, tahapan ini juga termasuk membangun instrumen pengumpulan data dan menguji proses bisnis statistik yang akan digunakan untuk dijadikan finalisasi sistem.

6) Pengumpulan

Pengumpulan data mencakup pembangunan kerangka sampel dan pemilihan sampel, persiapan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan proses pengumpulan data.

7) Pemeriksaan

Pengolahan data mencakup integrasi data, klasifikasi dan pengkodean, pemeriksaan dan validasi, menentukan turunan variabel baru, menghitung penimbang, melakukan

estimasi dan agregasi, serta melakukan finalisasi data set/ data mikro.

- 8) **Penyebarluasan**
 - a) Analisis, merupakan kegiatan memeriksa hasil akhir pengolahan data serta mempelajari data tersebut dengan lebih mendalam. Hasil tersebut digunakan untuk menafsir dan menjelaskan output menggunakan metode analisis statistik yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya.
 - b) Diseminasi hasil, merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian hasil kegiatan berupa data dan informasi kepada pengguna, baik dalam bentuk tabulasi, infografis, maupun publikasi tercetak atau digital.
 - c) Evaluasi, merupakan kegiatan untuk mendapatkan masukan terkait penyelenggaraan kegiatan statistik secara keseluruhan. Masukan tersebut diolah menjadi sebuah laporan evaluasi yang mencatat setiap permasalahan dan rekomendasi solusinya. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membentuk dan menyepakati rencana tindak lanjut.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:		Awal (tgl/bln/thn)	Akhir (tgl/bln/thn)
A. Perencanaan			
1. Perencanaan Kegiatan		s.d.	
2. Desain		s.d.	
B. Pengumpulan			
3. Pengumpulan Data		s.d.	
C. Pemeriksaan			
4. Pengolahan Data		s.d.	
D. Penyebarluasan			
5. Analisis		s.d.	
6. Diseminasi Hasil		s.d.	
7. Evaluasi		s.d.	

Bagan 12. Contoh pengisian tahap kegiatan statistik

d. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Tuliskan nama variabel {karakteristik} yang dikumpulkan beserta konsep, definisi, dan referensi waktunya.

Variabel (karakteristik) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penyelenggara kegiatan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Misal: Jenis Pekerjaan, Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan, dll.

Setiap variabel yang dibentuk untuk mendapatkan tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan harus memiliki konsep dan definisi yang jelas serta dilengkapi dengan referensi waktu (periode enumerasi).

Referensi waktu (periode enumerasi) adalah batasan waktu pada variabel yang ditanyakan dari waktu pelaksanaan survei. Misal: suatu variabel disurvei untuk kondisi pada setahun yang lalu, maka periode enumerasi adalah setahun yang lalu.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)
1	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan	Kemudahan	Penilaian yang diberikan oleh jemaah haji yang menjadi responden atas pelayanan petugas haji terkait dengan seberapa mudahnya pelayanan diperoleh oleh jemaah. Kemudahan yang dimaksud mencakup kemudahan prosedur dan proses pelayanan dari petugas secara umum.	Selama pelaksanaan ibadah haji
2	Kepuasan terhadap kesopanan petugas	Kesopanan	Nilai kepuasan dari jemaah haji yang menjadi responden survei terkait dengan sikap sopan petugas dalam memberikan pelayanan. Sikap sopan yang dimaksud terkait dengan petugas pelayanan saat memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama proses pelaksanaan ibadah.	Selama pelaksanaan ibadah haji
dst	dst	dst	dst	dst

Bagan 13. Contoh pengisian daftar variabel yang akan dikumpulkan

5. Desain Kegiatan

a. Kegiatan ini dilakukan

Lingkari salah satu kode sesuai dengan perulangan kegiatan statistik.

Perulangan kegiatan terdiri atas:

1) Hanya sekali

Jika kegiatan dilakukan hanya sekali atau baru dilakukan dan tidak ada rencana dilakukan kembali pada periode berikutnya atau kegiatan yang bersifat ad hoc.

2) Berulang

Jika kegiatan direncanakan dilakukan kembali pada periode berikutnya, merupakan kegiatan rutin, atau sudah beberapa kali dilakukan.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

IV. DESAIN KEGIATAN			
4.1. Kegiatan ini dilakukan:			
Hanya sekali	- 1 → langsung ke R.3.3.	Berulang	<input checked="" type="radio"/> -2

Bagan 14. Contoh pengisian frekuensi kegiatan

b. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan

Lingkari salah satu kode sesuai dengan frekuensi penyelenggaraan kegiatan statistik.

Frekuensi penyelenggaraan merupakan periode waktu penyelenggaraan kegiatan statistik.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:			
Harian	- 1	Empat Bulanan	- 5
Mingguan	- 2	Semesteran	- 6
Bulanan	- 3	Tahunan	<input checked="" type="radio"/> - 7
Triwulanan	- 4	> Dua Tahunan	- 8

Bagan 15. Contoh pengisian frekuensi kegiatan

c. Tipe Pengumpulan Data

Lingkari salah satu kode sesuai dengan tipe pengumpulan data yang digunakan.

Tipe pengumpulan data mencakup cara pengumpulan dan analisis data yang akan dilakukan, apakah dalam satu waktu atau lebih dari satu waktu. Penentuan pilihan dimensi waktu sangat tergantung dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Tipe pengumpulan data terdiri atas:

1) *Longitudinal panel*

Pengumpulan data beberapa variabel pada periode waktu tertentu pada kelompok sampel yang sama untuk mengetahui perubahan kondisi atau hubungan dari populasi yang diamatinya dalam periode waktu yang berbeda. Pengumpulan data *longitudinal panel* meliputi:

- 2) *Panel studies*: pengumpulan data sejumlah individu yang sama pada interval waktu yang tetap.

Contoh: pengumpulan data pasien rumah sakit setiap bulan.

- 3) *Cohort studies*: pengumpulan data sejumlah individu untuk kategori yang sama pada interval waktu yang tetap.

Contoh: pengumpulan data dari beberapa orang yang lahir pada tahun yang sama (*birth cohort*), pengumpulan data dari beberapa orang yang lulus pada tahun yang sama.

- 4) *Cross Sectional*

Pengumpulan data beberapa variabel pada satu waktu untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lain pada satu waktu tersebut.

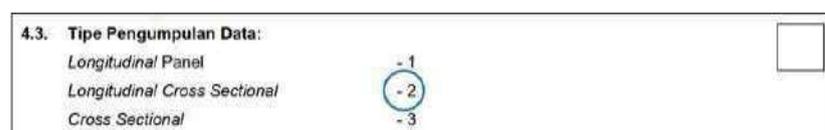
Contoh: pengumpulan data hasil pelayanan beberapa instansi tahun 2019.

- 5) *Cross Sectional dan Longitudinal Panel*

Pengumpulan data beberapa variabel pada periode waktu tertentu untuk mengetahui hubungan satu variabel dengan variabel lain dan perubahan variabel tersebut dari populasi yang diamatinya dalam periode waktu yang berbeda.

Contoh: pengumpulan data pasien rumah sakit setiap bulan dengan rincian penyakitnya serta data pendukung lain.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018



Bagan 16. Contoh pengisian tipe pengumpulan data

d. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data

Lingkari salah satu kode sesuai dengan cakupan wilayah pengumpulan data.

Cakupan wilayah pengumpulan data kegiatan di seluruh kabupaten/kota adalah penyelenggaraan kegiatan statistik dilakukan di semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Jika ada satu kabupaten/kota yang tidak mendapatkan sampel, maka sudah diartikan bahwa cakupan wilayah pengumpulan data adalah sebagian kabupaten/kota.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:	<input type="checkbox"/>
Seluruh Wilayah Indonesia	- 1 → langsung ke R.4.6.
Sebagian Wilayah Indonesia	- 2

Bagan 17. Contoh pengisian cakupan wilayah

- e. Jika "sebagian wilayah Indonesia" (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan

Tuliskan nama provinsi dan nama kabupaten/kota yang dicakup sesuai dengan kode yang terisi pada Rincian 4.4. Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi, dapat menggunakan kertas tambahan.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

4.5. Jika "sebagian wilayah Indonesia" (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan:		
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
	Tidak diisi karena R.4.4. berkode 1	

Bagan 18. Contoh pengisian cakupan wilayah

- f. Metode Pengumpulan Data

Lingkari kode sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Boleh memilih lebih dari satu. Jika lainnya, tuliskan metode pengumpulan data yang dimaksud.

Metode pengumpulan data terdiri atas:

- 1) Wawancara

Pengumpulan data melalui tanya jawab antara responden dan petugas kegiatan statistik, baik melalui tatap muka dengan responden secara langsung maupun melalui sarana komunikasi tertentu seperti e-mail atau telepon tanpa tatap muka secara langsung.

- 2) Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)
Cara pengumpulan data yang mempersilakan responden mengisi sendiri kuesioner yang diberikan, tanpa ada petugas yang melakukan wawancara. Kuesioner dapat berupa kuesioner kertas atau kuesioner elektronik dalam website.
- 3) Pengamatan (observasi)
Cara pengumpulan data melalui observasi menyeluruh, tanpa atau dengan wawancara.
- 4) Pengumpulan data sekunder
Cara pengumpulan data melalui data survei lain, atau data registrasi lain, baik diperoleh melalui "jemput bola" maupun laporan dari pihak lain.
- 5) Lainnya
Cara pengumpulan data selain empat cara sebelumnya.
Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

4.6. Metode Pengumpulan Data:	
Wawancara	- 1
Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)	- 2
Pengamatan (observasi)	- 4
Pengumpulan data sekunder	- 8
Lainnya (sebutkan)	- 16

Bagan 19. Contoh pengisian metode pengumpulan data

g. Sarana Pengumpulan Data

Lingkari kode sesuai dengan sarana pengumpulan data yang digunakan. Boleh memilih lebih dari satu. Jika lainnya, tuliskan sarana pengumpulan data yang dimaksud.

Sarana pengumpulan data adalah alat bantu (media) yang dipilih dan digunakan oleh penyelenggara kegiatan statistik dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Sarana pengumpulan data terdiri atas:

1) *Paper-assisted Personal Interviewing* (PAPI)

Teknik ini menggunakan media kertas. Responden menjawab pertanyaan yang diajukan selama pertemuan tatap muka atau wawancara langsung (*face-to-face*). Hasil yang diperoleh selanjutnya dikodifikasi dan direkam ke dalam *dababase*.

2) *Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)*

Teknik ini dilakukan dengan cara responden menjawab pertanyaan pewawancara selama wawancara langsung (face-to-face), tapi pertanyaan dan daftar jawaban akan ditampilkan pada perangkat multimedia. Teknologi ini mendukung pemantauan durasi wawancara dan presentase dari konten multimedia

3) *Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)*

Teknik yang melibatkan penggunaan perangkat lunak komputer yang dirancang khusus untuk melakukan wawancara melalui telepon. Pewawancara mengajukan pertanyaan satu per satu selama wawancara per telepon dan memberikan checklist pada kuesioner atau mendokumentasikan jawaban responden. Jawaban akan dimasukkan seketika ke dalam database.

4) *Computer Aided Web Interviewing (CAWI)*

Teknik yang menggunakan kuesioner *online* yang diselesaikan oleh responden menggunakan komputer atau perangkat lain yang terhubung ke internet. Jawaban akan terekam secara instan ke dalam database.

5) *Mail*

Sarana pengumpulan data melalui surat, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.

6) *Lainnya*

Sarana pengumpulan data selain lima cara sebelumnya.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

4.7. Sarana Pengumpulan Data:		
<i>Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)</i>	- 1	<input type="checkbox"/>
<i>Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)</i>	- 2	
<i>Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)</i>	- 4	
<i>Computer Aided Web Interviewing (CAWI)</i>	- 8	
<i>Mail</i>	- 16	
Lainnya (sebutkan)	- 32	

Bagan 20. Contoh pengisian sarana pengumpulan data

h. Unit Pengumpulan Data

Lingkari kode sesuai dengan unit pengumpulan data yang digunakan. Boleh memilih lebih dari satu. Jika lainnya, tuliskan unit pengumpulan data yang dimaksud.

Unit pengumpulan data adalah unit pengamatan yang digunakan pada pengumpulan data.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

4.8. Unit Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>
Individu	-1	
Rumah tangga	-2	
Usaha/perusahaan	-4	
Lainnya (sebutkan)	-8	

Bagan 21. Contoh pengisian unit pengumpul data

6. Desain Sampel

Desain Sampel diisi hanya jika cara pengumpulan data adalah survei sebagian.

a. Jenis Rancangan Sampel

Lingkari salah satu kode sesuai jenis rancangan sampel yang digunakan.

Jenis rancangan sampel terdiri atas:

1) *Single Stage/Phase*

Jenis rancangan sampel dengan pengambilan sampel hanya satu tahap, yaitu langsung pada unit populasi.

2) *Multi Stage/Phase*

Jenis rancangan sampel dengan pengambilan sampel melalui dua tahap atau lebih. Metode pemilihan sampel pada masing-masing tahap bisa sama atau berbeda.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

V. DESAIN SAMPEL	
Diisi jika cara pengumpulan data adalah survei sebagian	
5.1. Jenis Rancangan Sampel:	
<i>Single Stage/Phase</i>	-1
<i>Multi Stage/Phase</i>	-2

Bagan 22. Contoh pengisian jenis rancangan sampel

b. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir

Lingkari salah satu kode sesuai metode pemilihan sampel yang digunakan pada tahap terakhir.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Bagan 23. Contoh pengisian metode pemilihan sampel

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:		<input type="checkbox"/>
Sampel Probabilitas	- 1 → ke R.5.3.a	
Sampel Nonprobabilitas	- 2 → ke R.5.3.b	

Metode pemilihan sampel terdiri atas:

5.3. Jika "sampel probabilitas" (R.5.2. berkode 1), Metode yang Digunakan:		<input type="checkbox"/>
Simple Random Sampling	-1	} → ke R.5.4
Systematic Random Sampling	-2	
Stratified Random Sampling	-3	
Cluster Sampling	-4	
Multi Stage Sampling	-5	
Jika "sampel nonprobabilitas" (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan:		
Quota Sampling	-6	} → ke R.5.7
Accidental Sampling	-7	
Purposive Sampling	-8	
Snowball Sampling	-9	
Saturation Sampling	-10	

Bagan 24. Contoh pengisian metode pemilihan sampel

1) Sampel probabilitas(R.4.2. berkode 1)

Metode pemilihan sampel dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

a) *Simple random sampling*

Simple random sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Metode ini digunakan untuk mendapatkan sampel langsung pada unit sampel. Dengan demikian, setiap unit sampel sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya.

Simple Random Sampling dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen. Metode tersebut dapat digunakan jika jumlah unit sampel dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan undian, ordinal, atau tabel bilangan random.

b) *Systematic random sampling*

Systematic sampling adalah metode pengambilan sampel dengan mengurutkan unit sampel kemudian menentukan k atau interval. Pemilihan sampel dilakukan dengan unit sampel ke- k , $2k$, dan seterusnya.

c) *Stratified random sampling*

Stratified sampling biasa digunakan pada populasi yang mempunyai unit sampel yang bertingkat atau berkelompok. Metode ini digunakan jika populasi tidak homogen dan ingin membuat generalisasi untuk sub- populasi.

d) *Cluster sampling*

Cluster Sampling adalah metode pemilihan sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Metode ini didasarkan pada gugus atau cluster. Metode *cluster sampling* digunakan jika catatan lengkap tentang semua anggota populasi tidak diperoleh serta keterbatasan biaya dan populasi geografis elemen-elemen populasi berjauhan.

e) *Multi stage sampling*

Multistage sampling adalah cara pengambilan sampel dengan menggunakan kombinasi dari metode pengambilan sampel yang berbeda.

2) Sampel non probabilitas

Metode pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang tidak sama bagi setiap unit populasi untuk dipilih sebagai sampel atau sampel tidak dipilih secara acak. Unit populasi yang terpilih menjadi sampel dapat disebabkan kebetulan atau faktor lain yang sudah direncanakan.

c. Jika "sampel nonprobabilitas" (R.4.2. berkode 2), Metode yang Digunakan:

Lingkari salah satu kode sesuai jenis rancangan sampel nonprobabilitas yang digunakan pada pemilihan sampel tahap terakhir.

Sampel nonprobabilitas terdiri atas:

1) *Quota sampling*

Metode penetapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok (besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dahulu). Contoh: Dalam Survei Kepuasan Masyarakat ditentukan kuota sampel untuk setiap layanan adalah 5 sampel, maka diambil 5 responden pada setiap layanan sebagai sampel.

2) *Accidental sampling*

Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja (kebetulan ditemui, kebetulan datang, dll.). Sampel diambil tanpa sistematika tertentu. Contoh: Dalam Survei Kebutuhan Data, customer yang datang datang meminta data otomatis terpilih sebagai responden

3) *Purposive Sampling*

Teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu, disebut juga judgement sampling. Reponden dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut mampu memberi informasi yang benar. Contoh : survei tentang COVID-19 memilih penderita yang hanya batuk pilek demam saja sebagai respondennya.

4) *Snowball sampling*

Teknik pengambilan sampel berantai, sehingga yang pada mulanya berjumlah sedikit tetapi semakin lama semakin banyak kemudian berhenti sampai informasi yang didapatkan dinilai cukup. Informasi mengenai responden berikutnya diperoleh dari responden sebelumnya. Teknik ini diterapkan jika responden sulit untuk diidentifikasi. Contoh : Dalam survei mengenai penderita Coronavirus didapatkan dari orang yang melakukan kontak dengan penderita yang sebelumnya diwawancara sebagai responden.

5) *Saturation sampling*

Teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, ini syaratnya populasi tidak banyak, atau peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan sangat kecil. Contoh : Dalam suatu survei untuk mengetahui minat baca pegawai Dinas Kesehatan, dilakukan

saturation sampling dengan menyebar kuesioner ke seluruh pegawai dalam dinas tersebut.

d. Kerangka Sampel Tahap Terakhir

Lingkari salah kode sesuai kerangka sampel yang digunakan pada pemilihan sampel tahap terakhir.

Kerangka sampel adalah daftar semua unit dalam populasi yang akan dijadikan sampel untuk disurvei. Kerangka sampel ini menjadi dasar penarikan sampel. Kerangka sampel terdiri atas:

1) *List frame*

Kerangka sampel yang berisi daftar unit-unit sampel.

2) *Area frame*

Kerangka sampel melalui peta yang mempunyai batas yang jelas, permanen, mudah dikenali, dan tidak terlampaui luas. Elemen yang terdapat dalam area sesuai dengan jenis survei, dapat dijadikan sebagai unit sampel, seperti tempat tinggal dan rumah tangga usaha.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018



Bagan 25. Contoh pengisian pemilihan kerangka sampel tahap akhir

e. Fraksi Sampel Keseluruhan

Tuliskan fraksi sampel keseluruhan.

Fraksi sampling keseluruhan (*overall sampling fraction*) adalah rasio ukuran sampel dengan ukuran populasi atau, dalam konteks stratified sampling, rasio ukuran sampel dengan ukuran strata.

Rumus untuk fraksi pengambilan sampel adalah

$$f = \frac{n}{N} \text{ atau } f = f_1 \times f_2 \times f_3 = \frac{n_1}{N_1} \times \frac{n_2}{N_2}$$

dengan n adalah ukuran sampel dan N adalah ukuran populasi. Keseluruhan fraksi sampel untuk pengambilan sampel dalam beberapa tahap dapat diperoleh dengan mengalikan fraksi

sampel setiap tahap pengambilan sampel. Fraksi sampel ini sangat berhubungan erat dengan weighting.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:

- Tahap 1 (f_1) : 13/N (13 asrama haji embarkasi dipilih dari N asrama haji embarkasi)
- Tahap 2 :
 - Cluster 1 (f_{21}) : 650/21087 (650 orang dipilih dari 21.087 jamaah pendaftaran ibadah haji reguler di Kankemenag Kab/Kota pada 7-22 Mei 2018)
 - Cluster 2 (f_{22}) : 650/K (650 jamaah keberangkatan haji reguler dipilih dari K jamaah keberangkatan haji reguler)
 - Cluster 3 (f_{23}) : 650/P (650 jamaah kepulangan haji reguler dipilih dari P jamaah kepulangan haji reguler)

Maka, fraksi sampel keseluruhan:

- Cluster 1 = $f_1 \times f_{21} = 8450/21087N$
- Cluster 2 = $f_1 \times f_{22} = 8450/NK$
- Cluster 3 = $f_1 \times f_{23} = 8450/NP$

Bagan 26. Contoh pengisian fraksi sampel

f. Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama

Tuliskan nilai perkiraan sampling error untuk variabel utama yang digunakan.

Sampling error adalah penyimpangan yang terjadi karena adanya kesalahan dalam pemakaian sampel. Semakin besar sampel yang diambil maka semakin kecil terjadinya sampling error. Perkiraan sampling error ini biasanya sudah ditentukan ketika dalam tahapan desain sampel dan tingkat kepercayaan yang ditentukan. Jika tingkat kepercayaan yang ditentukan dalam suatu survei adalah 95%, maka perkiraan sampling error adalah 5%.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

5.6: Nilai Perkiraan *Sampling Error* Variabel Utama:
5%

Bagan 27. Contoh pengisian nilai perkiraan *sampling error*

g. Unit Sampel

Tuliskan unit sampel yang digunakan.

Unit sampel adalah unit terkecil dari populasi yang akan diambil sebagai sampel.

Contoh Dalam Susenas, baik estimasi kabupaten/kota maupun estimasi provinsi, unit sampel yang digunakan adalah rumah tangga.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

5.7. Unit Sampel: <ul style="list-style-type: none">• Tahap 1 : Asrama haji embarkasi• Tahap 2:<ul style="list-style-type: none">Cluster 1 : Jamaah pendaftaran ibadah haji reguler di Kankemenag Kab/Kota pada 7-22 Mei 2018Cluster 2 : Jamaah keberangkatan haji regulerCluster 3 : Jamaah kepulangan haji reguler
--

Bagan 28. Contoh pengisian unit sampel

h. Unit Observasi

Tuliskan unit observasi yang digunakan.

Unit observasi adalah unit pengamatan yang digunakan pada pengumpulan data. Unit sampel dan unit observasi dapat sama namun juga dapat berbeda.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

5.8. Unit Observasi: Jamaah haji reguler
--

Bagan 29. Contoh pengisian unit observasi

7. Pengumpulan Data

a. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?

Lingkari kode 1 jika melakukan uji coba (pilot survey) atau kode 2 jika tidak melakukan uji coba (pilot survey).

Uji coba atau pilot survey adalah suatu versi kecil dari survei atau penelitian yang dilakukan sebelum survei yang sesungguhnya. Uji coba ini dapat berupa suatu percobaan pelaksanaan kegiatan (trial run) sebagai salah satu bentuk persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan terkait. Pilot survey dapat memberikan informasi awal mengenai proses dan prosedur penelitian serta menguji metode dan instrumen yang akan digunakan, apakah telah baik dan tepat untuk digunakan.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

VI. PENJAMINAN KUALITAS	
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (<i>Pilot Survey</i>)?	<input type="checkbox"/>
Ya	-1
Tidak	-2

Bagan 30. Contoh pengisian proses penjaminan kualitas

b. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data

Lingkari kode sesuai dengan metode pemeriksaan kualitas pengumpulan data yang digunakan. Boleh memilih lebih dari

satu. Jika lainnya, tuliskan metode pemeriksaan kualitas pengumpulan data yang dimaksud.

Metode pemeriksaan kualitas pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan oleh penyelenggara guna mengoptimalkan kualitas data yang dihasilkan dalam pelenggaraan kegiatan statistik terkait.

Metode pemeriksaan terdiri atas:

1) Kunjungan kembali (revisit)

Pengunjungan ulang lokasi atau obyek penelitian guna melengkapi isian instrumen yang tidak lengkap maupun jika terdapat nilai isian yang dinilai kurang sesuai.

2) Supervisi

Suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak penanggung jawab terhadap pelaksana lapangan. Pengawasan dilakukan untuk perbaikan kualitas pada saat kegiatan berlangsung.

3) Task force

Seseorang atau satuan tim khusus yang dibentuk untuk melakukan pencacahan atau pengumpulan data lapangan, umumnya bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan.

4) Lainnya

Metode pemeriksaan kualitas pengumpulan data selain tiga metode sebelumnya.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:				<input type="checkbox"/>
Kunjungan kembali (revisit)	- 1	Task Force	- 4	
Supervisi	- 2	Lainnya (sebutkan)	- 8	

Bagan 31. Contoh pengisian proses penjaminan kualitas

c. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?

Lingkari kode 1 jika melakukan penyesuaian nonrespon atau kode 2 jika tidak melakukan penyesuaian nonrespon.

Nonrespon merupakan kondisi instrumen atau dokumen pengumpulan data tidak dapat terisi yang umumnya terkait dengan responden atau unit pengumpulan data.

Nonrespon dapat disebabkan antara lain:

- 1) responden tidak dapat ditemui;

- 2) responden melakukan penolakan terhadap kegiatan pencacahan;
- 3) responden tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan;
- 4) responden tidak ditemukan; dan
- 5) daftar isian hilang atau rusak.

Non-respon secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) total nonrespon atau seluruh daftar tidak dapat diisi semua;
- 2) nonrespon sebagian atau terdapat beberapa item pertanyaan yang tidak terisi (isian tidak lengkap).

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	<input type="checkbox"/>
Ya	-1
Tidak	-2

Bagan 32. Contoh pengisian proses penjaminan kualitas

Rincian 6.4 - 6.7 diisi jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1, 2, dan/ atau 4 dilingkari)

d. Petugas Pengumpulan Data

Lingkari salah satu kode sesuai dengan jenis petugas pengumpulan data.

Petugas pengumpulan data adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang dimaksud tidak hanya terkait dengan petugas yang turun ke lapangan untuk melakukan pencacahan dan pengumpulan data langsung, tapi juga petugas yang menjadi asisten atau pendamping dalam pengisian kuesioner secara elektronik, serta petugas pengawas atau supervisor dalam pengumpulan data tersebut.

Petugas pengumpulan data terdiri atas:

1) Staf instansi penyelenggara

Petugas pengumpul data yang merupakan staf dari instansi penyelenggara secara langsung dan bukan petugas rekrutmen di luar instansi penyelenggara.

2) Mitra/tenaga kontrak

Tenaga khusus yang ditunjuk guna melakukan pengumpulan data dan petugas tersebut bukan dari instansi

penyelenggara. Mitra/tenaga kontrak dapat berupa lembaga penelitian atau instansi penyelenggara kegiatan lain yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara atau dapat berupa tenaga kerja personal yang direkrut oleh instansi penyelenggara guna melakukan pengumpulan data.

- 3) Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak
Petugas gabungan antara petugas dari instansi penyelenggara dengan petugas mitra atau kontrak dari luar instansi. Petugas gabungan ini misalnya jika instansi penyelenggara menjadi supervisor, sedangkan petugas pengumpul datanya merupakan tenaga mitra atau kontrak.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI (Pilihan R.4.7. kode 1, 2, dan/atau 4 dilingkari)	
6.4. Petugas Pengumpulan Data:	
Staf instansi penyelenggara	- 1
Mitra/tenaga kontrak	- 2
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak	- 3

Bagan 33. Contoh pengisian informasi petugas pengumpul data

- e. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Lingkari salah satu kode sesuai dengan pendidikan terendah petugas pengumpulan data yang disyaratkan.

Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpulan data adalah syarat pendidikan minimal yang dimiliki oleh petugas pengumpul data dalam kegiatan statistik tersebut. Persyaratan pendidikan terendah ini juga dapat diartikan syarat pendidikan yang ditamatkan oleh petugas pengumpul data. Pendidikan yang tercakup dalam hal ini adalah pendidikan formal yang diikuti, termasuk kejar paket A, kejar paket B, maupun kejar paket C.

Tingkat pendidikan terdiri atas:

- 1) :5 SMP

Tingkat pendidikan terendah mencakup SD dan SMP. SD adalah sekolah dasar atau yang sederajat (sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong). SMP adalah sekolah menengah pertama atau yang sederajat.

2) SMA/SMK

Sekolah menengah atas atau yang sederajat. Tingkat pendidikan SMA/ SMK ini adalah tingkatan sekolah yang ditempuh setelah sekolah menengah pertama.

3) Diploma I/II/III

Diploma I/II/III adalah jenjang pendidikan vokasi, merupakan pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu.

4) Diploma IV/S1/S2/S3

Pendidikan sarjana terapan atau sarjana, baik strata satu, strata dua maupun strata tiga suatu perguruan tinggi atau universitas.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:	
≤ SMP	- 1
SMA/SMK	- 2
Diploma I/II/III	- 3
Diploma IV/S1/S2/S3	- 4

Bagan 34. Contoh pengisian informasi petugas pengumpul data

f. Jumlah Petugas

Tuliskan masing-masing jumlah petugas supervisor/penyelia/pengawas dan pengumpul data/enumerator.

Jumlah petugas merupakan total seluruh petugas pengumpulan data yang terlibat di seluruh wilayah penelitian atau penyelenggaraan kegiatan statistik terkait. Jika kegiatan statistik dilaksanakan di beberapa wilayah maka jumlah petugas adalah seluruh petugas yang terlibat pada masing-masing wilayah.

Petugas kegiatan statistik terdiri atas:

1) Supervisor/penyelia/pengawas

Seseorang yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan, memberikan pengarahan suatu tata cara pelaksanaan, serta menjadi seseorang yang melakukan monitoring atas proses pelaksanaan suatu kegiatan. Supervisor atau pengawas dalam kegiatan statistik dapat memberikan pengawasan pada enumerator berupa petugas

pengumpul data serta program atau teknologi informasi yang digunakan dalam proses pengumpulan data.

2) Pengumpul data/enumerator

Seseorang yang bertugas untuk melakukan pengumpulan data di lapangan secara langsung. Pengumpul data ini mencakup orang yang mengumpulkan data melalui seluruh teknik pengumpulan data misalnya wawancara, pengamatan, pengukuran, maupun observasi.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

6.6. Jumlah Petugas:	
Supervisor/penyelia/pengawasorang
Pengumpul data/enumeratororang

Bagan 35. Contoh pengisian informasi petugas pengumpul data

g. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?

Lingkari kode 1 jika melakukan pelatihan petugas atau kode 2 jika tidak melakukan pelatihan petugas.

Pelatihan petugas merupakan suatu bentuk persiapan pelaksanaan yang dilakukan dengan memberikan pengertian dan pemahaman terkait mekanisme pengumpulan data yang dilakukan kepada seluruh petugas pengumpulan data. Pelatihan petugas tidak harus berupa suatu pelatihan formal mengenai tatacara dan proses pengumpulan data, namun setiap bentuk transfer pemahaman kepada petugas dapat disebut sebagai bentuk pelatihan petugas. Mekanisme pengumpulan data yang termasuk dalam pelatihan ini antara lain pemahaman mengenai jenis data yang dikumpulkan, tatacara pengumpulan data, serta bagaimana teknik pengumpulan data yang dilakukan.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		<input type="checkbox"/>
Ya	-1	
Tidak	-2	

Bagan 36. Contoh pengisian informasi petugas pengumpul data

8. Pengolahan dan Analisis

a. Tahapan Pengolahan Data

Lingkari kode 1 jika melakukan tahapan pengolahan data atau kode 2 jika tidak melakukan tahapan pengolahan data.

Tahapan pengolahan data terdiri atas:

- 1) Penyuntingan (Editing)
Kegiatan pemeriksaan hasil pengumpulan data. Editing dilakukan pada kesalahan dan ketidakkonsistenan pengisian rincian pertanyaan.
- 2) Penyandian (Coding)
Kegiatan pemberian kode-kode pada rincian pertanyaan. Coding ini dilakukan untuk memudahkan entry data.
- 3) Input data (Data entry)
Kegiatan memasukkan data ke dalam "form data entry". Data entry bisa dilakukan dengan aplikasi excel atau aplikasi yang dibuat sendiri.
- 4) Penyahihan/validasi (Validation)
Kegiatan pemeriksaan dan perbaikan data hasil entri data.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS			
7.1. Tahapan Pengolahan Data:			<input type="checkbox"/>
Penyuntingan (<i>Editing</i>)	Ya -1	Tidak -2	<input type="checkbox"/>
Penyandian (<i>Coding</i>)	Ya -1	Tidak -2	<input type="checkbox"/>
Data Entry	Ya -1	Tidak -2	<input type="checkbox"/>
Penyahihan (Validasi)	Ya -1	Tidak -2	<input type="checkbox"/>

Bagan 37. Contoh pengisian tahap pengolahan data

b. Metode Analisis

Lingkari salah satu kode sesuai dengan metode analisis yang digunakan dalam kegiatan statistik ini.

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Metode analisis terdiri atas:

- 1) Analisis deskriptif
Analisis yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data menggunakan metode statistik sederhana, seperti *mean*, *median*, modus, *range*, *variance*, standar deviasi, tabel kontingensi, dan analisis kuadran.
- 2) Analisis inferensia

Analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan pada sampel, yang digunakan untuk digeneralisir ke populasi. Analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data hasil pengolahan menggunakan metode statistik yang lebih mendalam, seperti anova, korelasi, regresi, chi-square, faktor, cluster, dan diskriminan. Tuliskan metode analisis dan metode statistik yang digunakan.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

7.2. Metode Analisis:		<input type="checkbox"/>
Deskriptif	- 1	
Inferensia	- 2	
Deskriptif dan Inferensia	- 3	

Bagan 38. Contoh pengisian metode analisis

c. Unit Analisis

Lingkari kode sesuai dengan unit analisis yang digunakan. Boleh memilih lebih dari satu. Jika lainnya, tuliskan unit analisis yang dimaksud.

Unit analisis adalah unit data yang akan dianalisis.

Unit analisis terdiri atas:

1) Individu

Unit analisis individu dipilih jika kegiatan statistik melakukan analisis pada tingkat individu dari responden.

2) Rumah Tangga

Unit analisis rumah tangga dipilih jika kegiatan statistik melakukan analisis pada tingkat Rumah Tangga dari responden.

3) Usaha/Perusahaan

Unit analisis usaha/perusahaan dipilih jika kegiatan statistik melakukan analisis pada tingkat Usaha/Perusahaan dari responden.

4) Lainnya

Unit analisis selain tiga unit analisis sebelumnya.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

7.3. Unit Analisis:				<input type="checkbox"/>
Individu	-1	Usaha/perusahaan	- 4	
Rumah tangga	-2	Lainnya (sebutkan)	- 8	

Bagan 39. Contoh pengisian unit analisis

d. Tingkat Penyajian Hasil Analisis

Lingkari kode sesuai dengan tingkat penyajian hasil analisis. Boleh memilih lebih dari satu. Jika lainnya, tuliskan tingkat penyajian hasil analisis yang dimaksud.

Tingkat penyajian adalah kemampuan data hasil kegiatan statistik untuk menyajikan data/informasi karakteristik unit sampel/observasi dalam mewakili tingkat daerah tertentu.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:				<input type="checkbox"/>
Nasional	-1	Kecamatan	- 8	
Provinsi	- 2	Lainnya (sebutkan)	- 16	
Kabupaten/Kota	- 4			

Bagan 40. Contoh pengisian tingkat penyajian hasil analisis

9. Diseminasi Hasil

a. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum

Lingkari kode 1 jika produk kegiatan tersedia untuk umum atau kode 2 jika produk kegiatan tidak tersedia untuk umum.

Produk dari kegiatan yang tersedia untuk masyarakat umum merupakan produk data kegiatan statistik yang didiseminasikan/disebarluaskan kepada masyarakat umum.

Bentuk produk data terdiri atas:

1) Tercetak

Produk data yang dipublikasikan dalam bentuk buku / publikasi tercetak.

2) Digital

Produk data yang dipublikasikan dalam bentuk file elektronik/ softcopy publikasi.

3) Data Mikro

Produk data dalam bentuk individual record.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

VIII. DISEMINASI HASIL			
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:			
Tercetak (<i>hardcopy</i>)	Ya -1	Tidak -2	<input type="checkbox"/>
Digital (<i>softcopy</i>)	Ya -1	Tidak -2	<input type="checkbox"/>
Data Mikro	Ya -1	Tidak -2	<input type="checkbox"/>

Bagan 41. Contoh pengisian diseminasi hasil

b. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan

Tuliskan tanggal/bulan/tahun rencana rilis produk kegiatan dari hasil kegiatan statistik yang dilakukan sesuai dengan kode yang pada Rincian 8. 1.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan:			
	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak		12	2018
Digital		12	2018
Data Mikro			

Tidak diisi karena R.8.1. Data Mikro berkode 2

Bagan 42. Contoh pengisian diseminasi hasil

BAB III METADATA STATISTIK VARIABEL

Variabel merupakan istilah yang banyak digunakan dalam suatu penelitian atau kegiatan statistik, termasuk survei. Menurut Sugiyono (2009), variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk dikumpulkan sehingga diperoleh suatu informasi mengenai hal tersebut yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Bentuk dari variabel yang dimaksud dapat berupa atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu. Informasi yang diperoleh tersebut selanjutnya akan diolah sehingga menjadi suatu data.

Pada umumnya, variabel ditentukan sebelum melaksanakan kegiatan statistik yang berkaitan dengan informasi apa yang ingin ditangkap dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, variabel tersebut dituangkan dalam pertanyaan atau suatu isian pada instrumen pengumpulan data yang digunakan. Penentuan variabel tersebut juga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data.

A. Manfaat Metadata Variabel

Secara umum manfaat dari variabel adalah:

1. Mempersiapkan alat atau instrumen serta metode pengumpulan data. Data atau informasi yang telah diolah diperoleh dengan suatu metode dan instrument tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dari variabel yang akan dikumpulkan.
2. Mempersiapkan metode analisis dan pengolahan yang sesuai dan dapat mencapai tujuan dari kegiatan statistik yang dilaksanakan.
3. Jika melakukan analisis yang menggunakan suatu hipotesis awal, variabel ini bermanfaat sebagai sarana dalam menguji hipotesis.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel adalah suatu informasi yang ingin ditangkap dalam menghasilkan data pada kegiatan statistik. Secara sederhana, variabel merupakan inti pokok pada pertanyaan dan/ atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data. Dalam setiap kegiatan statistik yang dilakukan, umumnya terdapat beberapa variabel yang dikumpulkan.

B. Formulir Metadata Statistik - Variabel (MS-Var)

Metadata variabel merupakan suatu metadata yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan informasi yang melekat pada variabel yang dimaksud. Metadata ini memberikan penjelasan mengenai variabel yang dikumpulkan. Secara sederhana, metadata variabel adalah informasi dari variabel.

Metadata variabel diinventarisasi menggunakan Formulir Metadata Statistik- Variabel (MS-Var). Formulir tersebut berupa tabel yang berisi 11 kolom informasi yang berkaitan dengan variabel. Berdasarkan kelengkapan dan standar yang ditetapkan, informasi mengenai variabel terdiri atas (1) Nomor; (2) Nama Variabel; (3) Alias; (4) Konsep; (5) Definisi; (6) Referensi Pemilihan Variabel; (7) Referensi Waktu Variabel; (8) Tipe Data; (9) *Domain Value*; (10) Rule Validasi; (11) Kalimat Pertanyaan; dan (12) Aksesibilitas. Seluruh informasi tersebut merupakan satu kesatuan dari metadata untuk setiap variabel yang dikumpulkan dalam kegiatan statistik.

1. Nama Kegiatan

Tuliskan nama kegiatan statistik yang dilakukan sesuai dengan judul kegiatan pada metadata kegiatan atau MS-Keg.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Kegiatan	Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia 2018
---------------	--

Bagan 43. Contoh pengisian nama kegiatan statistik

2. Kode Kegiatan

Tuliskan kode kegiatan statistik yang dilakukan. Kolom ini diisi oleh petugas.

Kode kegiatan statistik merupakan suatu kode unik yang diberikan oleh BPS berdasarkan kegiatan statistik yang diselenggarakan dan telah dilaporkan kepada BPS.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Kode Kegiatan (diisi oleh petugas)	(kosongkan)
---------------------------------------	-------------

Bagan 44. Contoh pengisian kode kegiatan statistik

3. Penyelenggara

Tuliskan penyelenggara kegiatan statistik, meliputi nama instansi dan unit kerja penanggung jawab.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Penyelenggara	Instansi	: Kementerian Agama
	Unit Kerja Eselon I	: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU)
	Unit Kerja Eselon II	:
	Unit Kerja Eselon III	:

Bagan 45. Contoh pengisian penyelenggara kegiatan statistik

4. Kolom (1) Nomor

Tuliskan nomor urut variabel yang dikumpulkan mulai dari satu sampai dengan sejumlah n variabel yang dikumpulkan pada kegiatan statistik terkait.

Nomor menunjukkan penomoran dari variabel yang dikumpulkan, sehingga memudahkan penghitungan dan pembacaan tabel.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

No.
(1)
1
2
dst

Bagan46. Contoh pengisian kolom nomor

5. Kolom (2) Nama Variabel

Tuliskan nama variabel yang dikumpulkan dalam kegiatan statistik terkait. Setiap satu variabel diisi pada setiap baris yang disediakan. Variabel selanjutnya dituliskan pada baris berikutnya.

Nama variabel merupakan penamaan untuk variabel yang digunakan agar mudah dipahami dan dimengerti pihak lain. Penamaan variabel bisa berupa kata atau susunan kata (lebih dari satu kata) yang memberikan keterangan secara utuh atas informasi yang diharapkan.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Variabel
(2)
Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan
Kepuasan terhadap kesopanan petugas
dst

Bagan 47. Contoh pengisian nama variabel

6. Kolom (3) Alias

Tuliskan alias atau kode dan istilah lain yang digunakan dalam menggambarkan variabel yang dikumpulkan pada kegiatan statistik terkait.

Alias merupakan sebutan lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan nama variabel yang terkait. Alias dapat berupa suatu kode khusus yang diberikan untuk variabel terkait guna mempermudah pengolahan, atau dapat berupa istilah yang lebih singkat dan standar untuk nama variabel yang dinilai terlalu panjang dan sulit dimengerti. Bila terkait dengan data mikro yang dapat diakses publik, alias umumnya digunakan untuk menggambarkan nama variabel dengan menggunakan kode yang pendek dan unik untuk memudahkan proses identifikasi variabel.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Variabel	Alias
(2)	(3)
Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan	BIR5KI
Kepuasan terhadap kesopanan petugas	BIR6KI
dst	dst

Bagan 48. Contoh pengisian alias dari nama variabel

7. Kolom (4) Konsep

Tuliskan konsep atau ide dan gagasan pokok dari variabel yang yang dikumpulkan pada kegiatan statistik terkait berupa kata atau susunan kata yang ringkas.

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, konsep merupakan suatu kesatuan pengertian

tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Berdasarkan pengertian tersebut, konsep merupakan suatu ide atau kesatuan pengertian dari variabel yang dimaksud.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Variabel	Konsep
(2)	(4)
Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan	Kemudahan
Kepuasan terhadap kesopanan petugas	Kesopanan
dst	dst

Bagan 49. Contoh pengisian konsep variabel

8. Kolom (5) Definisi

Tuliskan definisi variabel dengan jelas dan rinci mengenai penjelasan dan syarat serta batasan variabel yang dikumpulkan pada kegiatan statistik terkait.

Definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri dari konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, definisi diartikan sebagai penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data lainnya.

Definisi variabel merupakan penjelasan dari variabel yang dapat memberikan keterangan secara jelas mengenai maksud, batasan, serta ciri-ciri dari variabel tersebut sehingga dapat memberikan keseragaman pemahaman bagi semua orang. Pengisian definisi ini menjadi sangat dekat dengan kata "adalah" atau bersifat penjabaran atau deskripsi secara lengkap dan jelas.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Variabel	Definisi
(2)	(5)
Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan	Kepuasan terhadap kemudahan mendapat pelayanan adalah penilaian yang diberikan oleh jemaah haji yang menjadi responden atas pelayanan petugas haji termaksud dengan sebarang mudahnya pelayanan dan diperoleh oleh jemaah. Kemudahan yang dimaksud mencakup kemudahan prosedur dan proses pelayanan dari petugas secara umum.
Kepuasan terhadap kesopanan petugas	Kepuasan terhadap kesopanan adalah nilai kepuasan dari jemaah haji yang menjadi responden survei terkait dengan sikap sopan petugas dalam memberikan pelayanan. Sikap sopan yang dimaksud terkait dengan petugas pelayanan saat memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama proses pelaksanaan ibadah.
dst	dst

Bagan 50. Contoh pengisian definisi variabel

9. Kolom (6) Referensi Pemilihan

Tuliskan referensi atau sumber rujukan pemilihan yang dikumpulkan pada kegiatan statistik terkait secara singkat dan jelas. Referensi pemilihan variabel merupakan sumber rujukan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penentuan dan penggunaan variabel terkait. Acuan ini dapat berupa acuan internasional agar dapat menjadi bagian dari data internasional, atau referensi dari peraturan serta kebutuhan pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi maupun penyusunan program.

Referensi pemilihan variabel dibutuhkan untuk menegaskan bahwa variabel yang dipilih mempunyai dasar dan landasan yang kuat, sehingga bila ditemukan persamaan variabel pada kegiatan lain dapat dilihat masing-masing referensi yang digunakan.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

No.1	Nama Variabel	Referensi Pemilihan
(1)	(2)	(6)
1	Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan	PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2	Kepuasan terhadap kesopanan petugas	PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
dst	dst	dst

Bagan 51. Contoh pengisian referensi dasar rujukan pemilihan variabel

10. Kolom (7) Referensi Waktu

Tuliskan referensi waktu variabel yang dikumpulkan pada kegiatan statistik terkait secara singkat dan jelas.

Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang menggambarkan nilai variabel yang dikumpulkan. Batasan waktu ini merupakan acuan waktu yang tercakup dalam satuan variabel yang dikumpulkan tersebut. Batasan dan acuan waktu tersebut dapat berupa pada saat pencacahan atau pengumpulan data, seminggu terakhir, sebulan terakhir, dalam satu tahun terakhir, dan lain sebagainya.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Variabel	Referensi Waktu
(2)	(7)
Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan	Selama pelaksanaan ibadah haji
Kepuasan terhadap kesopanan petugas	Selama pelaksanaan ibadah haji
dst	dst

Bagan 52. Contoh pengisian referensi waktu suatu variabel

11. Kolom (8) Tipe Data

Tuliskan tipe data dari variabel yang dikumpulkan pada kegiatan statistik terkait.

Tipe data merupakan jenis tipe data yang biasa dikenal dalam bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan sebagai bentuk klasifikasi data untuk mempermudah kategori dalam bahasa pemrograman. Tipe data ini dapat berfungsi sebagai kontrol serta batasan tersendiri pada penggunaan program serta pemahaman terhadap penentuan tipe data yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Secara umum, tipe data dibagi dalam dua jenis atau dua bagian, yaitu tipe data primitif dan tipe data non primitif. Tipe data primitif merupakan tipe data yang dasar dan paling sering digunakan oleh kebanyakan programmer atau tipe data yang secara default telah

terdefinisi. Tipe data non primitif merupakan tipe data yang tidak secara default terdefinisi dalam suatu bahasa pemrograman atau didefinisikan secara mandiri oleh programmer.

Tipe data terdiri atas:

a. Integer

Salah satu tipe data primitif yang didefinisikan sebagai bilangan bulat. Tipe data ini tidak mendukung isian yang menggunakan huruf, dan harus berupa angka yang bulat tanpa pecahan desimal. Meskipun demikian tipe ini mencakup angka negatif disamping angka positif yang umumnya digunakan.

b. Float

Tipe data yang biasa disebut tipe data bilangan real. Tipe data ini dapat mengenal karakter pecahan atau decimal, atau dapat menyimpan dengan model koma.

c. Char atau Karakter

Tipe data yang biasanya terdiri dari suatu angka, huruf, tanda baca, atau karakter khusus. Dalam bahasa pemrograman tipe data ini tidak memiliki batasan dan biasanya menggunakan tanda baca kutip ganda di depan dan belakang (").

d. String

Tipe data yang terdiri dari kumpulan karakter dengan panjang tertentu. Tipe data ini sering dianggap sebagai tipe data dasar, karena seringnya digunakan dalam suatu program pengolahan.

e. Array

Tipe data komposit yang dapat menyimpan. Tipe ini merupakan bentukan dari kumpulan tipe data yang lain. Penggunaan tipe data ini untuk meringkas jika beberapa tipe data harus digunakan dengan tipe data yang sama.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Variabel	Tipe Data
(2)	(8)
Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan	Integer
Kepuasan terhadap kesopanan petugas	Integer
dst	dst

Bagan 53. Contoh pengisian tipe data suatu variabel

12. Kolom (9) Klasifikasi Isian

Tuliskan klasifikasi isian yang digunakan pada variabel yang dikumpulkan pada kegiatan statistik terkait jika terdapat kategorisasi terhadap variabel tersebut.

Klasifikasi atau daftar kode atau domain nilai merupakan suatu pengkategorian atau pembagian yang berlaku pada variabel terkait jika nilai yang dimaksud dalam variabel tersebut merupakan suatu kategori. Secara sederhana, misalnya, variabel jenis kelamin mempunyai nilai domain laki-laki dan perempuan. Guna memberikan kemudahan dalam pengolahan, nilai domain ini ditransformasi dalam kode-kode atau list code. Sebagai contoh, jenis kelamin laki-laki diberi kode 1 dan jenis kelamin perempuan diberi kode 2.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Variabel	Klasifikasi Isian
(2)	(9)
Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan	1 = tidak puas 2 = kurang puas 3 = cukup puas 4 = puas 5 = sangat puas
Kepuasan terhadap kesopanan petugas	1 = tidak puas 2 = kurang puas 3 = cukup puas 4 = puas 5 = sangat puas
dst	dst

Bagan 54. Contoh pengisian klasifikasi isian suatu variabel

13. Kolom (10) Aturan Validasi

Tuliskan aturan validasi untuk setiap variabel yang dikumpulkan pada kegiatan statistik terkait, baik berupa syarat isian variabel maupun batasan besaran nilai isian variabel.

Aturan validasi (rule validation) dari pengisian variabel merupakan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh variabel terkait, umumnya jika dihubungkan dengan item variabel lain yang dikumpulkan dalam satu kegiatan statistik terkait. Syarat ini, misalnya, berupa pengisian variabel hanya jika variabel lain terisi atau suatu nilai minimal atau maksimal dari isian nilai variabel. Penggunaan aturan validasi berguna untuk mengurangi isian yang tidak sesuai atau error, sehingga dapat menjadi salah satu cara mengurangi kesalahan dalam melakukan pengisian dan input data. Validasi ini umumnya secara terprogram dan otomatis tersaring pada program dan input data yang digunakan sebelum pengolahan data.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Variabel	Aturan Validasi
(2)	(10)
Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan	Harus mengisi salah satu skor tingkat kepuasan (isian tidak boleh kosong)
Kepuasan terhadap kesopanan petugas	Harus mengisi salah satu skor tingkat kepuasan (isian tidak boleh kosong)
dst	dst

Bagan 55. Contoh pengisian aturan validasi yang berlaku pada suatu variabel

14. Kolom (11) Kalimat Pertanyaan

Tuliskan kalimat pertanyaan atau pernyataan dan isian yang digunakan dalam instrumen penelitian untuk mengumpulkan informasi terkait variabel.

Kalimat pertanyaan merupakan kalimat yang digunakan dalam instrument penelitian untuk memperoleh nilai variabel yang diharapkan. Pertanyaan ini umumnya berupa kalimat, baik pertanyaan maupun bukan, yang mudah dipahami oleh seluruh petugas dan responden atau informan untuk isian variabel terkait. Penggunaan bahasa yang lebih sederhana dalam kalimat

pertanyaan menjadi salah satu ciri sehingga nilai variabel dapat dikumpulkan secara tepat.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Variabel	Kalimat Pertanyaan
(2)	(1)
Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan	Kemudahan mendapatkan pelayanan petugas haji
Kepuasan terhadap kesopanan petugas	Kesopanan petugas dalam melayani jamaah haji
dst	dst

Bagan 56. Contoh pengisian kalimat pertanyaan yang digunakan kepada responden untuk mengisi suatu nilai variabel

15. Kolom (12) Apakah Kolom (2) Dapat Diakses Umum?

Jika variabel yang ditulis pada kolom (2) dapat diakses umum, maka tuliskan kode 1. Jika variabel tersebut tidak dapat diakses umum, maka tuliskan kode 2.

Confidential status merupakan status akses terhadap variabel terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Oleh karena itu, jika status masing-masing variabel sudah jelas, maka akan lebih memudahkan interoperabilitas data yang dilakukan.

Confidential status terbagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. Publik

Status yang menyatakan bahwa variabel yang dikumpulkan dapat dipublikasikan atau boleh diakses untuk umum dan tidak bersifat rahasia atau hanya untuk kepentingan peneliti.

- b. *Private* atau rahasia

Status yang menyatakan bahwa variabel yang tidak untuk dipublikasikan atau tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Variabel yang bersifat *private* ini terkait dengan kerahasiaan responden guna menjalankan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjamin kerahasiaan data pribadi dari sumber informasi. Data yang bersifat pribadi misalnya data responden per nama dan alamat

yang merupakan salah satu bagian dari data pribadi yang tidak boleh disebarluaskan.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Variabel	Apakah Kolom (2) Dapat Diakses Umum? Ya -1 Tidak -2
(2)	(12)
Kepuasan terhadap kemudahan mendapatkan pelayanan	1
Kepuasan terhadap kesopanan petugas	1
dst	dst

Bagan 57. Contoh pengisian keterangan akses data suatu variabel

BAB IV METADATA STATISTIK INDIKATOR

Pengertian indikator secara umum adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada sebuah kejadian atau kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa indikator merupakan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga bisa diartikan sebagai setiap ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. World Health Organization (1981) mendefinisikan indikator sebagai variabel yang bisa membantu dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Green (1992), indikator adalah variabel-variabel yang bisa menunjukkan atau mengindikasikan kepada penggunaannya mengenai sesuatu kondisi tertentu, sehingga bisa dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi. Sementara itu, Wilson dan Sapanuchart (1993) menyatakan bahwa indikator merupakan suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi.

Sebuah indikator adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang berasal dari serangkaian fakta yang diamati yang dapat mengungkapkan posisi relatif (misal: suatu negara) di area tertentu. Ketika dievaluasi secara berkala, sebuah indikator dapat menunjukkan arah perubahan di berbagai unit dan melalui waktu. Dalam konteks analisis kebijakan (Brand et al., 2007), indikator berguna dalam mengidentifikasi tren dan menarik perhatian pada isu-isu tertentu. Selain itu, indikator dapat membantu dalam menetapkan prioritas kebijakan dan membuat tolok ukur atau memantau kinerja.

A. Manfaat Indikator

Pada dasarnya, indikator merupakan penanda terjadinya suatu perubahan dalam kejadian atau kegiatan tertentu. Manfaat indikator adalah:

1. Sebagai alat penunjuk adanya perubahan dalam suatu kejadian atau kegiatan.
2. Sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur.
3. Sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubung dengan suatu kegiatan.

4. Sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan.
5. Sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil suatu kegiatan.

B. Syarat Indikator

Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi suatu indikator sering hanya memberi petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan sebagai suatu pandangan (proxy). Dalam menetapkan indikator, terdapat persyaratan yang harus dipertimbangkan. Persyaratan tersebut adalah:

1. *Validity*

Apakah sebuah indikator secara logika mampu mengukur yang "diinginkan"?

2. *Relevance*

Apakah sebuah indikator relevan dan bernilai bagi pengukuran pembangunan?

3. *Predictive*

Apakah sebuah indikator mampu memberikan peringatan dini (early warning) tentang suatu kondisi?

4. *Goal driven*

Apakah sebuah indikator benar-benar mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan?

5. *Coverage*

Apakah sebuah indikator berkaitan dengan isu secara luas atau hanya sebagian kecil wilayah?

6. *Understandable*

Apakah arti dan makna dari sebuah indikator dapat dipahami?
Apakah metode, interpretasi, dan tampilan dapat dimengerti?

7. *Measurable*

Apakah sebuah indikator dapat diukur dan diperoleh secara mudah?

8. *Reliability*

Apakah sebuah indikator reliabel dan dapat digunakan untuk mengukur pembangunan?

9. *Accessibility/Availability*

Apakah informasi tentang indikator yang diperlukan tersedia?

10. *Timely*

Apakah sebuah indikator dapat memberikan umpan balik secara tepat waktu bagi pengambil keputusan?

11. *Responsive*

Apakah perubahan tentang apa yang diteliti dapat dideteksi dalam pengukuran?

C. Jenis Indikator

Indikator dapat dibedakan berdasarkan kategorinya. Ada yang dibedakan menjadi indikator kuantitatif dan kualitatif, ada pula yang dibedakan menjadi indikator global dan lokal. Selain itu, ada yang dibedakan menjadi indikator langsung dan tidak langsung, serta ada yang dibedakan menjadi indikator input, proses, output, outcome, dan dampak. Perbedaan indikator tersebut didasarkan pada cakupan data yang digunakan dan keperluan dari pengambil kebijakan.

1. Indikator kuantitatif (*quantitative indicators*)

Pada umumnya, indikator dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Dalam perencanaan pembangunan, indikator lebih merujuk pada indikator kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk ukuran angka, besaran, dan satuan tertentu.

2. Indikator kualitatif (*qualitative indicators*)

Indikator ini dapat dikumpulkan melalui teknik pertanyaan yang memerlukan jawaban persepsi dan penilaian dari responden mengenai suatu masalah. Guna memperkaya analisis, indikator kualitatif didampingi dengan indikator kuantitatif yang sengaja dikembangkan untuk mengukur kualitas.

3. Indikator global terstandar (*standardised global indicators*)

Indikator global terstandar adalah indikator yang bersifat umum, seperti Millennium Development Goals (MDGs), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini dapat dibandingkan di semua wilayah (nasional atau internasional).

4. Indikator lokal (*local indicator*)

Indikator lokal merupakan indikator yang dikembangkan hanya untuk mengukur perubahan dalam situasi yang bersifat lokal (khas setempat) dengan tujuan setempat. Pada tempat lain, indikator lokal

mungkin tidak dibutuhkan atau bahkan tidak dapat diperoleh angka indikatornya.

5. Indikator langsung (*direct indicators*)

Indikator yang berkaitan secara akurat dengan hasil di setiap jenjang kinerja yang merupakan ukuran langsung dari keluaran proyek/program.

6. Indikator tidak langsung (*indirect indicator*)/indikator proksi (proxy indikator)

Indikator yang digunakan untuk mengukur perubahan atau hasil saat pengukuran langsung tidak memungkinkan atau tidak layak diperoleh indikatornya, sehingga penggunaan indikator tidak langsung atau proksi lebih memudahkan evaluator untuk menilai.

7. Indikator *input*

Indikator input biasanya langsung merupakan ukuran dari apa yang ingin dilihat.

8. Indikator proses

Indikator proses dimaksudkan untuk mengukur bagaimana sebuah tingkat penyediaan/proses/pelayanan disediakan dalam mencapai hasil.

9. Indikator *output*

Indikator output menunjukkan seberapa besar kuantitas yang dihasilkan

10. Indikator *outcome* (keluaran)

Indikator keluaran merupakan ukuran yang lebih luas dari hasil yang telah dicapai.

11. Indikator dampak (*impact indicators*)

Indikator dampak digunakan untuk mengukur perubahan jangka panjang yang dikumpulkan secara tahunan guna menganalisis pengaruh, kecenderungan, atau perubahan selama beberapa tahun.

Setiap indikator harus mempunyai besaran target yang harus dicapai. Patokan nilai dari suatu indikator (*benchmark*) merupakan suatu standar atau titik rujukan terhadap pencapaian program kerja yang dapat diukur. Selama periode waktu tertentu, suatu indikator dibandingkan dan diukur serta biasanya diuraikan menurut wilayah dan target tertentu.

D. Formulir Metadata Statistik - Indikator (MS-Ind)

Metadata indikator merupakan suatu metadata yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan informasi yang melekat pada indikator yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik. Secara sederhana, metadata indikator adalah informasi dari indikator.

Metadata indikator diinventarisasi menggunakan Formulir Metadata Statistik - Indikator (MS-Ind). Formulir tersebut berupa tabel yang berisi informasi yang berkaitan dengan indikator. Berdasarkan kelengkapan dan standar yang ditetapkan, informasi mengenai indikator terdiri atas (1) Nomor; (2) Nama Indikator; (3) Konsep; (4) Definisi; (5) Interpretasi; (6) Metode / rumus penghitungan; (7) Ukuran; (8) Satuan; (9) Klasifikasi; (10) Indikator komposit; (11) Variabel pembangun; (12) Level estimasi; dan (13) Aksesibilitas. Seluruh informasi tersebut merupakan satu kesatuan dari metadata untuk setiap indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik.

1. Nama Kegiatan

Tuliskan nama kegiatan statistik yang dilakukan sesuai dengan judul kegiatan pada metadata kegiatan atau MS-Keg.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Kegiatan	Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia 2018
---------------	--

Bagan 58. Contoh pengisian nama kegiatan statistik

2. Kode Kegiatan

Tuliskan kode kegiatan statistik yang dilakukan. Kolom ini diisi oleh petugas.

Kode kegiatan statistik merupakan suatu kode unik yang diberikan oleh BPS berdasarkan kegiatan statistik yang diselenggarakan dan telah dilaporkan kepada BPS.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

KodeKegiatan (diisi oleh petugas)	(kosongkan)
--------------------------------------	-------------

Bagan 59. Contoh pengisian kode kegiatan statistik

3. Penyelenggara

Tuliskan penyelenggara kegiatan statistik, meliputi nama instansi dan unit kerja penanggung jawab.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Penyelenggara	Instansi	: Kementerian Agama
	Unit Kerja Eselon I	: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU)
	Unit Kerja Eselon II	:
	Unit Kerja Eselon III	:

Bagan 60. Contoh pengisian penyelenggara kegiatan statistik

4. Kolom (1) Nomor

Tuliskan nomor urut indikator yang dihasilkan mulai dari satu sampai dengan sejumlah n indikator yang dihasilkan pada kegiatan statistik terkait.

Nomor menunjukkan penomoran dari indikator yang dihasilkan, sehingga memudahkan penghitungan dan pembacaan tabel.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

No.
(1)

Bagan 61. Contoh pengisian kolom nomor

5. Kolom (2) Nama Indikator

Tuliskan nama indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait. Setiap satu indikator diisi pada setiap baris yang disediakan. Indikator selanjutnya dituliskan pada baris berikutnya.

Indikator dapat berupa jumlah, rata-rata, persentase, indeks, dan sebagainya. Contoh indikator adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Buta Huruf (ABH), Anak Lahir Hidup (ALH), akses terhadap media informasi, dan sebagainya. Nama variabel pada instrumen pengumpulan data bisa jadi sama dengan nama indikator yang dihasilkan.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI)

Nama Indikator
(2)
Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI)

Bagan 62. Contoh pengisian nama indikator

6. Kolom (3) Konsep

Tuliskan konsep atau ide dan gagasan pokok dari indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait.

Konsep menurut Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi. Sementara itu, Singarimbun dan Effendi (2009) menyatakan bahwa konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Woodruf menyatakan bahwa konsep merupakan sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal yang bisa diterapkan secara merata untuk setiap ekstensinya sehingga konsep membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Konsep
(3)
Jamaah Haji

Bagan 63. Contoh pengisian konsep dari suatu indikator

7. Kolom (4) Definisi

Tuliskan definisi indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait dengan jelas dan rinci agar lebih informatif.

Definisi menurut Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Sementara itu, Solomon (1985) menjelaskan bahwa definisi adalah suatu pernyataan yang memberikan arti pada sebuah kata atau frase. Poespoprodjo dan Gilarso (1999) menjelaskan bahwa definisi merupakan perumusan singkat, padat, jelas dan tepat yang menerangkan 'apa sebenarnya suatu hal itu' sehingga dapat dengan jelas dimengerti dan dibedakan dari semua hal lain.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Definisi
(4)
<p>1. Indeks Kepuasan Jamaah Haji (IKJHI) Perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan. Kriteria kepuasan Jemaah haji ditentukan berdasarkan nilai IKJHI yang diperoleh. Tingkat kepuasan dinilai berdasarkan sikap, keramahan, dan kepedulian (courtesy and empathy), kemudahan memperoleh pelayanan dan dapat dipercaya, akses (access), perlindungan, kesiapan/cepat tanggap & tepat waktu (responsiveness & timelines), bukti nyata (tangible), jaminan dan keamanan (assurance & security), informasi dan komunikasi (information & communication), pembinaan, kemampuan petugas (competence).</p> <p>2. Tingkat Kepuasan Pelayanan Petugas Haji Perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan pelayanan petugas haji terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan pelayanan petugas haji.</p> <p>3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Ibadah Perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan pelayanan ibadah terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan pelayanan ibadah.</p> <p>4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Transportasi Bus Perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan pelayanan transportasi bus terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan pelayanan transportasi bus.</p> <p>5. Tingkat Kepuasan Pelayanan Akomodasi (Hotel/Tenda) Perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan pelayanan akomodasi (hotel/tenda) terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan pelayanan akomodasi (hotel/tenda).</p> <p>6. Tingkat Kepuasan Pelayanan Katering Perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan pelayanan katering terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan pelayanan katering.</p> <p>7. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesehatan Kloter Perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan pelayanan kesehatan kloter terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan pelayanan kesehatan kloter.</p> <p>8. Tingkat Kepuasan Pelayanan Lain-lain Perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan pelayanan lain-lain terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan pelayanan lain-lain.</p>

Bagan 64. Contoh pengisian definisi dari suatu indikator

8. Kolom (5) Interpretasi

Tuliskan interpretasi atau manfaat indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait dengan jelas dan rinci.

Secara umum, interpretasi diartikan sebagai tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi. Menurut Mudji (2005), interpretasi data dalam penelitian kualitatif adalah suatu deskripsi dan ungkapan yang mencoba untuk menggali pengetahuan tentang sebuah data atau peristiwa melalui pemikiran yang lebih mendalam.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Interpretasi
(5)
- IKJHI < 50 : pelayanan masih di bawah standar standar (sangat buruk) - 50 ≤ IKJHI < 65 : pelayanan perlu ditingkatkan (buruk) - 65 ≤ IKJHI < 75 : pelayanan sudah memenuhi standar (sesuai) - 75 ≤ IKJHI < 85 : pelayanan di atas standar (memuaskan) - IKJHI ≥ 85 : pelayanan sudah sangat baik (sangat memuaskan)
Contoh: IKJHI tahun 2018 sebesar 85,23. Artinya, tingkat pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia sudah sangat baik (sangat memuaskan).

Bagan 65. Contoh pengisian interpretasi terhadap suatu nilai indikator

9. Kolom (6) Metode/Rumus Penghitungan

Tuliskan metode/rumus penghitungan indikator dengan jelas. Secara harfiah, metode (*method*) berarti cara. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode atau rumus penghitungan indikator merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Metode/Rumus Penghitungan
(6)
$IKJHI = \frac{\text{(Rata-rata skor tingkat kepuasan)}}{\text{(Rata-rata skor tingkat kepentingan)}} \times 100$
Dengan: - Rata-rata skor tingkat kepuasan yang dimaksud adalah rata-rata skor tingkat kepuasan dari tujuh pelayanan yang diberikan. - Rata-rata skor tingkat kepentingan yang dimaksud adalah rata-rata skor tingkat kepentingan dari tujuh pelayanan yang diberikan.

Bagan 66. Contoh pengisian rumus perhitungan untuk menghasilkan suatu nilai indikator

10. Kolom (7) Ukuran

Tuliskan ukuran yang dipakai dalam penghitungan indikator dengan jelas. Salah satu klausul dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengatur bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Salah satu dari standar data yang harus dipenuhi oleh produsen data adalah ukuran. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Ukuran
(7)
Indeks

Bagan 67. Contoh pengisian ukuran suatu nilai indikator

11. Kolom (8) Satuan

Tuliskan satuan yang dipakai dalam penghitungan indikator dengan jelas. Secara umum, satuan merupakan perbandingan dalam pengukuran atau sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Satuan dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan secara umum, atau sering disebut dengan satuan standar. Sementara itu, satuan tak baku adalah satuan yang digunakan pada wilayah tertentu. Sebagai contoh, pengukuran luas tanah pada satu daerah ada yang menggunakan ukuran meter persegi, langkah, bata, dan sebagainya.

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengatur tentang standar satuan yang harus dipenuhi oleh produsen data. Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Satuan
(8)
(tanpa satuan)

Bagan 68. Contoh pengisian satuan insikator

12. Kolom (9) Klasifikasi Penyajian

Tuliskan klasifikasi penyajian yang digunakan dalam penghitungan indikator dengan jelas.

Salah satu prinsip standar data yang harus dipenuhi oleh produsen data sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2019 tentang SDI adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas. Klasifikasi yang dimaksud pada metadata indikator ini adalah klasifikasi penyajian data. Contoh dari klasifikasi yang dimaksud seperti: data disajikan berdasarkan klasifikasi wilayah, klasifikasi komoditas, klasifikasi lapangan usaha, atau data dapat dikategorikan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dll.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Indikator	Klasifikasi Penyajian
(2)	(3)
Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI)	1. Kelompok umur 2. Jenis kelamin 3. Pendidikan 4. Profesi 5. Dimensi Pelayanan 6. Area Pelayanan

Bagan 69. Contoh pengisian klasifikasi penyajian

13. Kolom (10) Apakah Kolom (2) Indikator Komposit?

Jika indikator yang ditulis pada kolom (2) adalah indikator komposit, maka tuliskan kode 1. Jika indikator tersebut bukan merupakan indikator komposit, maka tuliskan kode 2.

Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi sub-komponen dalam penghitungan indikator komposit. Indikator pembangun dipilih sesuai dengan fenomena yang akan diukur (input, output atau proses), dan bobot yang mencerminkan kepentingan dari disusunnya indikator komposit secara keseluruhan, bukan pada indikator mana yang tersedia.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Apakah Kolom (2) Indikator Komposit?	
Ya	-1
Tidak	-2
(10)	

Bagan 70. Contoh pengisian pembentukan suatu indikator

Kolom (11) - (12) merupakan pertanyaan mengenai indikator pembangun. Kolom tersebut diisi jika indikator yang dihasilkan merupakan indikator komposit (Kolom (10) berkode 1).

14. Kolom (11) Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun

Tuliskan judul publikasi atau URL yang memuat indikator pembangun dengan jelas dan lengkap. Pemberian nama pada publikasi biasanya diambil dari nama kegiatan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan statistik.

Publikasi merupakan pelaksana dari kegiatan penyebaran informasi. Roslan (1994) menjelaskan bahwa publikasi merupakan alat penting baik dalam bauran promosi maupun bauran public relation karena publikasi merupakan salah satu relasi komponen yang cukup berperan banyak untuk menunjang dalam keberhasilan dalam publikasi dan promosi. Sementara itu, Lesly (1992) menjelaskan bahwa publikasi merupakan penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran pada media. Pada proses publikasi tersebut, publikasi dianggap sebagai kreatifitas yang menghasilkan karya yang begitu kreatif dan menyenangkan, namun tak memberikan apa-apa bagi apa yang dipublikasikan. Hal ini berarti kreativitas tersebut merupakan kreativitas untuk mewujudkan dan mencapai tujuan organisasi.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Publikasi Ketersediaan Indikator Pembangun
(11)
Berita Resmi Statistik - Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 1439H/2018M (https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/22/1539/indeks-kepuasan-jemaah-haji-indonesia-tahun-1439h-2018m.html)

Bagan 71. Contoh pengisian sumber publikasi pembangun indikator

15. Kolom (12) Nama Indikator Pembangun

Tuliskan nama indikator pembangun dari indikator yang dihasilkan. Indikator pembangun merupakan suatu indikator yang menjadi subkomponen dalam penghitungan indikator komposit. Indikator pembangun dipilih sesuai dengan fenomena yang akan diukur (input, output, atau proses) dan bobot yang mencerminkan kepentingan dari disusunnya indikator komposit secara keseluruhan, bukan pada indikator mana yang tersedia.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Indikator Pembangun
(12)
1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Petugas Haji
2. Tingkat Kepuasan Pelayanan Ibadah
3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Transportasi Bus
4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Akomodasi
5. Tingkat Kepuasan Pelayanan Katering
6. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesehatan Kloter
7. Tingkat Kepuasan Pelayanan Lain-Lain

Bagan 72. Contoh pengisian nama indikator pembangun

Kolom (13) (15) merupakan pertanyaan mengenai variabel pembangun. Kolom tersebut diisi jika indikator yang dihasilkan bukan merupakan indikator komposit (Kolom (10) berkode 2).

16. Kolom (13) Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun

Tuliskan nama kegiatan statistik yang menghasilkan variabel pembangun. Penamaan kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh K/L/1/OPD biasanya didasarkan pada indikator yang ingin dihasilkan atau sesuai dengan rincian anggaran dalam DIPA atau POK K/L/1/OPD.

Kegiatan statistik menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan Statistik dibagi menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus. Penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik selaku penyedia data statistik dasar. Kegiatan statistik sektoral diselenggarakan oleh Kementerian / Lembaga/ Instansi / Organisasi Perangkat Daerah (K/L/1/OPD), sedangkan kegiatan statistik khusus diselenggarakan oleh universitas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/organisasi masyarakat (Ormas).

Penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh K/L/1/OPD harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan statistik sektoral menurut Peraturan Badan Pusat Statistik No. 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi beberapa tahapan, yaitu: perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun
(13)
Tidak diisi karena kolom 10 berkode 1 (IKJHI adalah indikator komposit)

Bagan 73. Contoh pengisian nama kegiatan statistik

17. Kolom (14) Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun

Tuliskan kode kegiatan statistik penghasil variabel pembangun. Kolom ini diisi oleh petugas.

Kode kegiatan statistik merupakan suatu kode unik yang diberikan oleh BPS berdasarkan kegiatan statistik yang diselenggarakan dan telah dilaporkan oleh K/L/I/OPD.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Kode Kegiatan Variabel Pembangun (diisi petugas)
(14)
Tidak diisi karena kolom 10 berkode 1 (IKJHI adalah indikator komposit)

Bagan 74. Contoh pengisian kode kegiatan statistik

18. Kolom (15) Nama Variabel Pembangun

Tuliskan nama variabel pembangun dari indikator yang dihasilkan. Variabel pembangun merupakan variabel-variabel yang menjadi bagian/ diambil dalam penghitungan suatu indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik. Nama dari variabel pembangun ini merupakan nama dari variabel yang ada pada instrumen kegiatan statistik terkait atau variabel dari instrumen kegiatan statistik yang dihasilkan oleh unit kerja yang lain.

Pada dasarnya, indikator dibentuk dari data-data yang diperoleh atau dikumpulkan di lapangan dalam bentuk sensus, survei, atau kompilasi produk administrasi. Pembentukan indikator tersebut dapat berasal dari variabel isian/pengumpulan data atau turunan dari variabel tersebut. Selain itu, indikator juga dapat disusun baik dari satu variabel maupun dari beberapa variabel.

Variabel adalah sesuatu yang memiliki nilai yang bervariasi atau berbeda (Brown, 1998:7). Sementara menurut Davis (1998:23), variabel merupakan simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai-nilai. Dalam pengumpulan data, terdapat variabel pertanyaan yang memungkinkan untuk terbentuknya sebuah

indikator. Variabel pembentuk ini dapat berasal dari lebih dari satu pertanyaan.

Darius Singpurwala (2013) memberikan definisi variabel sebagai sebuah karakteristik atau properti dari unit percobaan individu. Sementara itu, Mohammed A. Shayib (2013) memberikan definisi karakteristik individu dalam populasi.

Muhammad Nazir (1988) mengemukakan bahwa terdapat beberapa jenis variabel, yaitu:

a. Variabel Kontinu

Variabel yang memiliki nilai sembarang di antara dua nilai tertentu, baik berupa nilai bulat maupun pecahan, atau variabel yang mengambil seluruh nilai dalam suatu interval.

Contoh:

Berat badan, tinggi, luas, pendapatan, dan sebagainya.

Berat badan dapat ditulis 45 kg, 15 kg, atau 52,125 kg.

b. Variabel Descret

Konsep yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal. Variabel descret sering disebut sebagai variabel kategori. Bila dalam satu variabel mempunyai 2 kategori saja maka variabel tersebut dinamakan variabel dikhotom, sedangkan bila mempunyai lebih dari 1 kategori maka disebut variabel politom.

Contoh:

Dikhotom ---> Jenis kelamin: laki-laki dan perempuan

Politom ---> Tingkat Pendidikan: SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi

c. Variabel Dependen dan Independen

Variabel independen (independent variable) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel yang lain. Variabel dependen (dependent variable) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Kedua tipe variabel ini merupakan kategori variabel penelitian yang paling sering digunakan dalam penelitian karena mempunyai kemampuan aplikasi yang luas.

Contoh:

Jika terdapat hubungan antara konsumsi dan pendapatan, yaitu dengan bertambahnya pendapatan, konsumsi juga akan bertambah, maka:

Dependen ----> Konsumsi (terikat dengan pendapatan)

Independen ----> Pendapatan (variabel bebas)

d. Variabel Moderator dan Random

Variabel moderator merupakan variabel yang memengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator disebut juga variabel independen kedua. Sementara itu, variabel random (acak) digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Jadi, variabel acak dapat diartikan deskripsi numerik hasil percobaan.

Contoh:

Variabel yang mempengaruhi permintaan terhadap ikan (Y) adalah harga ikan (X1), pendapatan (X2), dan harga daging (X3). Ketiga variabel tersebut adalah variabel utama. Jika umur (X4) juga berpengaruh, tetapi bukanlah sebagai penyebab utama, maka umur (X4) disebut dengan variabel moderator. Selain variabel tertentu yang nyata mempengaruhi variabel dependen, masih terdapat variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan hubungan tersebut. Variabel ini dinamakan variabel random dan pengaruhnya dapat dilihat berdasarkan error yang timbul dalam mengadakan estimasi.

e. Variabel Aktif

Variabel bebas yang dimanipulasi oleh peneliti.

Contoh:

Jika peneliti memanipulasi metode mengajar dan cara menghukum mahasiswa, maka metode mengajar dan cara menghukum adalah variabel aktif karena variabel ini dapat dimanipulasi.

f. Variabel Atribut

Variabel yang tidak dapat atau sukar untuk dimanipulasi.

Variabel atribut umumnya merupakan karakteristik manusia,

seperti intelegensia, jenis kelamin, status sosial, pendidikan, sikap, dan sebagainya.

Variabel mempunyai beberapa manfaat, yaitu untuk menyiapkan alat dan metode yang akan dipakai dalam mengumpulkan data, mencari metode tepat guna dalam menganalisis sebuah data dari penelitian, serta memiliki fungsi pada saat melakukan uji hipotesis. Adapun ciri bahwa variabel penelitian dikatakan baik adalah jika sesuai pada tujuan penelitian, variabel bisa saja dilihat serta dilakukan pengukuran. Selain itu, variabel dalam penelitian wajib diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan dengan tegas sehingga akan mengurangi serta mencegah kesalahan saat mengumpulkan bahkan mengolah data.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Nama Variabel Pembangun
(15)
Tidak diisi karena kolom 10 berkode 1 (IKJHI adalah indikator komposit)

Bagan 75. Contoh pengisian atribut variabel

19. Kolom (16) Level Estimasi

Tuliskan level estimasi atau level terendah dari penyajian indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik terkait.

Level estimasi atau level of detail merupakan tingkatan estimasi dari variabel indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik. Biasanya level estimasi disajikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, rumah tangga, atau individu.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Level Estimasi
(16)
Nasional

Bagan 76. Contoh pengisian level estimasi

20. Kolom (17) Apakah Kolom (2) dapat Diakses Umum?

Jika indikator yang ditulis pada kolom (2) dapat diakses umum, maka tuliskan kode 1. Jika indikator tersebut tidak dapat diakses umum, maka tuliskan kode 2.

Confidential status merupakan status akses terhadap indikator terkait, apakah dapat dipublikasikan untuk umum atau tidak. Status tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemudahan akses atau prinsip interoperabilitas data. Oleh karena itu, jika status masing-masing indikator sudah jelas, maka akan lebih memudahkan interoperabilitas data yang dilakukan.

Confidential status terbagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Publik

Status yang menyatakan bahwa indikator yang dihasilkan dapat dipublikasikan atau boleh diakses untuk umum dan tidak bersifat rahasia atau hanya untuk kepentingan peneliti.

b. Private atau rahasia

Status yang menyatakan bahwa indikator yang dihasilkan tidak dipublikasikan atau tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.

Contoh: Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (SKJHI) 2018

Apakah Kolom (2) Dapat Diakses Umum?	
Ya	-1
Tidak	-2
(17)	
11	

Bagan 77. Contoh pengisian akses terhadap suatu indikator

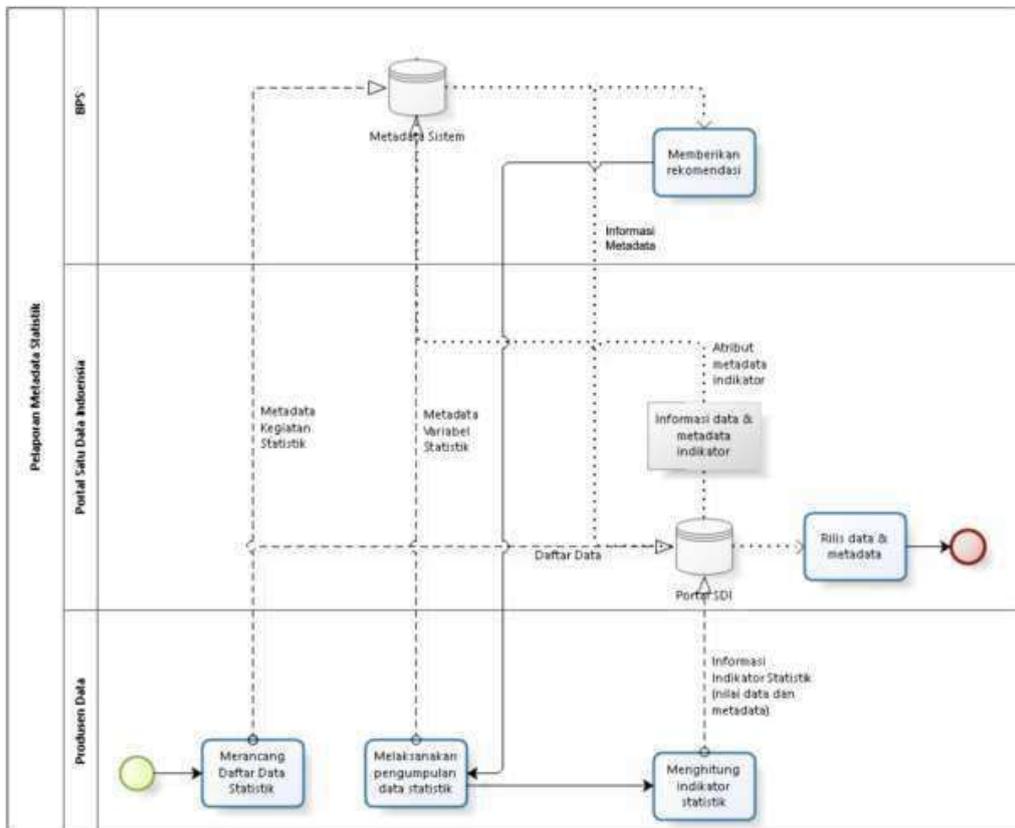
BABV MEKANISME PELAPORAN

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Pasal 1, Produsen data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta tugas produsen data yang tertuang pada pasal 15 perihal kewajiban untuk menyampaikan data dan metadata kepada walidata. Adapun sarana ditetapkan sebagai tempat penyebarluasan data dan metadata sebagaimana dituangkan pada pasal 14 ayat 1 adalah Portal Satu Data Indonesia.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, maka perlu diatur mekanisme pelaporan metadata yang melibatkan Portal Satu Data Indonesia dengan Sistem Metadata di BPS dengan menerapkan kaidah interoperabilitas antarsistem.

A. Pelaporan Langsung ke BPS

Pelaporan langsung adalah mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh produsen data kepada BPS sebagai pembinan data statistik menggunakan media pelaporan yang disampaikan secara langsung baik menggunakan sarana kuesioner ataupun input langsung kedalam metadata sistem BPS. Pelaporan secara langsung sejalan dengan skema Sistem Statistik Nasional (SSN) sebagaimana tergambar pada diagram berikut.



C. Layanan Informasi

1. Kementerian/Lembaga

Direktorat Diseminasi u.p. Subdirektorat Rujukan Statistik memberikan layanan informasi yang dapat dilihat dan diunduh melalui halaman resmi website BPS untuk mendapatkan informasi terkini tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam instrumen pengumpulan metadata, petunjuk pengisian, dan mekanisme pelaporan. Informasi layanan informasi dapat diakses melalui:

Email : sirusa@bps.go.id

Alamat : Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Badan Pusat Statistik

Jl. DR. Sutomo No 6-8

Jakarta Pusat 10710

Telepon : (62-21) 3841195, 3842508, 3810291

Fax. : (62-21) 3857046

2. Dinas/Instansi Provinsi atau Kabupaten/Kota

Informasi layanan informasi dapat diakses melalui alamat kantor, email, dan telepon masing-masing kantor BPS provinsi/kabupaten/kota wilayah setempat.

BAB V
PENUTUP

Penerapan metadata statistik mutlak diperlukan untuk lebih menjamin pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari satu data Indonesia. Agar petunjuk teknis tentang metadata statistik dapat diimplementasi dengan baik, diperlukan peran serta seluruh pihak baik internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan lain. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh elemen termasuk sistem yang telah berjalan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan metadata statistik.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO

A. Instrumen Metadata Statistik Kegiatan



Badan Pusat Statistik

MS-Keg

METADATA STATISTIK KEGIATAN

Judul Kegiatan:		Tahun:
Kode Kegiatan (diisi oleh petugas):		
Cara Pengumpulan Data:		
Pencacahan Lengkap	- 1	Kompilasi Produk Administrasi - 3
Survei	- 2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI -4
Sektor Kegiatan:		
Pertanian dan Perikanan	- 1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan -12
Demografi dan Kependudukan	-2	Ketenagakerjaan -13
Pembangunan	- 3	Neraca Nasional - 14
Proyeksi Ekonomi	-4	Indikator Ekonomi Bulanan - 15
Pendidikan dan Pelatihan	-5	Produktivitas -16
Lingkungan	- 6	Harga dan Paritas Daya Beli - 17
Keuangan	-7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar - 18
Globalisasi	-8	Perwilayahan dan Perkotaan - 19
Kesehatan	-9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten - 20
Industri dan Jasa	- 10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan - 21
Teknologi Informasi dan Komunikasi	- 11	Transportasi - 22
Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		
Ya	- 1	
Tidak	- 2	
Jika "Ya", Identitas Rekomendasi:		

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara:

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

Telepon

Faksimile

E-mail

II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1

Eselon 2

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan Alamat

Telepon

Faksimile

E-mail

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

3.2. Tujuan Kegiatan:

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Awai (tgl/bln/thn)				Akhir (tgl/bln/thn)		
A. Perencanaan							
1. Perencanaan Kegiatan				s.d.			
2. Desain				s.d.			
B. Pengumpulan							
3. Pengumpulan Data				s.d.			
C. Pemeriksaan							
4. Pengolahan Data				s.d.			
D. Penyebarluasan							
5. Analisis				s.d.			
6. Diseminasi Hasil				s.d.			
7. Evaluasi				s.d.			

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan:

Hanya sekali - 1 → langsung ke R.3.3. Berulang -2

4.2. Jika "berulang" (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:

Harian - 1 Empat Bulanan - 5
 Mingguan - 2 Semesteran -6
 Bulanan - 3 Tahunan - 7
 Triwulanan -4 > Dua Tahunan -8

4.3. Tipe Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>
<i>Longitudinal Panel</i>	- 1	
<i>Longitudinal Cross Sectional</i>	- 2	
<i>Cross Sectional</i>	- 3	
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>
Seluruh Wilayah Indonesia	- 1 <i>_, langsung ke R.4.6.</i>	
Sebagian Wilayah Indonesia	- 2	
4.5. Jika "sebagian wilayah Indonesia" (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan:		
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
4.6. Metode Pengumpulan Data:		
Wawancara	- 1	
Mengisi kuesioner sendiri (swacakah)	- 2	
Pengamatan (observasi)	- 4	
Pengumpulan data sekunder	- 8	
Lainnya (sebutkan)	- 16	
4.7. Sarana Pengumpulan Data:		
<i>Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)</i>	- 1	
<i>Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)</i>	- 2	
<i>Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)</i>	- 4	
<i>Computer Aided Web Interviewing (CAWI)</i>	- 8	
<i>Mail</i>	- 16	
Lainnya (sebutkan)	- 32	
4.8. Unit Pengumpulan Data:		
Individu	- 1	
Rumah tangga	- 2	
Usaha/perusahaan	- 4	
Lainnya (sebutkan)	- 8	

V. DESAIN SAMPEL	
Diisi jika cara pengumpulan data adalah survei sebagian	
5.1. Jenis Rancangan Sampel:	
<i>Single Stage/Phase</i>	- 1
<i>Multi Stage/Phase</i>	-2
5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:	
Sampel Probabilitas	- 1---> ke R.5.3.a
Sampel Nonprobabilitas	- 2---->ke R.5.3.b
5.3. Jika "sampel probabilitas" (R.5.2. berkode 1), Metode yang Digunakan:	
<i>Simple Random Sampling</i>	- 1
<i>Systematic Random Sampling</i>	- 2
<i>Stratified Random Sampling</i>	- 3-----> ke R.5.4
<i>Cluster Sampling</i>	-4
<i>Multi Stage Sampling</i>	- 5
Jika "sampel nonprobabilitas" (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan:	
<i>Quota Sampling</i>	- 6
<i>Accidental Sampling</i>	- 7
<i>Purposive Sampling</i>	- 8----> ke R.5.7
<i>Snowball Sampling</i>	- 9
<i>Saturation Sampling</i>	- 10
5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:	
<i>List Frame</i>	- 1
<i>Area Frame</i>	-2
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:	
5.6. Nilai Perkiraan <i>Sampling Error</i> Variabel Utama:	
5.7. Unit Sampel:	
5.8. Unit Observasi:	
VI. PENGUMPULAN DATA	

7.2. Metode Analisis:				<input type="checkbox"/>
Deskriptif	- 1			
Inferensia	-2			
Deskriptif dan Inferensia	-3			
7.3. Unit Analisis:				<input type="checkbox"/>
Individu	- 1	Usaha/perusahaan	- 4	
Rumah tangga	- 2	Lainnya (sebutkan)	- 8	
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:				
Nasional	- 1	Kecamatan	-8	
Provinsi	-2	Lainnya (sebutkan)	- 16	
Kabupaten/Kota	- 4			
VIII. DISEMINASI HASIL				
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:				<input type="checkbox"/>
Tercetak (<i>hardcopy</i>)	Ya - 1	Tidak	-2	
Digital (<i>softcopy</i>)	Ya - 1	Tidak	-2	
Data Mikro	Ya - 1	Tidak	-2	
8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan:				
	Tanggal	Bulan	Tahun	
Tercetak				
Digital				
Data Mikro				

----- 20_

Mengetahui,
Direktur/Kepala Biro

NIP.

B. Instrumen Metadata Statistik Variabel

9'1d.u>Fw<!!Sküirll!:

MS-Ver

METADATA STATISTIK
VARIABEL

lieter-an Keajalan 51.a:istik

Nara.aKelJf*an		Kad.e.Kegtü:M1 [a]llllf'f'>fii']J§iH)		Poe'nJ!e-l. a1*		Insta,u:5 Unili Koll.IIEis!ttan! Unit K.,,l., Esefon II Unit K •lai E ulfon III					
No	N- V--I	ANu	K''''-i,	DMilii-i	Ref1Ptien:sl P.,,.,...	R e i _ _ 9 _ _	n.,.,a_	1Ua1Witni ltl n	111.,.,,¥aklul	KMI-M r.,,UN "" -1n-111 V., -1 Tl<lk -2
I	121		I*	III	I,I	II	I*	II	III	I*	IKI

_____20

M et#hui.

03'11. u-lnc'atpüb-i Birn _

f:-MdJ--''-i'IMW
!!!!

C. Instrumen Metadata Statistik Indikator

-a, Sli##rt4:

M5-1nd

METADATA STATISTI
INDJKATOR

Keller.af'IOan tceal:iln Sltiti**														
N--*K*!Jf.atan					Per:n.,druggara.		Ins*.1nsll Unit f(-.ai* Pe-Ian I U.-Wh Ke I,jii E.selon II EJ'rul KoiniZHEI sa-Lan t*							
Kad'iiii!:K UW1 fdol..C..hp J														
No	Nilai.. Indii:ii91	K p	Do,Ilntil	1m..Jp1etu	Mtr,od'elRutlImS P-enahi unaan	IlIn.wan	S'.muilin	KJ-il"-1 PitfY-0: n -10	PIK-1 lodfk:ato. P.MIII	4".....lor.: fll'J..f..? V-- Pe,N>.A....	Le-we.I IEmlUrnl ic-- -1 -2

M ii!-it..ahut. <lll
0-... BUIII(p:alla8riLi.

C' Md. - O... .. J
loll'.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangka
Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur II
Sungailiat - Bangka